



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANGKALAN

# LAPORAN AKHIR



# STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN BANGKALAN

TAHUN  
2019

## BAB I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Dinamika pembangunan baik pusat maupun daerah terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan respons terhadap tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adil dan transparan. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara mendasar telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sesuai amanat pada Pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan keduanya merupakan skema untuk membangun kemakmuran, disisi lain Pemerintah Daerah dapat melakukan reformasi pelayanan publik dan kebijakan pembangunan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pelayanan publik yang paling mendasar adalah pendidikan dan kesehatan, sementara dalam mengurangi kemiskinan merupakan aksi mendasar dalam kebijakan sosial. Dalam Konteks Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam visi **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”**, selanjutnya dari visi tersebut dijabarkan melalui misi keempat yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut berbagai program pembangunan telah dilaksanakan. Program-program pembangunan tersebut tentu saja telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun beberapa di antaranya berjalan belum maksimal dan masih menyisahkan tugas yang berat untuk mencapai target khususnya dikaitkan dengan tujuan pembangunan milenium (MDG’S). Tingkat kualitas pendidikan dan kesehatan adalah prioritas yang ditinjau untuk kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Bangkalan. Tugas



pemerintah daerah lainnya adalah bagaimana menciptakan pendidikan dasar bagi semua.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan statistik kesejahteraan rakyat yang telah dicapai selama ini di Kabupaten Bangkalan, di perlukan indikator-indikator kesejahteraan rakyat yang akan memberikan informasi mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek meliputi sosial, kesehatan, pendidikan, investasi dan pendapatan daerah. Informasi statistik sektoral tersebut selain sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan selama ini, juga sebagai bahan masukan penetapan kebijakan pembangunan Kabupaten Bangkalan di tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya dalam penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Bangkalan tahun 2019 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.

## 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

### 1. Maksud.

Maksud dari Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Bangkalan 2019 adalah untuk menyajikan informasi mengenai potret dan perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan dalam jangka waktu dua tahun terakhir, dimana dalam mengukur taraf kesejahteraan masyarakat digunakan beberapa indikator, yang memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Tujuan.

Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk mengetahui sejauhmana hasil dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD), sebagai implementasi dari visi dan misi Bupati Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RPJMD, serta sebagai acuan bagi Pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Sasaran.

Sasaran yang hendak dicapai dalam Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Bangkalan 2019 ini adalah selain masyarakat, juga Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana kegiatan/program yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

## 1.3 Ruang Lingkup

Dimensi kesejahteraan rakyat di sadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Oleh karena itu dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik yaitu sosial, kesehatan, pendidikan, investasi dan pendapatan daerah. Setiap aspek di sajikan secara terpisah dan merupakan bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan atau dapat diukur. Publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan dapat diukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

## 1.4 Dasar Hukum

- 1) UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 3) Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- 6) Peraturan Kepala BPS No 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

## 1.5 Keadaan Bangkalan saat ini

- 1) Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi
- 2) Indeks Pembangunan Manusia di bawah rata-rata
- 3) Tingkat Pengangguran relatif tinggi



- 4) Pertumbuhan ekonomi rendah dan tidak stabil, serta kesenjangan ekonomi yang relatif meningkat
- 5) Terbatasnya implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari meskipun Kabupaten Bangkalan dikenal dengan budaya yang Islami.
- 6) Terbatasnya daya saing daerah

### 1.6 Tujuan yang ingin dicapai

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Mengoptimalkan fasilitasi aktivitas ekonomi kerakyatan dan sosial budaya berbasis potensi lokal.
- 5) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan menjaga daya dukung kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.
- 7) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi daerah.

## BAB II. Konsep dan Definisi

### 2.1. Konsep Kesejahteraan

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih adawarga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

1. Rasa Aman
2. Kesejahteraan
3. Kebebasan
4. Jati diri

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:



1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.”

Definisi-definisi di atas mengandung pengertian bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual.

Wismuadji (2008: 2) mengemukakan bahwa tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk pada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan dan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara agregat.

Robi dalam Narwoko (2006: 114) mengemukakan bahwa tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbatasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dengan kata lain lingkup

substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial. Indikator Tingkat Kesejahteraan. Nugroho (2004: 17) mengemukakan bahwa indikator kesejahteraan berkaitan erat dengan kemiskinan karena seseorang digolongkan miskin atau tidak jika seberapa jauh indikator-indikator kesejahteraan tersebut telah di penuhi. Indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi moneter yaitu pendapatan dan pengeluaran. Disamping itu, kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi nonmoneter misalnya kesejahteraan, pendidikan dan partisipasi sosial.

## 2.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal manusia (human capital) yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Kesehatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, seperti perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, ataupun perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya penduduk yang akan membawa tingkat partisipasi angkatan kerja. Secara teoritis, WHO menyebutkan bahwa hubungan antara kesehatan dan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut.

Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan



penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Aspek-aspek kesehatan untuk mewujudkan kesejahteraan ialah :

- a. **Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Sarana Kesehatan** adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah sarana kesehatan yang tersedia.
- b. **Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Tenaga Kesehatan** adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia.
- c. **Persentase Persalinan Oleh Tenaga Medis** adalah rasio banyaknya proses persalinan yang di tolong oleh tenaga medis (dokter, paramedis, bidan, dan perawat) terhadap seluruh persalinan yang terjadi pada saat tertentu.
- d. **Persentase Pendudukan Yang Mengalami Keluhan Kesehatan** atau **Angka Kesakitan** adalah rasio antara banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dibagi dengan jumlah pendudukan pada suatu saat.
- e. **Rata-Rata Lama Sakit** adalah rata-rata yang lamanya terganggu kesehatan (dalam hari) yaitu terganggunya kegiatan/aktivitas sehari-hari bagi seseorang yang mengalami keluhan kesehatan.

### 2.3. Pendidikan

Pendidikan secara universal berarti upaya perubahan manusia menjadi lebih cerdas, yang dalam konsep filsafat pendidikan Indonesia dinyatakan bahwa pendidikan ialah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kecerdasan di sini jangan ditafsirkan sebagai kecerdasan kognitif atau intelektual belaka, tapi kecerdasan manusia yang seutuhnya, kecerdasan total manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. Modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi adalah tiga faktor pokok masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka kualitas manusia meningkat untuk dapat mengolah sumber daya alam yang ada untuk produksi. Menurut Elwin Tobing saat ini paling tidak tiga perspektif secara teoritis yang menjelaskan hubungan antara pendidikan

dan pertumbuhan ekonomi, yakni teori modal manusia, teori alokasi dan teori reproduksi strata sosial. Aspek kualitas pendidikan sebuah wilayah dapat dilihat dari :

- a. **Bersekolah** adalah terdaftar dari aktif mengikuti proses belajar mengajar disuatu jenjang pendidikan ormal, baik yang dibawah pengawasan kementerian diknas maupun kementerian/instansi lain.
- b. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian.
- c. **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun keatas.
- d. **Rasio Murid dan Guru** adalah perbandingan antara jumlah murid dan guru pada jenjang pendidikan yang bersesuaian.
- e. **Rasio Murid dan Sekolah** adalah perbandingan antara jumlah murid dan sekolah pada jenjang pendidikan yang bersesuaian.

#### 2.4. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang sangat mendukung pembangunan, tetapi hal ini harus diiringi dengan kualitas sumber daya manusia. Pertambahan jumlah penduduk dapat dikatakan sebagai faktor pendorong dalam pembangunan ekonomi apabila hal ini diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, akan tetapi disisi lain pertambahan penduduk dapat dikatakan sebagai penghambat apabila tidak disertai oleh adanya perluasan kesempatan kerja. secara teoritis pertumbuhan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang

mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja dari sebelum, sesudah ataupun selama bekerja. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam ketenagakerjaan adalah :

- a. **Angka Beban Tanggungan (*Dependancy Ratio*)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam usia tidak produktif (0-14 tahun/penduduk usia muda dan 65 tahun keatas/penduduk usia tua) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun).
- b. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus di lakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.
- c. **Menganggur** adalah keadaan seseorang yang di mana selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja atau putus asa dalam mencari pekerjaan).
- d. **Angkatan Kerja (AK)** adalah mereka yang selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja (karena sakit, cuti, dan sebagainya) serta mereka yang sedang menganggur.
- e. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja atau penduduk usia kerja (umur 15 tahun ke atas).
- f. **Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang mempunyai pekerjaan (sedang bekerja atau

sementara tidak bekerja) terhadap total penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja.

- g. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur (tidak mempunyai pekerjaan dan sedang berusaha mencari kerja atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tapi belum mulai bekerja).
- h. **Lapangan Usaha/Pekerjaan** ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.
- i. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan meliputi Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai,pekerja bebas dan Pekerja keluarga/tak dibayar.

## 2.5. Investasi

Pandangan orang tentang investasi secara makro masih sangat simpang siur. Banyak kalangan atau masyarakat yang menganggap bahwa dengan membeli saham dipasar modal adalah investasi. Dalam analisis makro tindakan individu atau masyarakat tersebut bukanlah termasuk melakukan investasi.

Untuk memperjelas apa arti investasi agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahpahaman maka harus terlebih dahulu diterangkan apa pengertian investasi secara makro tersebut.

Menurut Sukirno (1997), investasi merupakan pengeluaran untuk penanam-penanam modal oleh perusahaan atau untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi, serta untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Investasi ini biasa disebut sebagai penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat.

J.M. Keynes dalam bukunya “ *The General Theory of Employment, Interest and money* “ (terj. W.H Makaliwe, 1991 : 21) menggolongkan pengeluaran pengusaha menjadi dua, yaitu :

1. *Biaya faktor produksi* bagi kesempatan kerja tersebut atas jasa-jasa faktor produksi yang digunakan sekarang selain dari usahawan lain (produsen lain).
2. *Biaya penggunaan bagi kesempatan kerja tersebut.*

Biaya yang harus dibayarkan kepada usahawan lain atas barang yang dibeli dari mereka dan juga pengorbanan untuk menggunakan peralatan daripada membiarkan menganggur.

Selisih antara nilai hasil produksi yang diperoleh terhadap biaya faktor produksi dan penggunaan merupakan pendapatan pengusaha (laba). Dari segi pengusaha pendapatan agregat adalah biaya produksi ditambah laba.

Dana investasi bisa berasal dari perusahaan sendiri maupun berasal dari luar perusahaan. Modal yang berasal dari dalam perusahaan biasa disebut sebagai modal intern. Sedang modal yang berasal dari luar perusahaan biasa disebut sebagai modal ekstern.

Tabungan masyarakat dari sektor rumah tangga yang disimpan pada institusi-institusi lembaga keuangan dapat dipinjamkan kepada pengusaha atau perusahaan. Pinjaman ini merupakan sumber modal diluar perusahaan atau pihak ketiga yang lazim disebut sebagai modal ekstren. Apabila modal ini oleh para pengusaha atau perusahaan digunakan untuk menambah jumlah barang modal maka ini bisa disebut sebagai investasi.

Adapun maksud investasi secara nasional diharapkan bisa menambah stok jumlah barang dan jasa dalam perekonomian. Dengan adanya tambahan investasi yang besar maka akan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian suatu negara.

Investasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan cara membeli barang-barang modal untuk menambah persediaan digudang maupun untuk mengganti barang modal

yang telah rusak. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan baru, baik sebagai perluasan perusahaan induk maupun sebagai pendirian perusahaan yang baru dibentuk.

Sukirno (1997:107) dengan melihat secara praktis dimasyarakat (negara) tentang pencatatan investasi pada suatu tahun tertentu, sehingga ia telah menggolongkan pengeluaran/perbelanjaan sebagai berikut :

- Pembelian berbagai jenis barang modal, meliputi mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
- Pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, pembangunan pabrik dan bangunan lainnya.
- Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Jumlah total dari pengeluaran diatas lazim disebut sebagai investasi bruto. Investasi bruto ini untuk menambah barang modal dan menggantikan barang yang rusak. Investasi netto dapat diperoleh dari investasi bruto dikurangi besarnya depresiasi. Depresiasi ini merupakan nilai penyusutan barang modal tetap (fixed) dalam satu tahun atau satu periode.

Investasi merupakan komponen kegiatan ekonomi yang dapat berubah-ubah dan sangat tergantung dengan faktor-faktor ekonomi lainnya. Perubahan ini bisa meningkat dan juga bisa menurun. Dari perubahan-perubahan ini tentunya ada faktor yang menyebabkannya. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perubahan investasi ini perlu kita bahas. Seberapa besar investasi akan berubah akibat dari perubahan sektor ekonomi yang lain? Serta sektor atau pos-pos apa saja yang akan dipengaruhinya?

### 2.5.1. Bentuk dan Penggolongan Investasi

Banyak pihak atau badan-badan yang melakukan investasi dalam suatu proses produksi, sehingga penggolongan investasi menurut para pelaksana ini

dapat digolongkan menjadi tiga sektor, antara lain meliputi (Sobari,1992:103): i. sektor pemerintah, ii. sektor swasta ( perusahaan ), iii. sektor rumah tangga.

a. Sektor Pemerintah (*Public Investment*)

Public investment biasanya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat atau yang memenuhi hajat hidup orang banyak yang membutuhkan sedikit keuntungan sehingga tidak mungkin di alihkan pada pihak swasta. Investasi ini sering disebut *social overhead capital* ( SOC ). Social overhead capital dibagi menjadi dua yaitu EOC dan SOC itu sendiri. EOC (*economic overhead capital*) adalah barang-barang yang memberikan faedah umum (*public utilities*) seperti pelabuhan, jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya. Sedangkan SOC (*social overhead capital*) adalah tanah dan bangunan yang di perlukan untuk naungan dan pemukiman seperti : sekolah-sekolah, rumah sakit dan sebagainya.

b. Investasi Swasta (*Private Investment*)

Investasi yang dilakukan oleh pihak swasta yang ditujukan untuk memperoleh laba, dan didorong oleh pendapatan income. Jika income bertambah, maka bertambah pula pada konsumsi dan bertambah pula pada effectif demond. Investasi yang timbul karena penambahan permintaan dan penambahan pendapatan disebut *ducate invesment*.

c. Investasi swasta dan pemerintah (*Private and Public Investment*)

Investasi ini ialah investasi luar negeri. Biasanya investasi ini dilihat dari perbandingan antara exsport dan import (x-m), dimana nilai exsport diatas nilai import pada perdagangan di luar negeri.

Pada negara maju, dari para pelaku ekonomi ini yang tercatat sebagai investor terbesar adalah sektor swasta. Sektor ini memegang kegiatan ekonomi (investasi) sangat besar. Jadi kebanyakan negara maju perekonomiannya banyak ditentukan oleh sektor swasta atau yang biasa disebut sebagai ekonomi pasar.

Untuk negara-negara berkembang biasanya sektor pemerintahan masih memegang peranan penting dalam perekonomian. Sehingga pengawasan pemerintah masih sangat melekat dan kuat.



Pemerintah melakukan investasi terutama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Investasi pemerintah berupa pengeluaran/pembelian oleh pemerintah untuk membuat atau menyediakan prasarana umum yang lazim disebut barang publik. Pengeluaran ini meliputi pengeluaran untuk membangun jalan, sekolah rumah sakit, proyek irigasi dan pembangunan prasarana yang lainnya.

Sektor swasta melakukan pengeluaran investasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi demi keuntungan semata. Karena keterbatasan kemampuan pemerintah maka akan menyebabkan ketimpangan investasi pada berbagai sektor pembangunan. Sehingga ada sebagian sektor yang akan ketinggalan dalam pembangunan.

Secara makro implikasi dari investasi baik oleh pemerintah maupun swasta adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Jadi siapapun yang melakukannya patut didukung.

Investasi juga dapat digolongkan menurut asalnya investor, yaitu: Investasi domestik dan Investasi asing. Investasi domestik merupakan investasi yang dilakukan oleh penduduk dalam negeri, baik pemerintah dalam negeri maupun pihak swasta. Investasi asing merupakan investasi yang dilakukan oleh penduduk asing.

Menurut penggolongan yang dilakukan oleh Suparmoko (1992 : 76), maka investasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : (i) Investasi finansial, investasi ini berupa penanaman modal dengan sejumlah dana melalui pasar modal. Investasi ini biasa disebut sebagai investasi portofolio (finansial) atau investasi tidak langsung. ii. Investasi dalam bentuk fisik, investasi ini berupa penanaman modal secara langsung pada perusahaan atau biasa disebut sebagai investasi langsung. Bentuknya bisa berupa penambahan / pembelian barang-barang fisik, misal : pembangunan jalan, pembangunan gedung, pembelian peralatan atau mesin-mesin dan lain sebagainya yang termasuk pengadaan barang fisik.

Dari kedua bentuk investasi ini memiliki latar belakang sendiri-sendiri atau tujuan yang berbeda dari para investor. Pada investasi finansial pada



umumnya para investor menanamkan dananya yang masih menganggur (*idle fund*). Mereka kelebihan dana atau dananya belum merasa saatnya untuk dioperasikan pada sektor dunia usaha, baik untuk mendirikan perusahaan atau untuk menambah kapasitas produksi.

Investasi langsung ini memang agak berbeda dengan investasi finansial. Prosedur untuk melakukan investasi ini, terutama pendirian perusahaan baru cukup rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Begitu pula dengan pengadaan barang-barang modal akan memakan waktu relatif lama. Selain itu juga dalam pemilihan sektor investasi yang dianggap cukup produktif perlu kejelian dan analisa khusus. Sebab pemilihan sektor investasi ini akan menentukan tingkat keuntungan dan pengembalian modal. Penentuan sektor investasi akan menentukan pemilihan tempat serta pangsa pasar yang tersedia. Jadi analisa sebelum menjatuhkan pilihan investasi langsung ini sangat penting. Penentuan kriteria investasi dapat membantu untuk melakukan pilihan investasi.

## 2.5.2. Sumber Investasi

### 2.5.2.1. Penanam Modal Dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri adalah investasi yang dilakukan oleh pihak atau penduduk dalam negeri. Investasi ini bisa dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Investasi dalam negeri (domestik) memiliki sumber dana dari tabungan domestik dan hutang luar negeri. Apabila sumber domestik ini masih kurang atau dengan kata lain tabungan domestik tidak mencukupi maka pihak investor domestik dapat mencari alternatif pendanaan yang lain dari luar negeri.

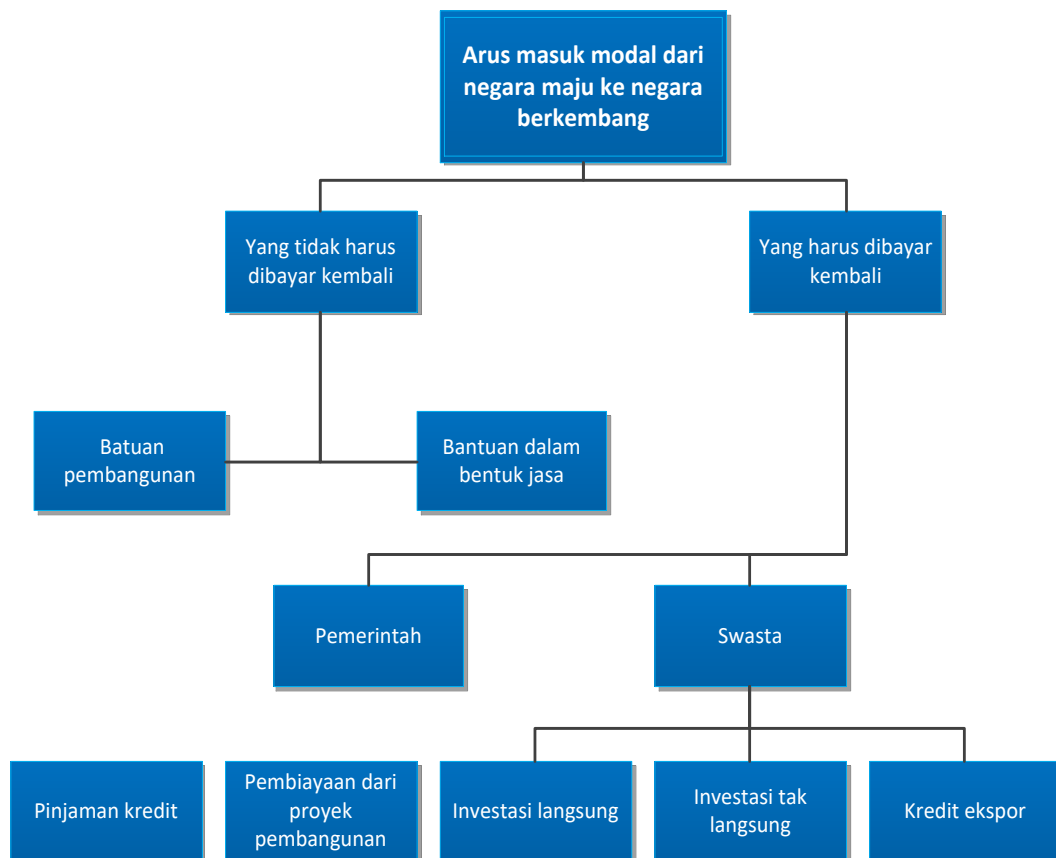
Pihak investor domestik dapat mencari dana alternatif, misal : hutang kepada pihak asing. Untuk menggali dana asing ini biasanya dapat dilakukan kerjasama baik oleh pemerintah maupun swasta, baik secara bilateral maupun multilateral.

Pihak asing dalam memberikan bantuan dana pada suatu negara biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai tujuan mereka. Bantuan ini disalurkan melalui kerjasama, baik dalam bentuk hutang maupun penanaman modal.



Pihak pemerintah untuk mendapatkan dana ini biasanya dalam bentuk bantuan. Bantuan kepada pemerintah dari pihak asing sebenarnya merupakan hutang luar negeri pemerintah. Sedang pihak swasta untuk mendapatkan dana asing dapat melakukan lobi secara langsung, baik dalam bentuk hutang maupun kerjasama dalam bentuk penanaman modal. Hutang ini lazim disebut sebagai hutang luar negeri swasta. Sehingga semua bantuan-bantuan luar negeri ini biasa disebut hutang luar negeri swasta.

Untuk lebih jelasnya menjelaskan arus modal masuk ini dapat dilihat pada skema berikut ini :



Sumber : Hall Hill, 1988.

**Gambar 2.1. Skema Arus Masuk Modal Dari Negara Maju (Donatur) ke Negara Sedang Berkembang**

Negara-negara donatur terutama pihak swasta didalam pemberian pinjaman akan mempertimbangkan kondisi makro negara debitur. Tujuan utama

dari donatur asing ini adalah kepentingan laba atau komersial. Apabila kerjasamanya ini menguntungkan maka donatur akan memberikan bantuan atau hutang kepada debitur negara lain.

Bagi negara sedang berkembang didalam memupuk investasi domestiknya masih banyak tergantung oleh bantuan asing. Hal ini dikarenakan oleh tingkat tabungan yang rendah sebagai akibat dari pendapatan yang rendah. Tabungan negara berkembang yang relatif kecil ini belum mencukupi kebutuhan investasi dalam negerinya.

#### 2.5.2.2. Penanaman Modal Asing

Menurut Hall Hill (1988:87), perusahaan-perusahaan transnasional (TNC) atau multinasional yang mengembangkan bisnisnya ke wilayah negara lain menawarkan beberapa paket kerja sama dengan mitra dalam negeri. Paket kerja sama tersebut antara lain meliputi paket produksi, manajemen dan teknologi pemasaran.

Apapun bentuk kerjasama yang diberikan oleh asing sangat bermanfaat bagi negara penerima. Bagi negara penerima sendiri harus bisa memaksimalkan bantuan faktor-faktor tersebut untuk mencapai arti pembangunan dalam arti luas.

Penerimaan sumber-sumber investasi asing ini perlu untuk dilakukan deversifikasi beberapa negara donor. Hal ini dimaksudkan agar negara penerima dapat memperoleh manfaat maksimum dalam beberapa aspek.

Sumber-sumber investasi asing sangat dibutuhkan bagi negara penerima dengan alasan dua faktor. *Pertama*, dalam hal investasi asing, banyak negara yang menghindari ketergantungan terhadap satu negara atau beberapa negara saja. Keputusan ini didasarkan atas pertimbangan faktor-faktor ekonomis. Semakin banyak atau beragamnya investor asing dari beberapa negara maka akan menambah semakin besar dan luas manfaat yang didapatkan. Investor yang berbeda-beda ini akan membawa informasi yang berbeda atas teknologi, manajemen dan peluang pasar luarnegeri. Selain pertimbangan tersebut juga untuk menghindari sentiman nasional dan manipulasi asing. *Kedua*. Saat ini menurut

pengamatan sementara kalangan, ada beberapa perbedaan perilaku para penanam modal asing dari beberapa negara.

Pertimbangan tersebut diatas kiranya dapat menjadi dasar dalam menentukan komposisi modal asing yang dibolehkan masuk dan harus diusahakan. Pemerintah negara penerima juga bisa mengusahakan dan merangsang pihak asing untuk menanamkan modalnya yang lebih besar.

## 2.6. Pendapatan Asli Daerah

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah: “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## BAB III. Metode Penulisan

### 3.1 Lokasi

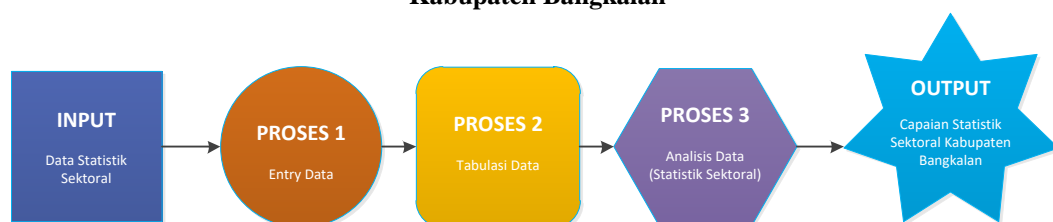
Lokasi Penyusunan Statistik Sektoral ini di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dengan 5 (lima) perangkat daerah (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Badan Pendapatan Daerah) dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui diskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) dan pengumpulan data sekunder.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui pendokumentasian data-data sekunder terkait. Sumber data adalah data-data investasi, kondisi sosial-ekonomi, pendapatan asli daerah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Data yang terkumpul selanjutnya akan ditabulasikan dengan rancangan tabulasi tertentu untuk selanjutnya dilakukan analisis statistik Sektoral. Data dianalisis dengan analisis statistik sektoral sederhana untuk mengetahui rata-rata, standart deviasi, distribusi, dan lain-lain.

**Gambar 3.1. Bagan Alur Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangkalan**



## BAB IV. Data Sektoral

### 4.1 Dinas Kesehatan

Kesehatan adalah hak dasar manusia dan merupakan salah satu aspek kualitas dari sumber daya manusia. Kesehatan juga menjadi salah satu kebutuhan bagi setiap manusia yang harus dicermati. Sumber daya manusia (SDM) yang sehat secara fisik akan mampu beraktifitas dengan baik menggunakan tenaga yang ada. Selain itu dengan kesehatan manusia diharapkan dapat menjadi manusia yang berkualitas sehingga dapat ikut berperan dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui pembangunan bidang kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang memadai dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

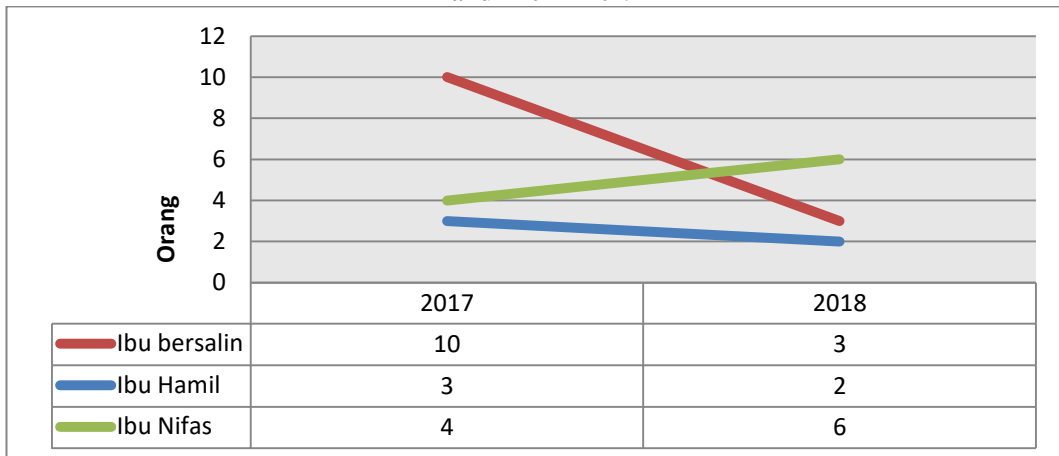
Kesehatan merupakan salah satu aspek yang terpenting yang dapat dijadikan komponen untuk menilai kesejahteraan masyarakat, dengan melihat dan mengetahui derajat kualitas fisik penduduk dari segi kesehatannya. Indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain dapat diukur melalui angka kesakitan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan dengan tindakan nyata misalnya melalui peyediaan berbagai fasilitas kesehatan dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai beserta tenaga medis yang berkualitas. Selain itu juga upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperilaku sehat.

Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan, ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapatkan perhatian utama.

### 4.1.1. Angka Kematian (Mortalitas)

#### a. Kematian Ibu

**Gambar 4.1 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017- 2019**

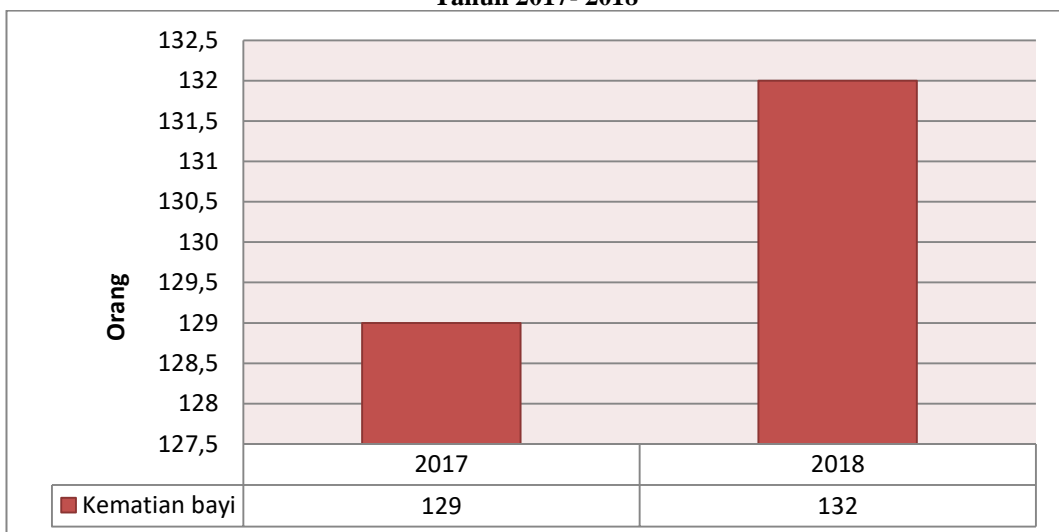


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2019

Jumlah Ibu bersalin yang mengalami kematian mengalami penurunan dari 10 orang di tahun 2017 menjadi 3 orang di tahun 2018, kematian ibu hamil juga mengalami penurunan dari 3 orang di tahun 2017 menjadi 2 orang di tahun 2018. Sementara itu, ibu nifas yang meninggal meningkat dari 4 orang di tahun 2017 menjadi 6 orang di tahun 2018.

#### b. Kematian Bayi

**Gambar 4.2 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017- 2018**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2019

Jumlah kematian bayi mengalami peningkatan pada tahun 2017 jumlah bayi meninggal sebesar 129 dan tahun 2018 jumlah kematian bayi sebesar 132. penyebab meningkatnya kematian bayi tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan kesehatan, kesadaran dan pemeriksaan kesehatan bayi pada tenaga kesehatan, pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam penatalaksanaan bayi.

**c. Kematian Balita**

**Gambar 4.3 Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017- 2018**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2019

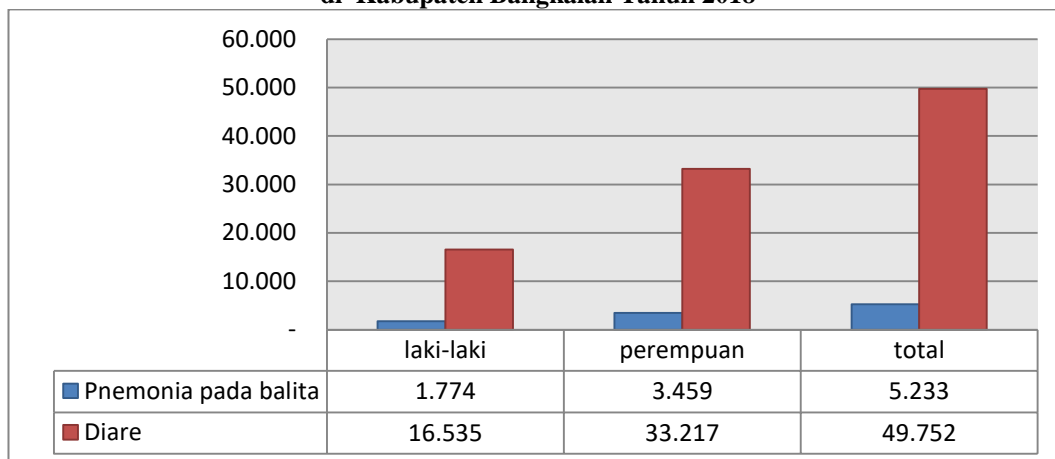
Jumlah kematian balita mengalami peningkatan pada tahun 2017 jumlah balita meninggal sebesar 138 dan tahun 2018 jumlah kematian balita sebesar 140. penyebab meningkatnya kematian balita tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan kesehatan, kesadaran dan pemeriksaan kesehatan bayi pada tenaga kesehatan, pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam penatalaksanaan bayi.



### 4.1.2. Angka Kesakitan (Morbiditas)

#### a. Penyakit Menular

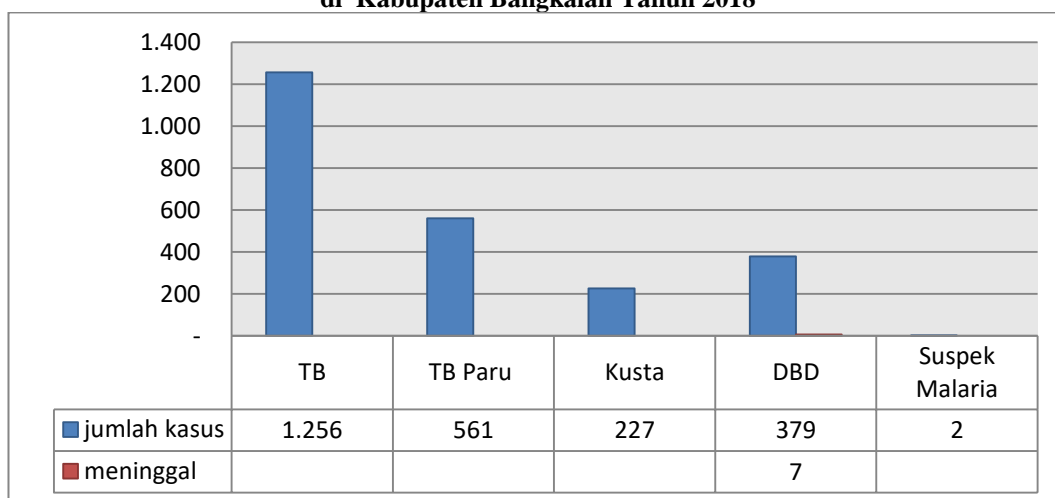
**Gambar 4.4 Jumlah Masyarakat terkena Pneumonia dan Diare di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2019

Penyakit Diare pada tahun 2018 di Kabupaten Bangkalan sangat tinggi yaitu sebesar 49.752 orang yang terkena diare, sementara masyarakat yang terkena penyakit Pneumonia sebanyak 5.233 orang. Jumlah masyarakat kaum perempuan yang terkena Penyakit Pneumonia dan Diare lebih tinggi dibandingkan laki-laki, artinya kaum perempuan rawan terkena penyakit menular jenis Pneumonia dan diare.

**Gambar 4.5 Jumlah Masyarakat terkena Penyakit di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018**

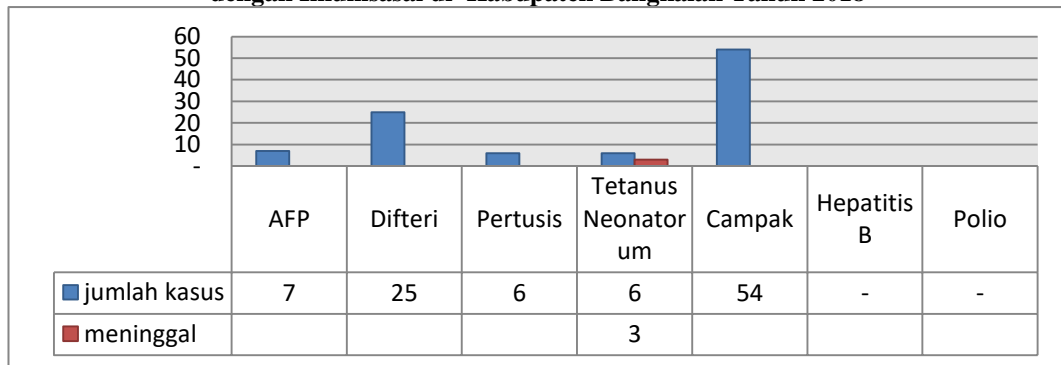


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2019

Jumlah penyakit yang terkene masayakat paling tinggi yaitu Tuberkulosis (TB) sebesar 1.256 orang, semenyata peyakit yang paling sedikit diderita masayarakat adalah Suspek malaria yatu hanya 2 orang yang terkena Suspek Malaria.

**b. Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)**

**Gambar 4.6 Jumlah Penyakit Menular yang dapat Dicegah dengan Imunisasai di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018**



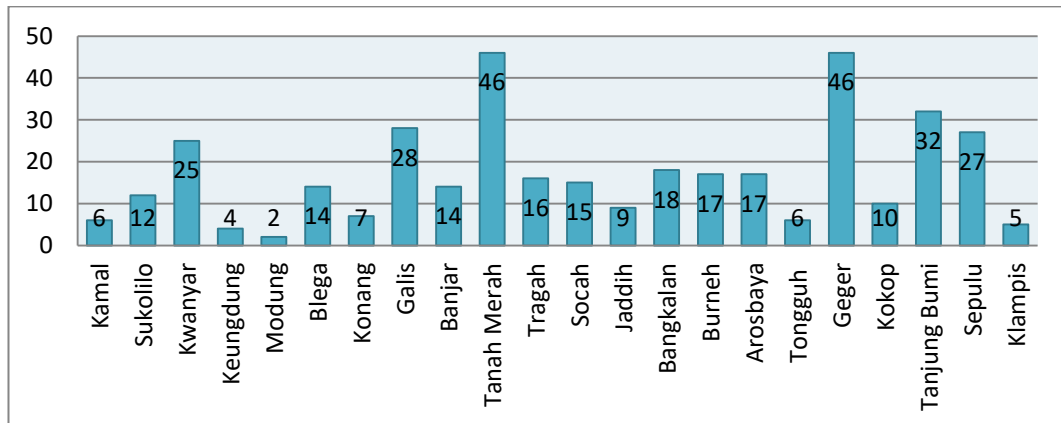
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2019

Jumlah penyakit menular yang dapat diobati dengan imunisasi (PD3I) yang paling besar adalah penyakit Campak yaitu sebesar 54 yang kedua adalah penyakit difteri, sementara penyakit menular yang tidak dapat diobati dengan imunisasi (PD3I) adalah penyekit hepatitis B dan polio.

**4.1.3. Angka Status Gizi Masyarakat**

**a. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)**

**Gambar 4.7 Berat Badan Lahir Rendah di Puskesmas Kabupaten Bangkalan Tahun 2018**

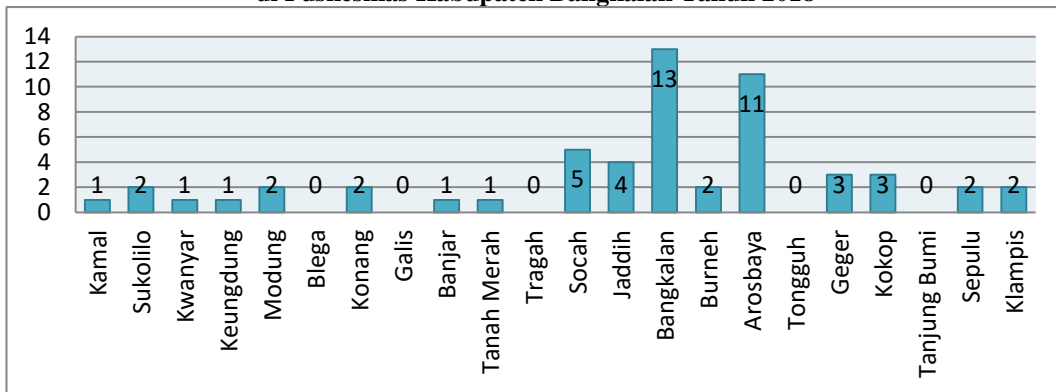


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2019

Jumlah berat badan lahir rendah (BBLR) terbesar terdapat di puskesmas tanah Merah dan puskesmas geger terdapat 46 bayi, dan bayi lahir dengan berat rendah (BBLR) terdapat di Puskesmas modung hanya sebesar 2 bayi. Secara total jumlah bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 376 bayi.

**b. Bayi Garis Merah (BGM) Baduta**

**Gambar 4.8 Bawah garis Merah (BGM) di Puskesmas Kabupaten Bangkalan Tahun 2018**

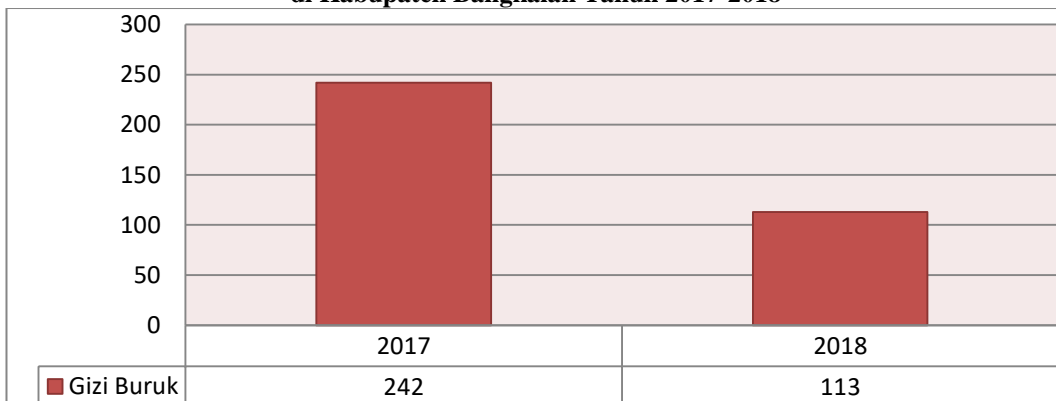


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2019

Jumlah BGM baduta di Kabupaten Bangkalan sebanyak 54 baduta, puskesmas yang paling banyak jumlah BGM-nya yaitu puskesmas Kecamatan Bangkalan sebesar 13 baduta yang kedua puskesmas Arosbaya sebanyak 11 baduta . Sementara terdapat 5 puskesmas yang tidak ada BGM baduta yaitu puskesmas Blega, Galis, Tragah, Tongguh dan tanjung Bumi.

**c. Balita Gizi Buruk**

**Gambar 4.9 Jumlah balita Gizi Buruk di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2018**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2019

Jumlah Gizi buruk di tahun 2018 sebanyak 113 balita hal jumlah tersebut lebih rendah dibanding tahun 2017 sebesar 242, artinya jumlah balita gizi buruk mengalami penurunan sebesar 129 balita. Jumlah gizi buruk di kabupaten bangkalan masih tinggi hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menyadari pentingnya zat gizi yang ada dalam makanan. Masyarakat menganggap bahwa makanan yang dimakan hanya cukup untuk mengenyangkan saja ytidak memperhatikan zat gizi yang dikandung.

#### 4.1.4. Fasilitas Kesehatan

Peningkatan kesehatan yang ingin diwujudkan pemerintah harus sesuai dengan upaya penyediaan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk fasilitas kesehatan yang ada. Fasilitas kesehatan tersebut akan membantu pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan, selain itu fasilitas tersebut harus dapat di jangkau oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan yang ada atau pun yang berada di pelosok daerah. Rumah sakit Kabupaten Bangkalan ada 2 unit, kurangnya jumlah rumah sakit di Kabupaten Bangkalan mengharuskan fasilitas penunjang kesehatan lain yaitu puskesmas untuk memudahkan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan di daerah pelosok. Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 tetap yaitu 22 unit, sedang puskesmas pembantu di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan menjadi 69 unit puskesmas pembantu.

Fasilitas penunjang kesehatan lainnya selain puskesmas dan puskesmas pembantu adalah puskesmas keliling yang berjumlah 24 unit, dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan pemerintah dapat lebih mudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan peningkatan kesehatan. Peningkatan fasilitas ini digunakan untuk mengimbangi jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, namun perlu ada peningkatan kesehatan terus menerus setiap tahunnya untuk mengimbangi lonjakan penduduk juga peningkatan status kesehatan masyarakat.

Selain sarana kesehatan yang memadai, juga harus diimbangi dengan tenaga kesehatan yang memadai pula. Tercatat pada tahun 2018 jumlah tenaga medis di Kabupaten Bangkalan mencapai 71 orang dan tenaga perawat mencapai



876 orang sedangkan jumlah bidan di Kabupaten Bangkalan sebesar 633 orang. Semua tenaga kesehatan tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

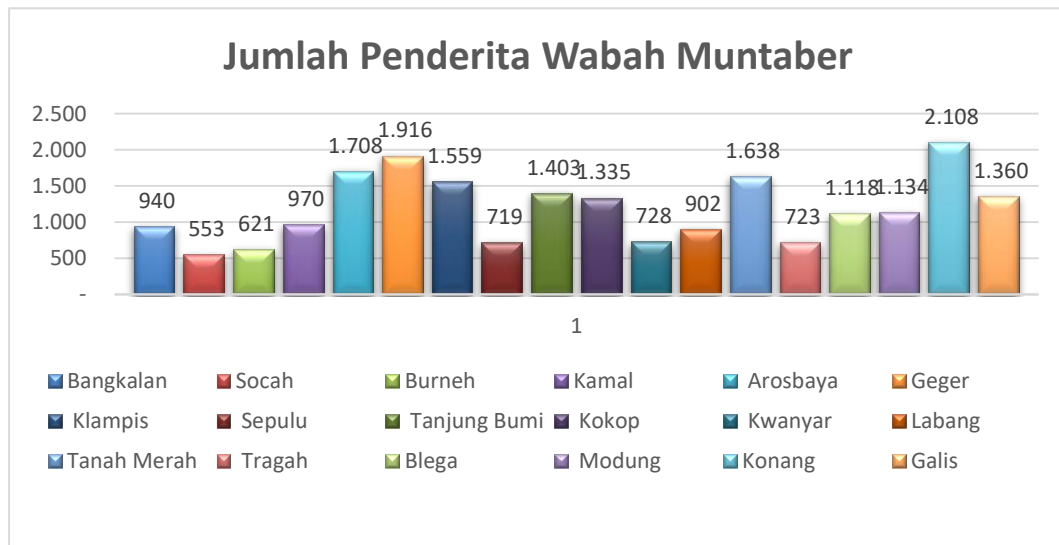
Tenaga medis yang terdata ditahun 2018 pun dari data mencatat di Kabupaten Bangkalan memiliki 88 orang Dokter Umum dan juga 62 orang Dokter Spesialis. Selain itu dari data dalam angka tercatat jumlah tenaga keperawatan yang ada di Kabupaten Bangkalan yaitu 876 orang Bidan dan 618 perawat yang ada di puskesmas sedangkan jumlah bidan dan perawat yang ada dirumah sakit yaitu 156 orag bidan dan 284 orang perawat.

**Tabel 4.1 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018**

No	Fasilitas Kehehatan	Pemilik		Jumlah
		Pemda Bangkalan	Swasta	
<b>A Rumah Sakit</b>				
1	Rumah Sakit Umum	1	2	3
2	Rumah Sakit Khusus		3	3
<b>Puskesmas dan Jaringanya</b>				
1	Puskesmas rawat Inap	22		22
2	Non Rawat Inap	0		0
3	Keliling	41		41
4	Pembantu	67		67
<b>B Sarana pelayanan Lainnya</b>				
1	Rumah Bersalin		1	1
2	Balai Pengobatan/Klinik		6	6
3	Praktek Dokter Bersama		0	-
4	Praktek Dokter Perorangan		38	38
5	Praktik Pengobatan Tradisional		881	881
6	Bank Darah Rumah Sakit	1		1
7	Unit Transfusi Darah	1		1
<b>C Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian</b>				
1	Industri Farmasi		0	-
2	Industri Obat Tradisional		0	-
3	Usaha Kecil Obat Tradisional		4	4
4	Produksi Alat Kesehatan		0	-
5	Pedagang Besar farmasi		0	-
6	Apotek		63	63
7	Toko Obat		4	4
8	Penyalur Alat kesehatan		0	-

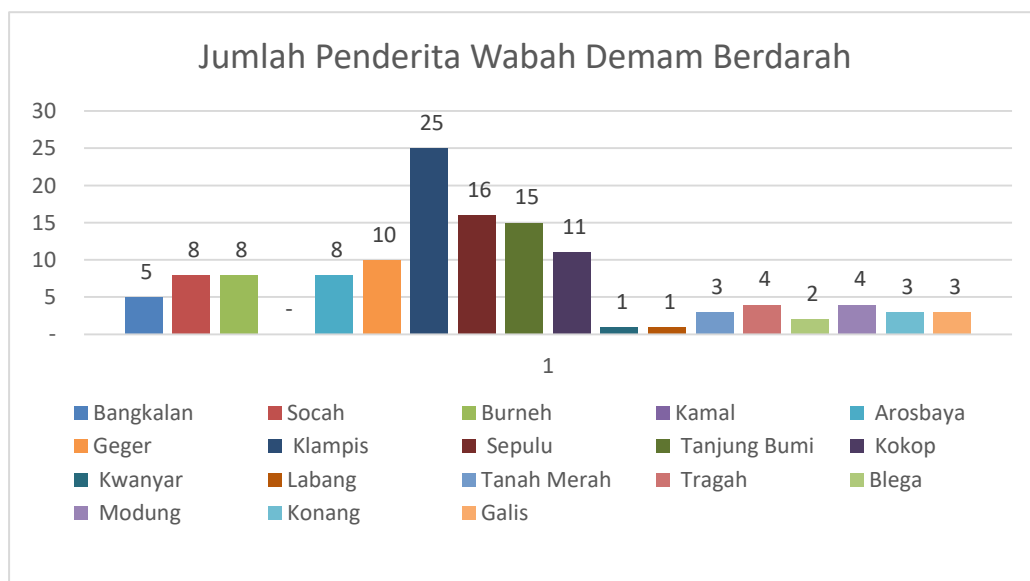
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2019

### 4.1.5 Jumlah Penderita Muntaber



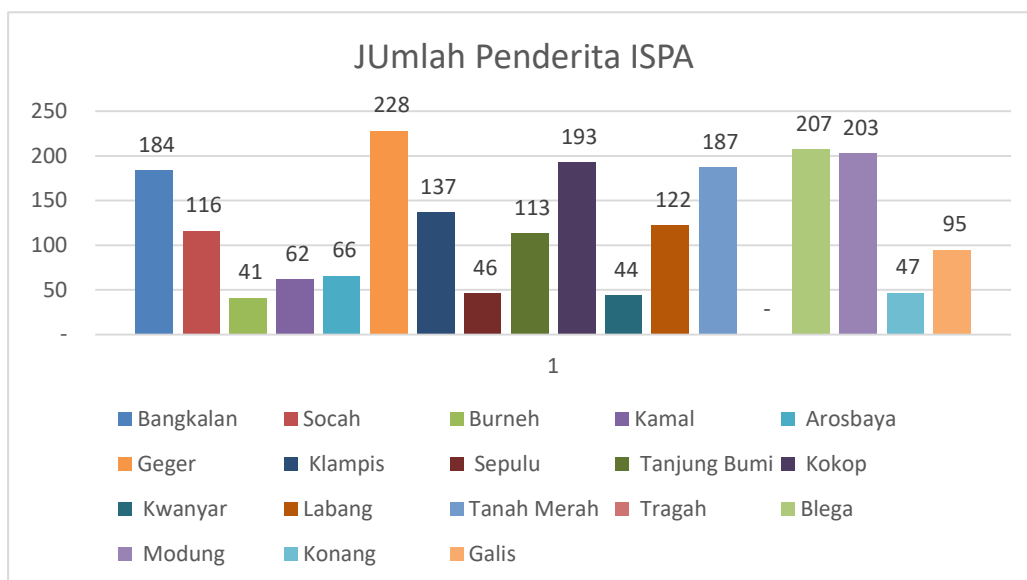
Jumlah Penderita Muntaber tertinggi berada di Kecamatan Konang 2.108 , terendah Berada di Kecamatan Socah 553.

### 4.1.6 Jumlah Penderita Demam Berdarah



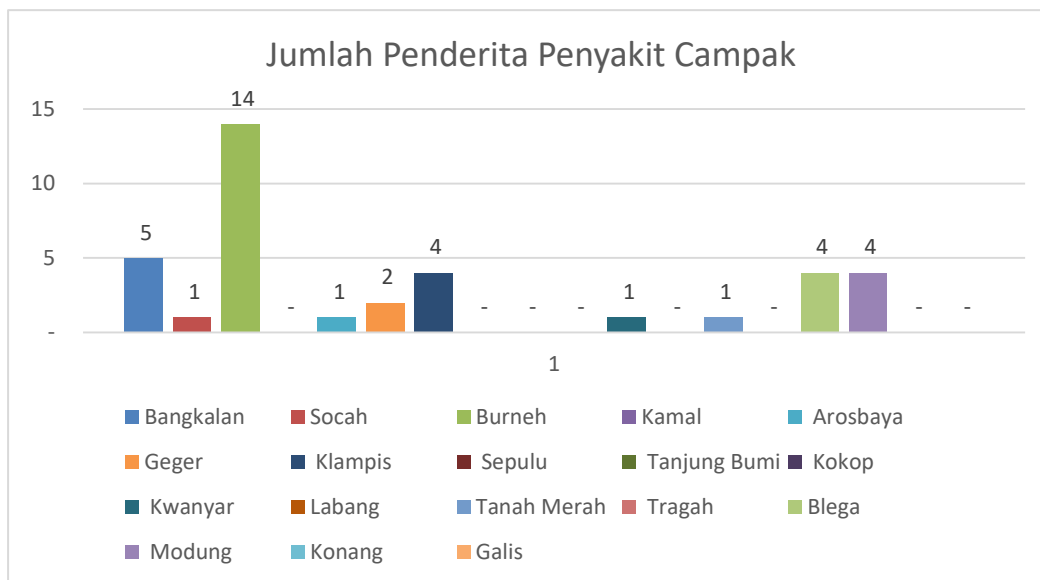
Jumlah Penderita Demam Berdarah tertinggi berada di Kecamatan Klampus 25 Orang , terendah Berada di Kecamatan Kwanyar 1 Orang.

#### 4.1.7 Jumlah Penderita ISPA



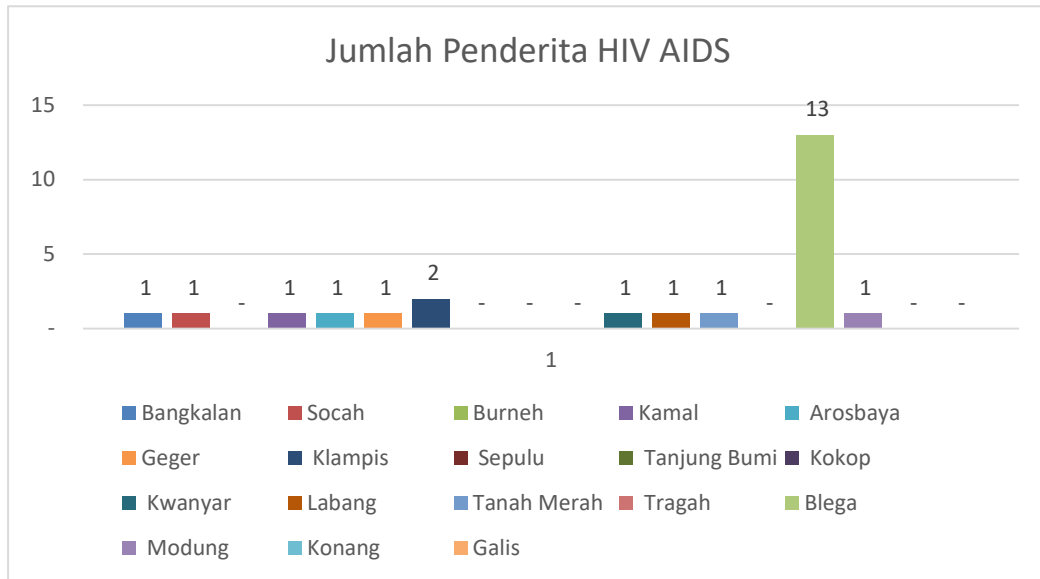
Jumlah Penderita ISPA Berdarah tertinggi berada di Kecamatan Geger 238 Orang, terendah Berada di Kecamatan Burneh 41 Orang.

#### 4.1.8 Jumlah Penderita Campak



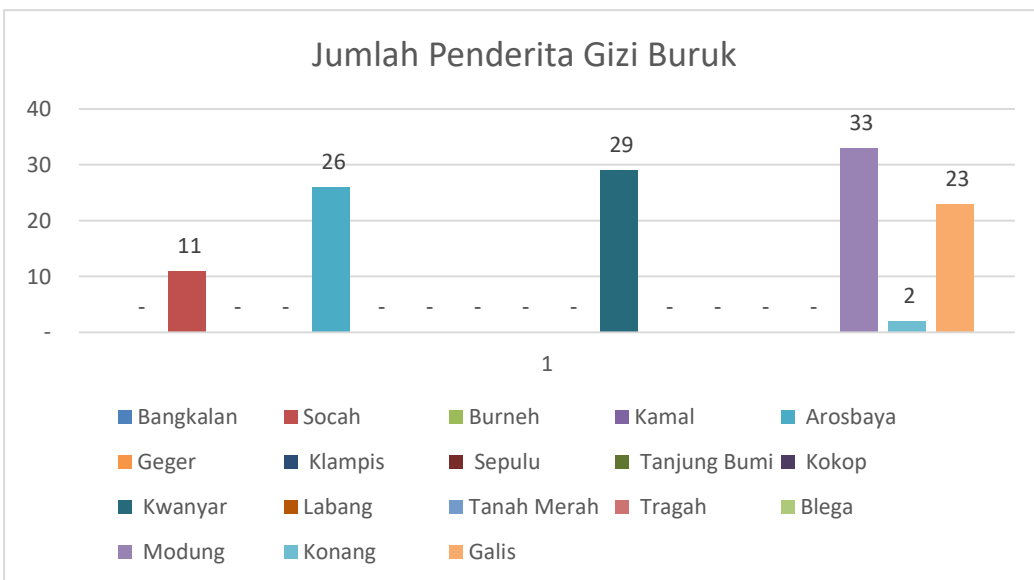
Jumlah Penderita Campak tertinggi berada di Kecamatan Burneh 14 Orang , Sementara di Kecamatan lain tidak terjangkau yaitu Berada di Kamal, Tanjung Bumi,Kokop, Labang dan Tragah Orang.

**4.1.9 Jumlah Penderita HIV/AIDS**



Jumlah Penderita HIV AIDS tertinggi berada di Kecamatan Blegah 13 Orang , Sementara di Kecamatan lain tidak terjangkiti yaitu Berada di Sepuluh, Tanjung Bumi,Kokop, Labang dan Tragah.

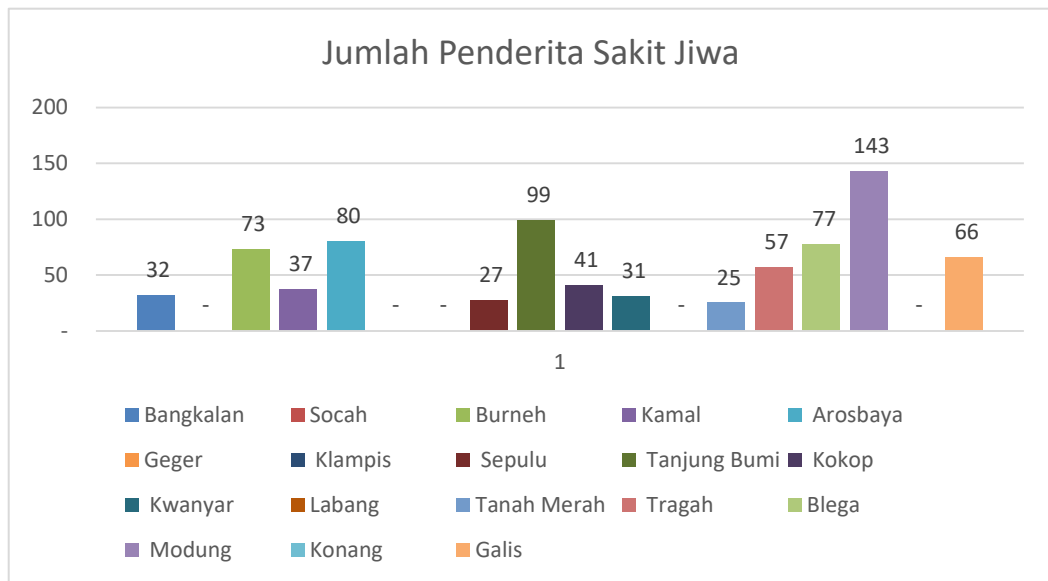
**4.1.10 Jumlah Penderita Gizi Buruk**



Jumlah Penderita Gizi Buruk tertinggi berada di Kecamatan Modung 33 Orang , Sementara di Kecamatan lain tidak ditemukan Penderita Gizi Buruk Seperti di Kecamatan Berada di Burneh, Kamal, Klampis, Sepuluh, Tanjung Bumi,Kokop, Labang Tanah Merah, Blegah danTragah.

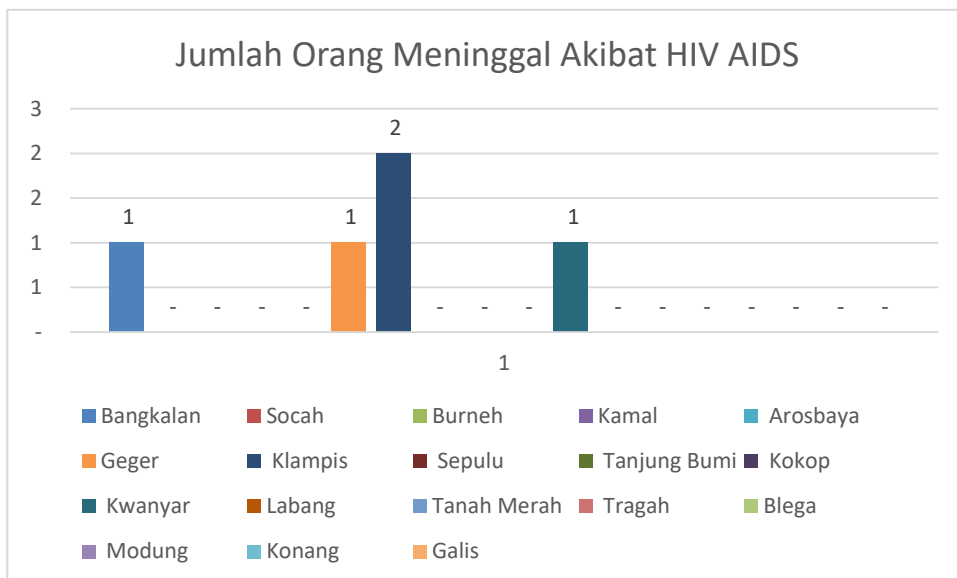


**4.1.11 Jumlah Penderita Sakit Jiwa**



Jumlah Penderita Sakit Jiwa tertinggi berada di Kecamatan Modung 143 Orang , Sementara di Kecamatan lain tidak ditemukan Penderita Sakit Jiwa Seperti di Kecamatan Geger, Klampi Dan Labang.

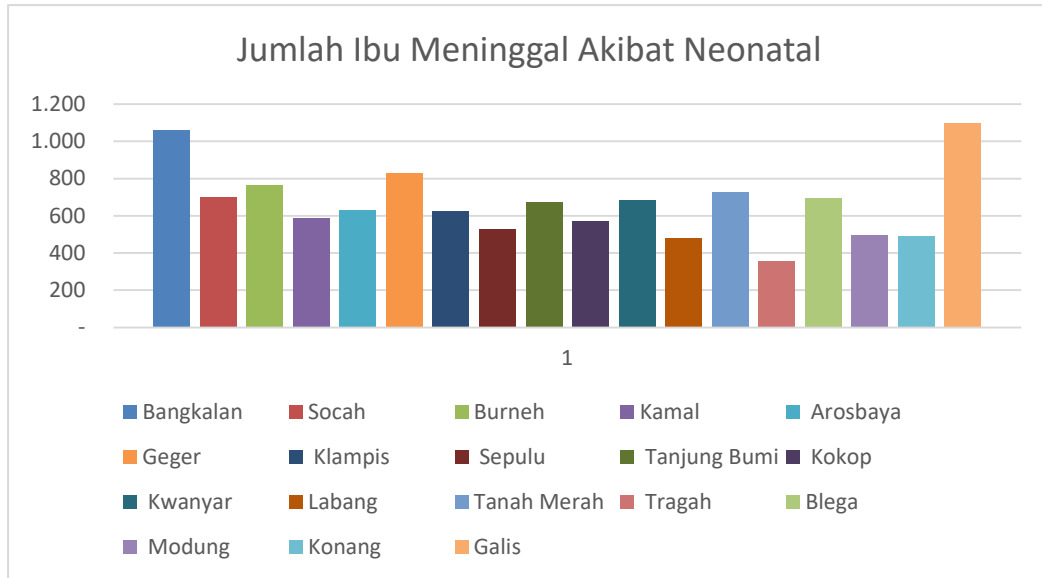
**4.1.12 Jumlah Orang Meninggal Akibat HIV AIDS**



Jumlah Orang Meninggal Akibat HIV AIDS Penderita Sakit Jiwa tertinggi berada di Kecamatan Klampis 2 Orang , Sementara di Kecamatan lain tidak ditemukan Orang Meninggal Akibat HIV AIDS Seperti di Kecamatan Socah,

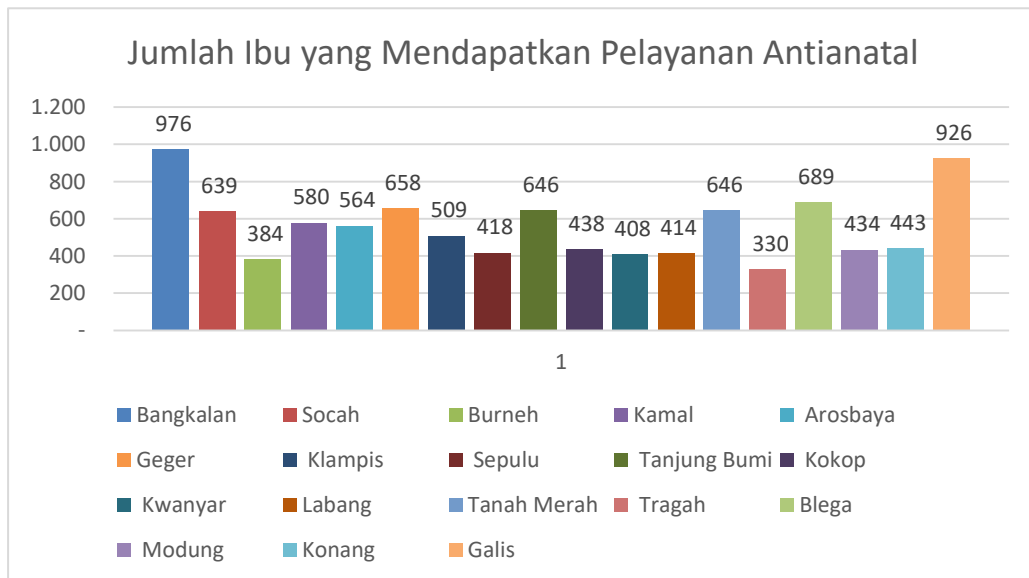
Burneh, Kamal, Arosbaya, Sepuluh, Tanjung Bumi dan Kokop, Labang Tanah Merah, Tragah, Blega, Modung, Konang dan Galis

**4.1.13 Jumlah Ibu Yang Meninggal Mengalami Neonatal**



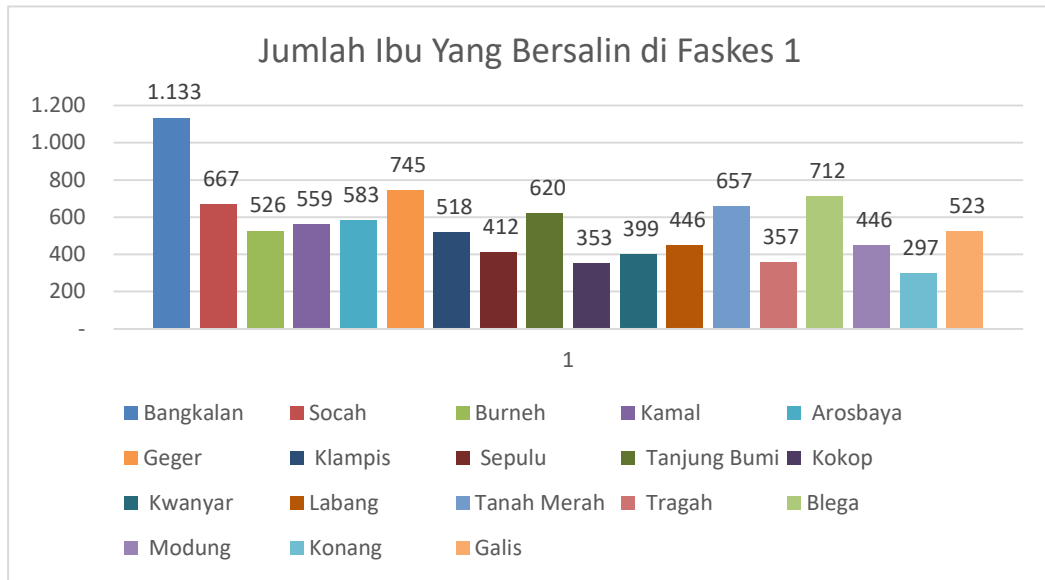
Jumlah Ibu Meninggal Akibat Neonatal tertinggi berada di Kecamatan Galis Berjumlah 1.098 Orang, Sementara di Kecamatan lain Terendah Berada di Kecamatan Tragah 359 Orang

**4.1.14 Jumlah Ibu Yang Meninggal Saat Antenatal**



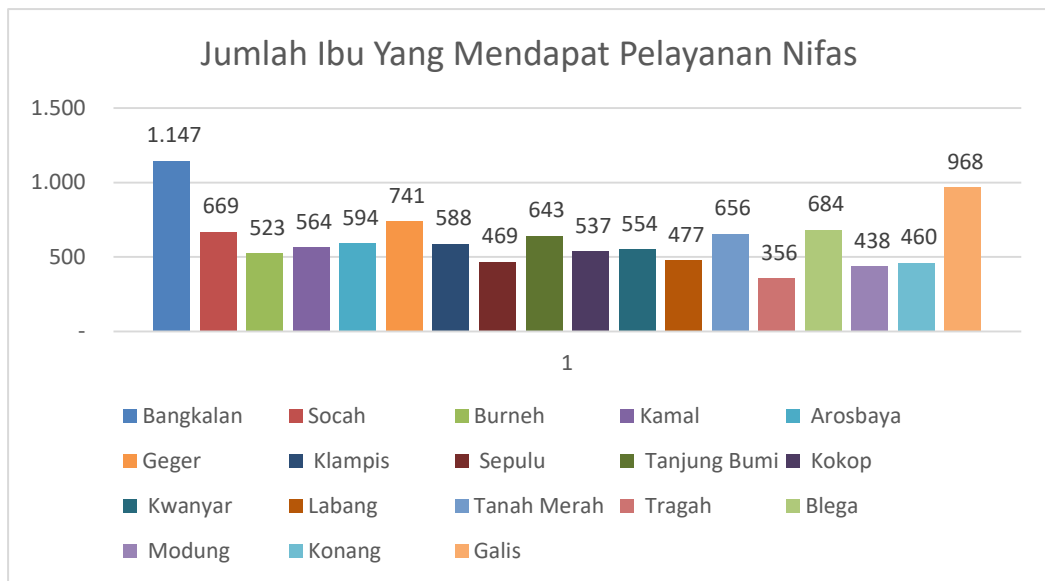
Jumlah Ibu Meninggal Mendapatkan Pelayanan Antenatal tertinggi berada di Kecamatan Bangkalan 976 Orang , Sementara di Kecamatan lain Terendah Berada di Kecamatan Modung 330 Orang

**4.1.15 Jumlah Ibu Yang Bersalin di Faskes 1**



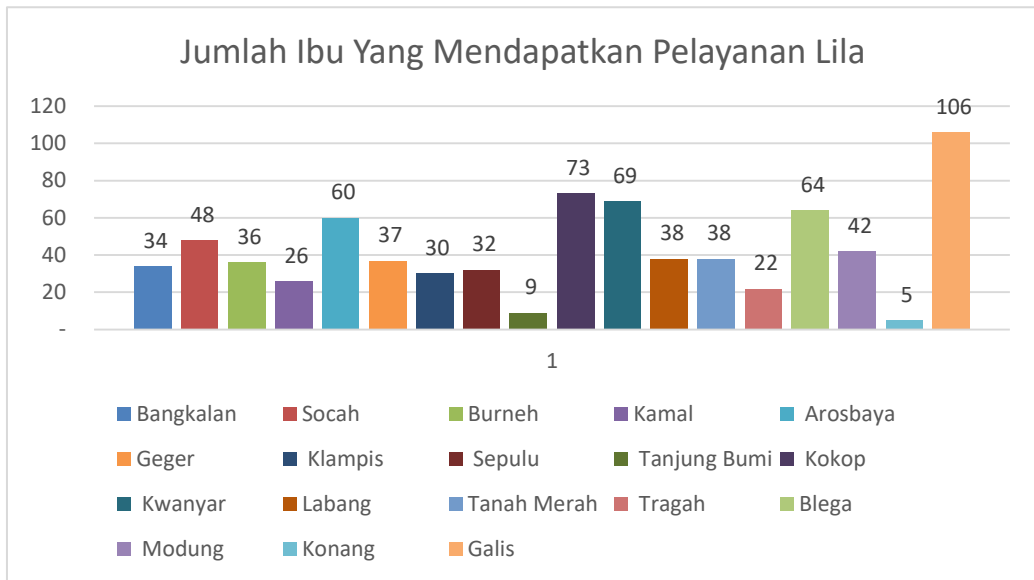
Jumlah Ibu Meninggal Mendapatkan Pelayanan Faskes 1 tertinggi berada di Kecamatan Bangkalan 1.133 Orang , Sementara di Kecamatan lain Terendah Berada di Kecamatan Konang 297 Orang.

**4.1.16 Jumlah Ibu Yang Mendapat Pelayanan Nifas**



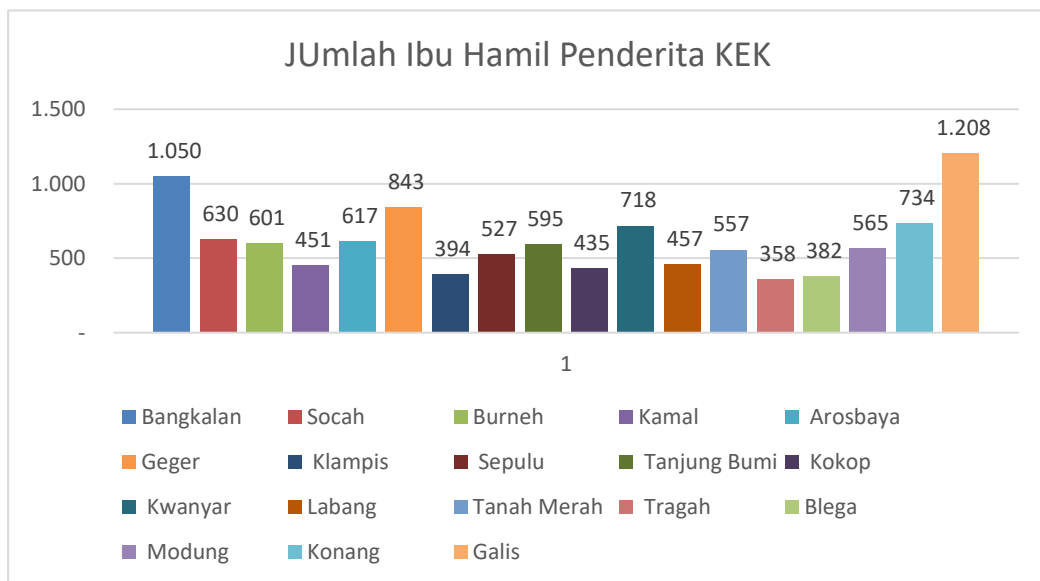
Jumlah Ibu Meninggal Mendapatkan Pelayanan Nifas tertinggi berada di Kecamatan Bangkalan 1.147 Orang, Sementara di Kecamatan lain Terendah Berada di Kecamatan Tragah 356 Orang.

**4.1.17 Jumlah Ibu Yang Mendapat Pelayan Lila**



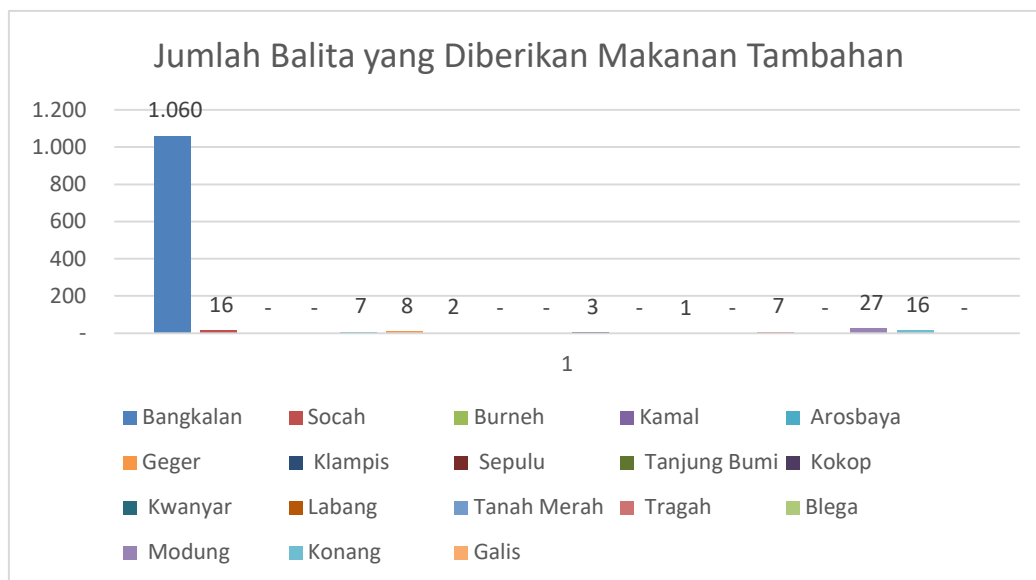
Jumlah Ibu Meninggal Mendapatkan Pelayanan Lila < 23,5 tertinggi berada di Kecamatan Galis 105 Orang , Sementara di Kecamatan lain Terendah Berada di Kecamatan Konang 5 Orang.

**4.1.18 Jumlah Ibu Yang Mengalami KEK**



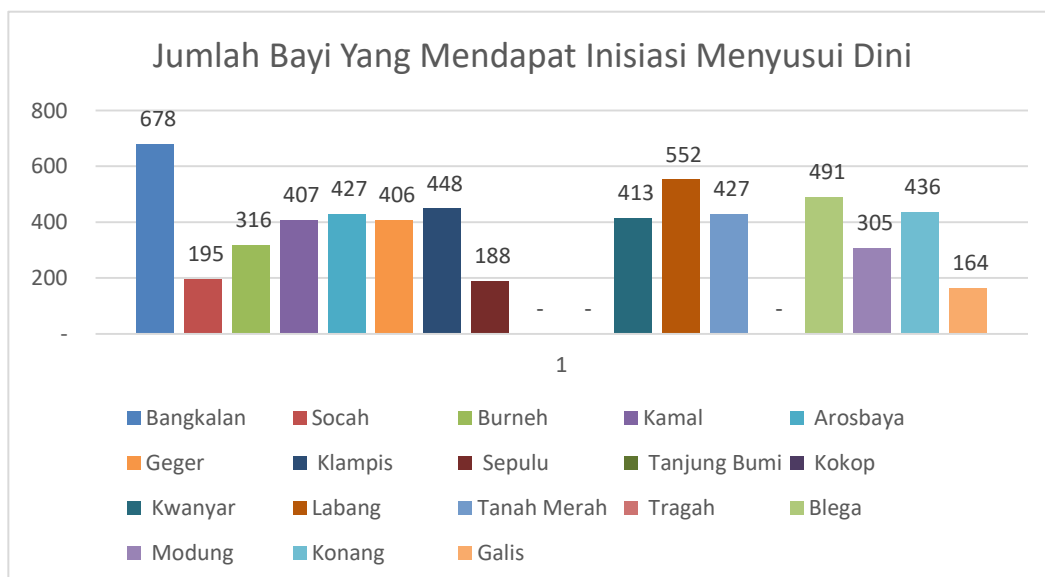
Jumlah Ibu Meninggal Penderita KEK tertinggi berada di Kecamatan Galis 1.208 Orang , Sementara di Kecamatan lain Terendah Berada di Kecamatan Tragah 358 Orang.

#### 4.1.19 Jumlah Balita Yang Diberi Makanan Tambahan



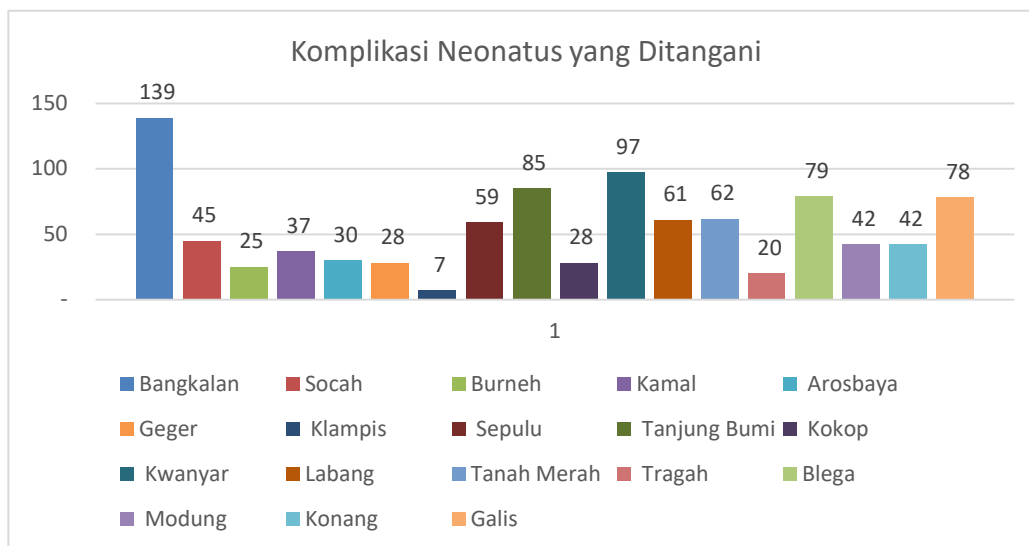
Jumlah Balita Yang Mendapat Makanan Tambahan Berada di Bangkalan tertinggi berada di Kecamatan Bangkalan 1.060 Orang , Sementara di Kecamatan lain tidak Mendapatkan Jatah Pemberian Makanan Tambahan Berada di Kecamatan Kamal, Arosbaya, Sepuluh, Tanjung Bumi, Tanah merah, Blega.

#### 4.1.20 Jumlah Bayi Yang Mengalami Inisiasi Menyusui Dini



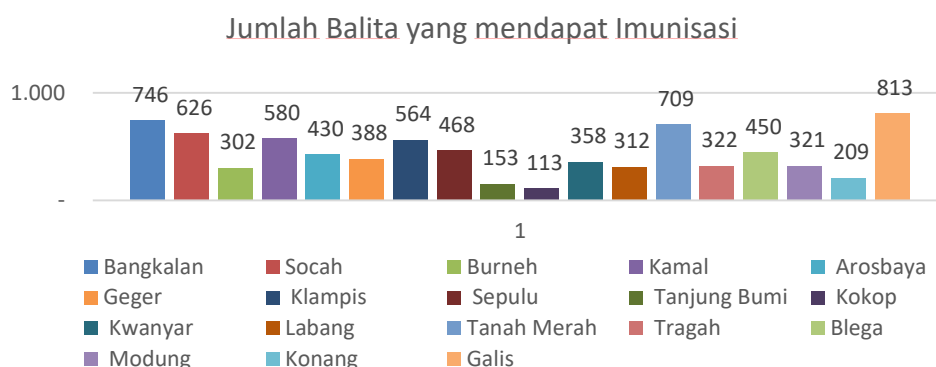
Jumlah Bayi Yang Mendapat Inisiasi Menyusui Dini Berada di Bangkalan tertinggi 678 Orang , Sementara di Kecamatan lain tidak Mendapatkan Jatah di Tanjung Bumi, dan Kokop.

#### 4.1.21 Komplikasi Neonatus Yang Ditangani



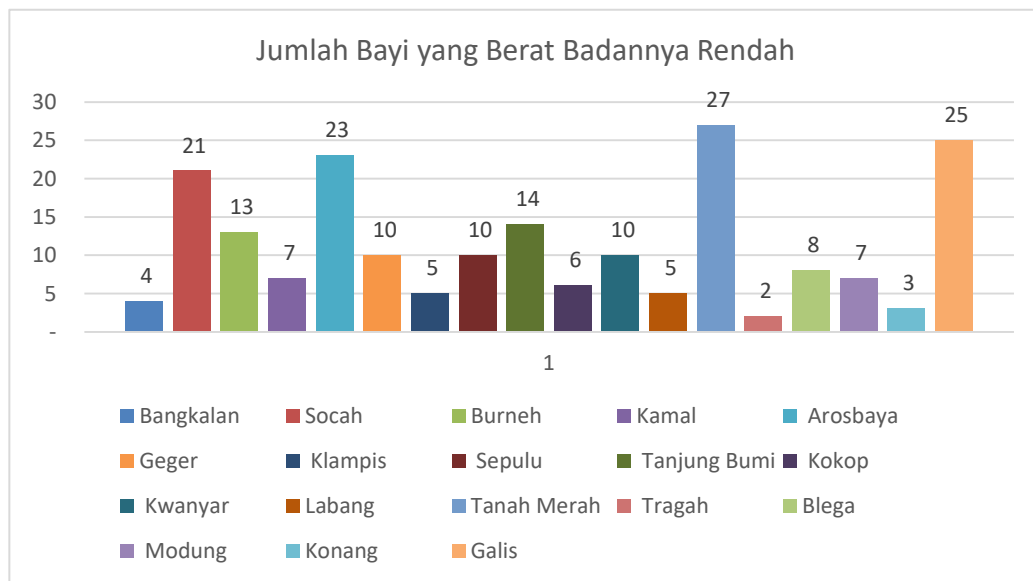
Jumlah Komplikasi Neonatus yang Ditangani Berada di Bangkalan tertinggi 139 Orang , Sementara di Kecamatan lain terendah Di Kecamatan Klampis Sebesar 7 Orang.

#### 4.1.22 Jumlah Balita Yang Mendapat Imunisasi



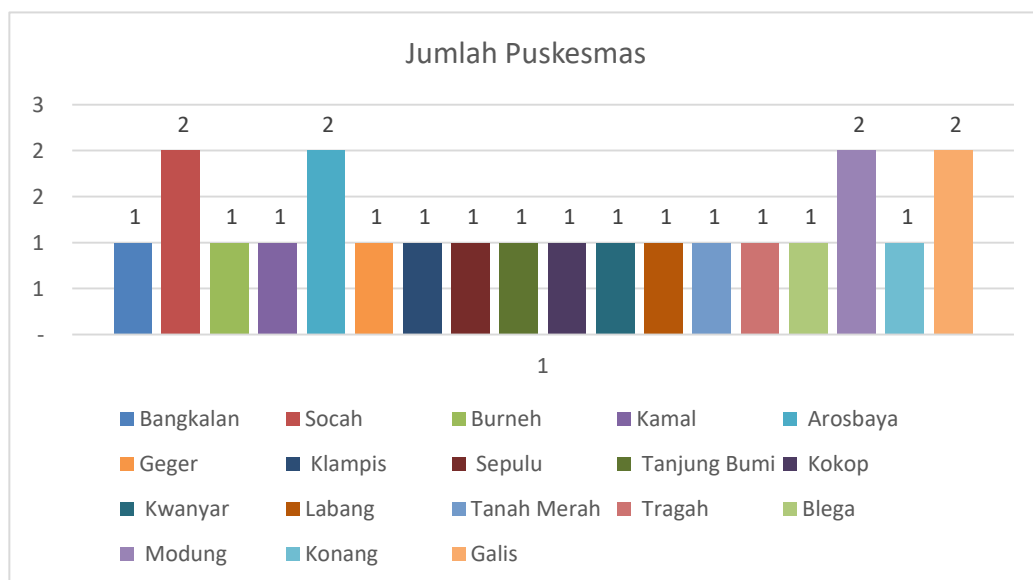
Jumlah Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Berada di Bangkalan tertinggi 746 Orang , Sementara di Kecamatan lain terendah Di Kecamatan Kokop Sebesar 113 Orang.

#### 4.1.23 Jumlah Balita Yang Berat Badanya Rendah



Jumlah Balita Yang Berat Badan Terendah Imunisasi Berada di Tanah Merah tertinggi 27 Orang , Sementara di Kecamatan lain terendah Di Kecamatan Trageh 2 Orang.

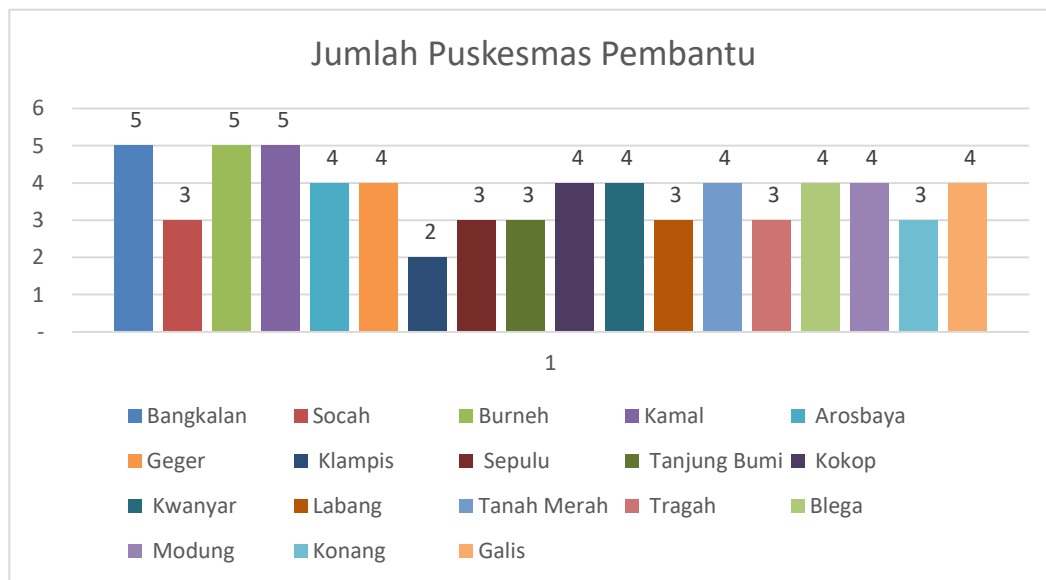
#### 4.1.24 Jumlah Puskesmas Yang Menyediakan Fasilitas Rawat Inap



Jumlah Puskesmas yang menyediakan Rawat Inap Berada di Tanah Socah, Arosbaya, Modung Dan Galis Masing terdapat 2 Orang dalam Setiap Bulannya, Sementara di Kecamatan lain Seperti di Kecamatan Burneh, Kamal, Bangkalan,

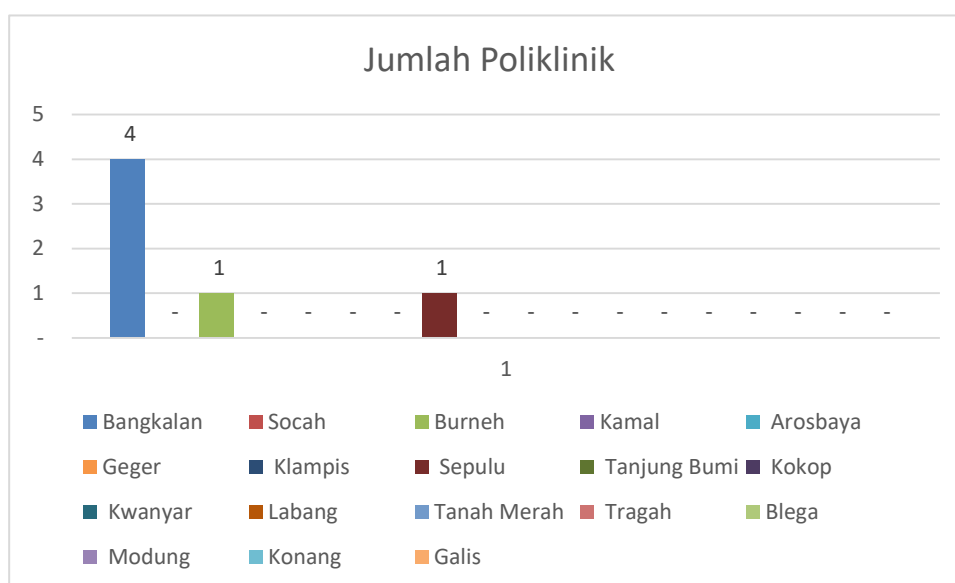
Geger, Klampis, Sepuluh, Tanjung Bumi, Kokop, TWannyar, Labang, Tanah Merah, Trageh, Blega dan Konang Masing Masing 1 orang.

#### 4.1.25 Jumlah Puskesmas Pembantu



Jumlah Puskesmas Pembantu Tertinggi di Kecamatan Bangkalan, Burneh, Dan Kamal, Masing-masing 5 buah Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Kalmpis Hanya 2 Puskesmas pembantu.

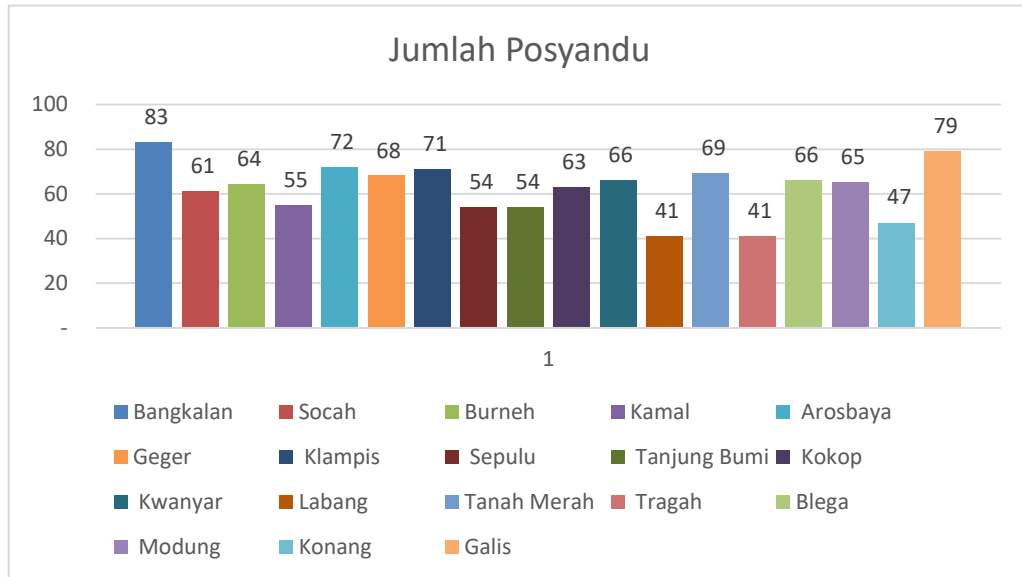
#### 4.1.26 Jumlah Poliklinik





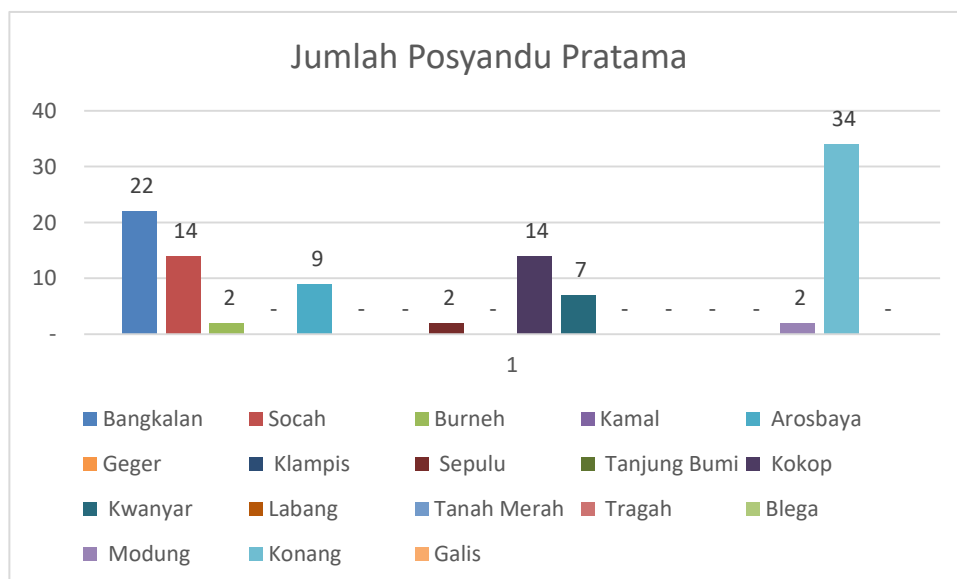
Jumlah Poliklinik Tertinggi di Kecamatan Bangkalan 4 Buah, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Burneh dan Sepulu Masing-masing 1

#### 4.1.27 Jumlah Posyandu Unit



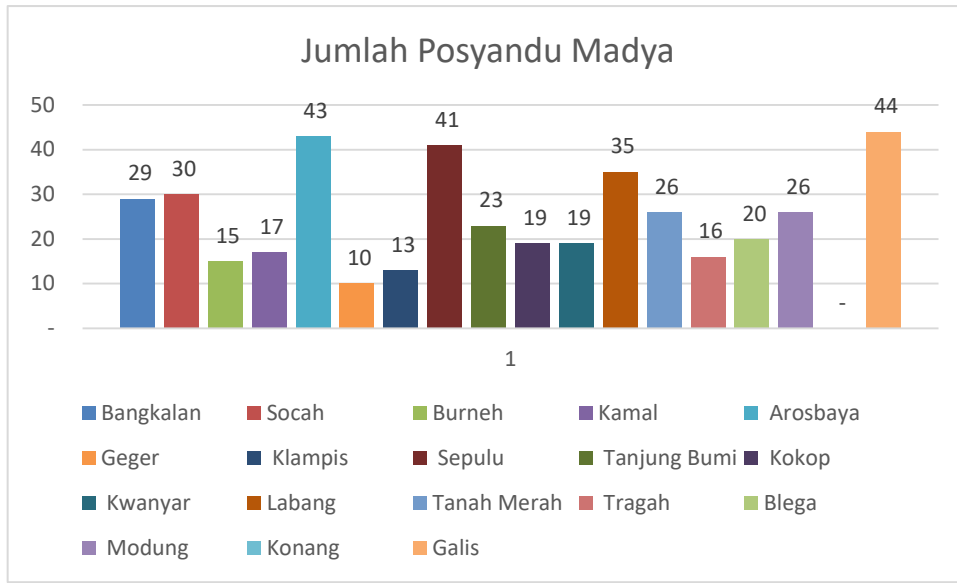
Jumlah Posyandu Unit Tertinggi di Kecamatan Bangkalan 83 Buah, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Labang dan Trageh Masing-masing 1 Buah.

#### 4.1.28 Jumlah Posyandu Pratama



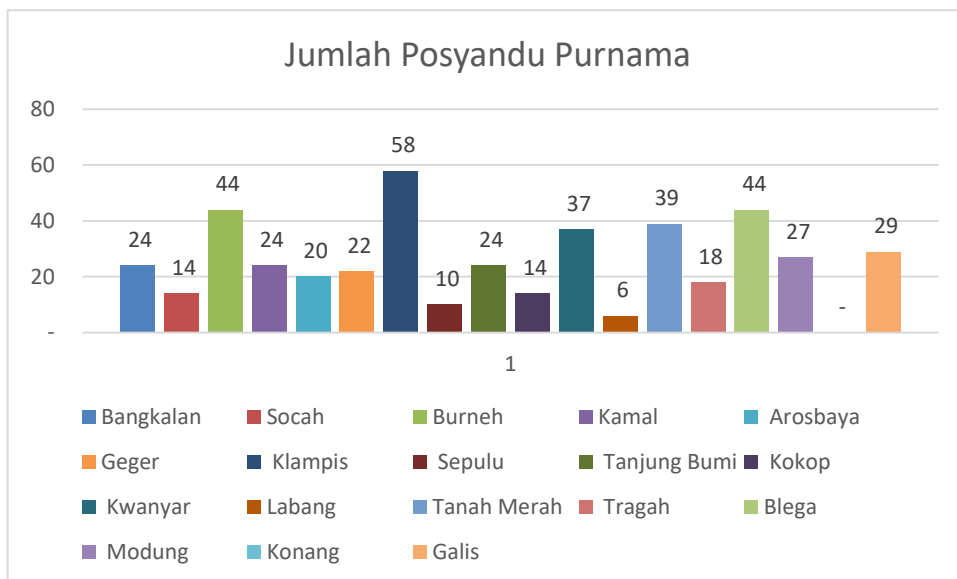
Jumlah Posyandu Pratama Tertinggi di Kecamatan Konang 34 Buah, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Burneh, Sepuluh dan Modung Masing-masing 2 Buah.

**4.1.29 Jumlah Posyandu Madya**



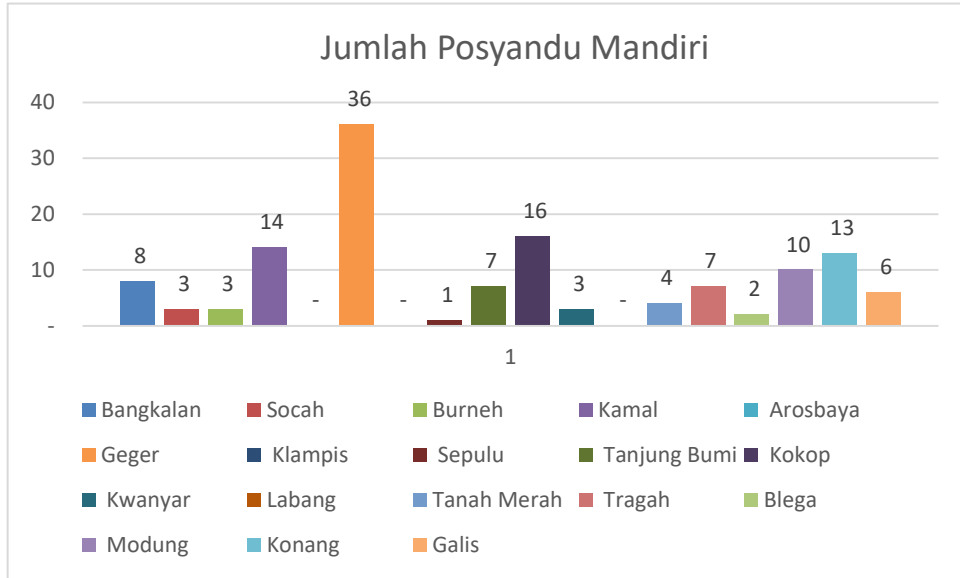
Jumlah Posyandu Madya Tertinggi di Kecamatan Galis 44 Buah, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Geger 10 Buah.

**4.1.30 Jumlah Posyandu Purnama**



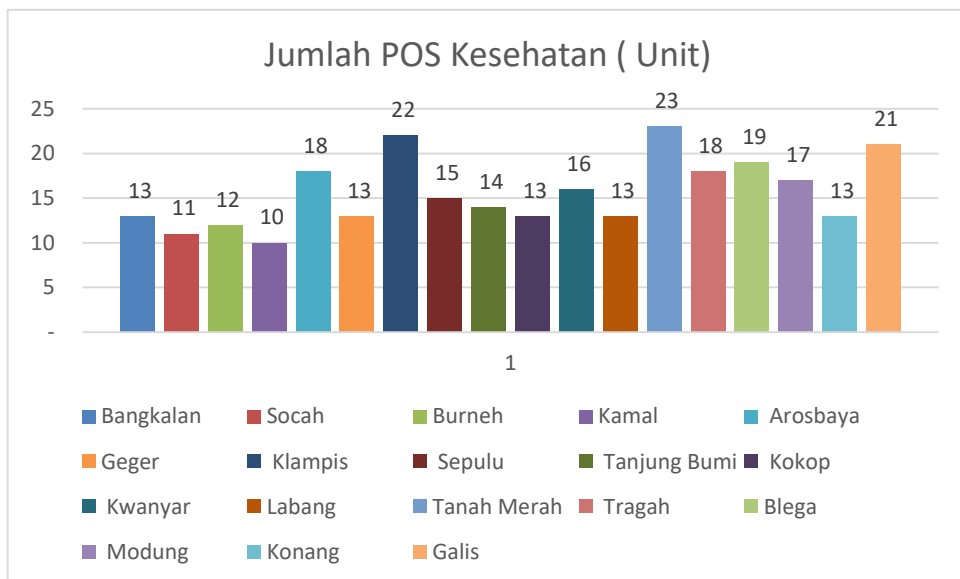
Jumlah Posyandu Purnama Tertinggi di Kecamatan Klampis 58 Buah, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Geger 6 Buah.

**4.1.31 Jumlah Posyandu Mandiri**



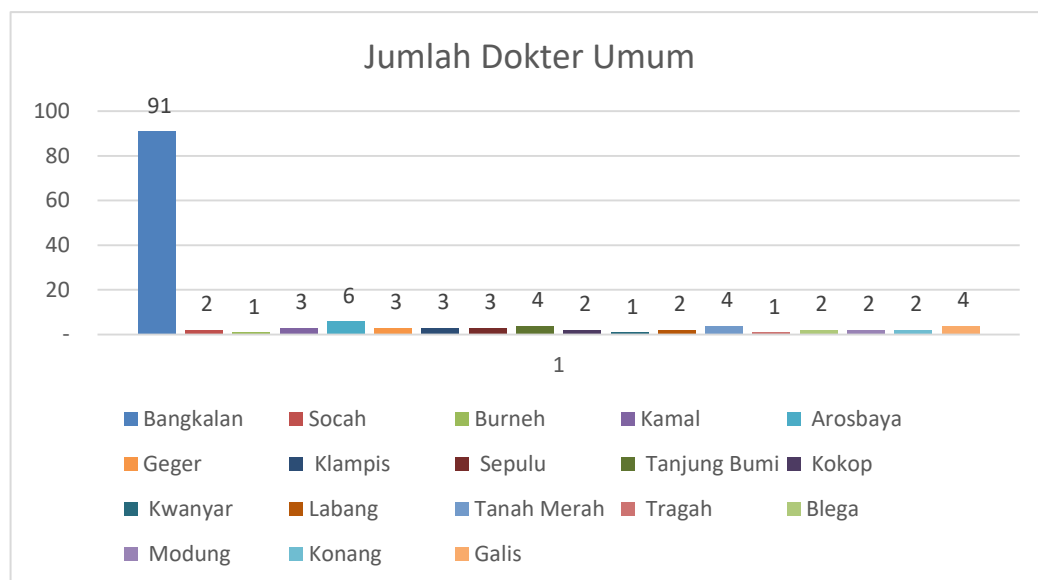
Jumlah Posyandu Mandiri Tertinggi di Kecamatan Klampis 38 Buah, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Sepuluh 1 buah , Bahkan Di Klampis tidak mempunyai Sama Sekali.

**4.1.32 Jumlah Pos Kesehatan**



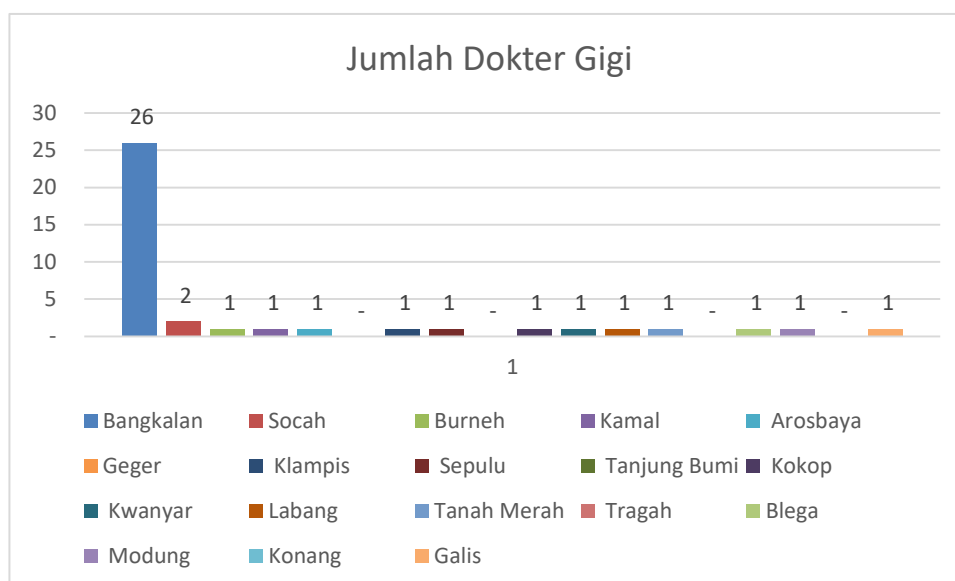
Jumlah Pos Kesehatan Unit Tertinggi di Kecamatan Tanah Merah 23 Buah, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Sepuluh Kamal 10 buah.

#### 4.1.33 Jumlah Dokter Umum



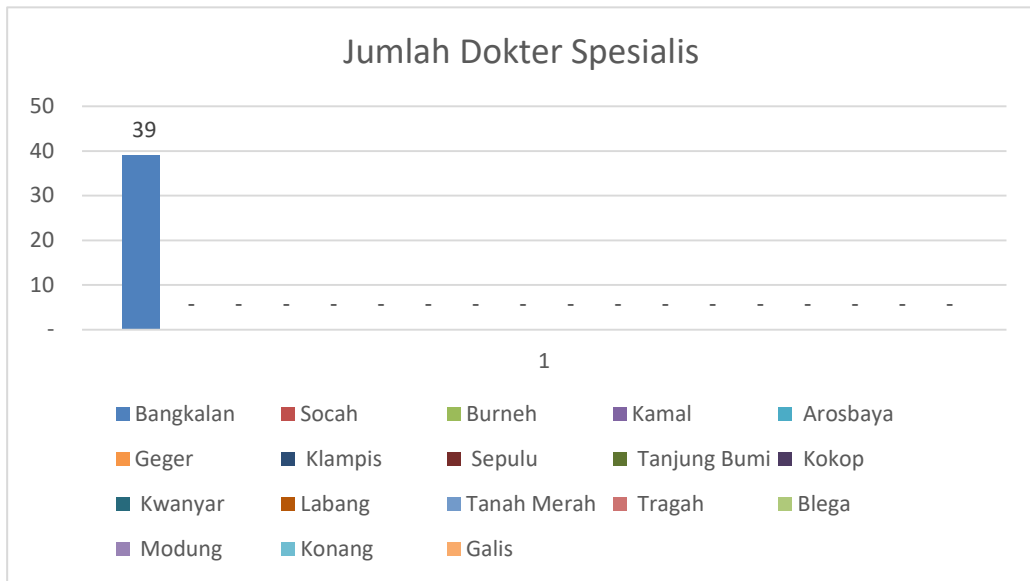
Jumlah Dokter umum Unit Tertinggi di Kecamatan Bangkalan 91 Buah, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Sepuluh Burneh, TWanyar, Tragah berjumlah hanya 1 orang.

#### 4.1.34 Jumlah Dokter Gigi



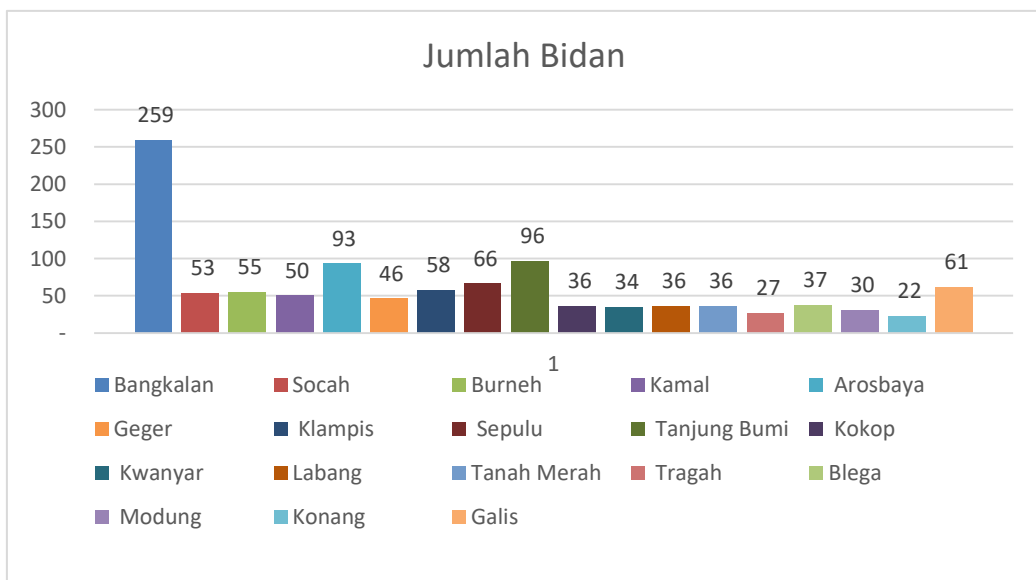
Jumlah Dokter Gigi Unit Tertinggi di Kecamatan Bangkalan 26 Buah, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Sepuluh Burneh, Kamal, Arosbaya, Klampis, Sepuluh, Kokop, TWanyar, Labang, Tanah Merah Blega, Modung dan Galis Hanya 1 Orang, Sedangkan di Kecamatan Geger, Tanjung Bumi dan Tragah sama sekali tidak ada.

**4.1.35 Jumlah Dokter Spesialis**



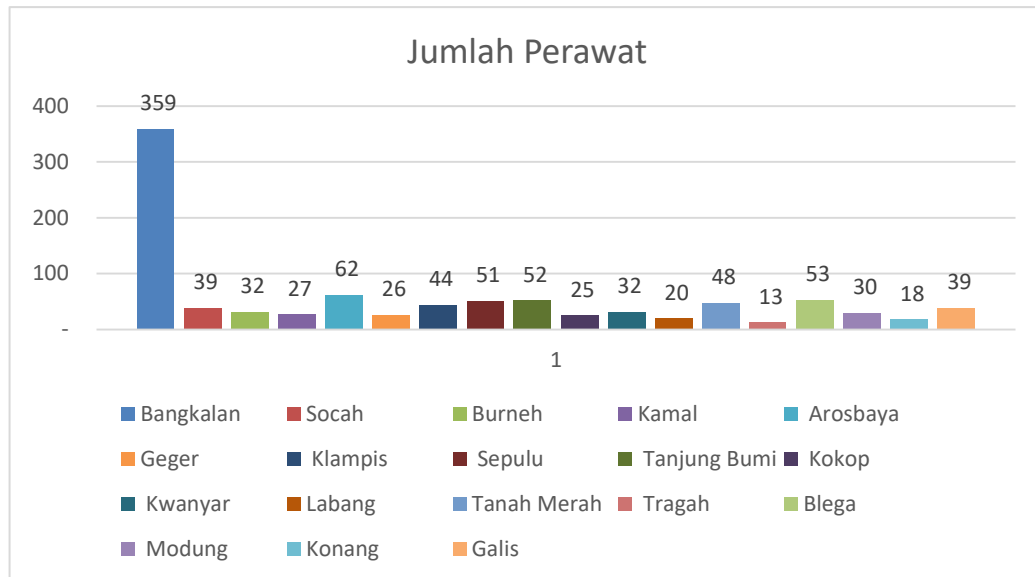
Jumlah Dokter spesialis Hanya Di kecamatan Bangkalan Berjumlah 39 Orang.

**4.1.36 Jumlah Bidan**



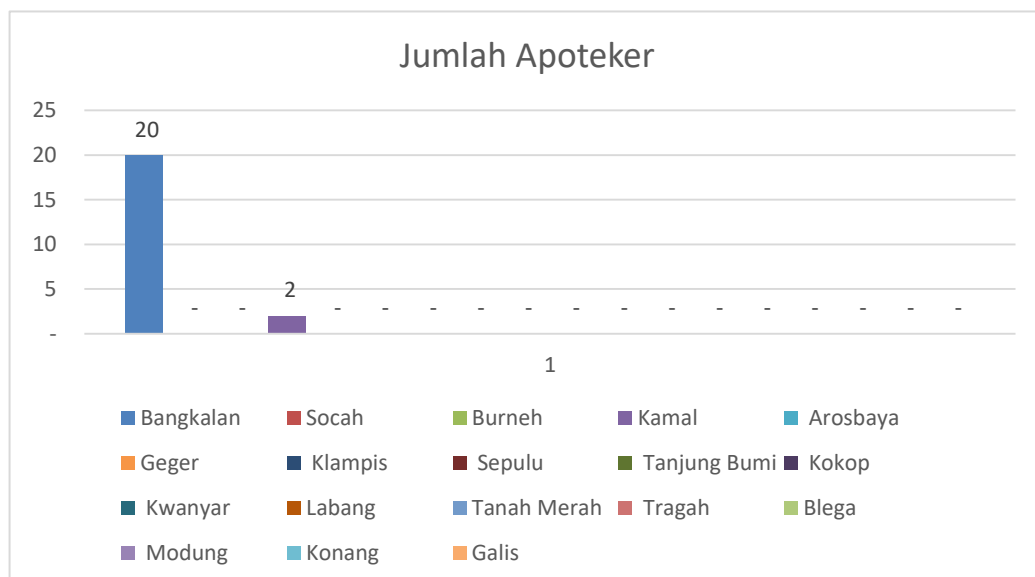
Jumlah Bidan Tertinggi di Kecamatan Bangkalan 259 Orang, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Konang Hanya 22 Orang.

#### 4.1.37 Jumlah Perawat



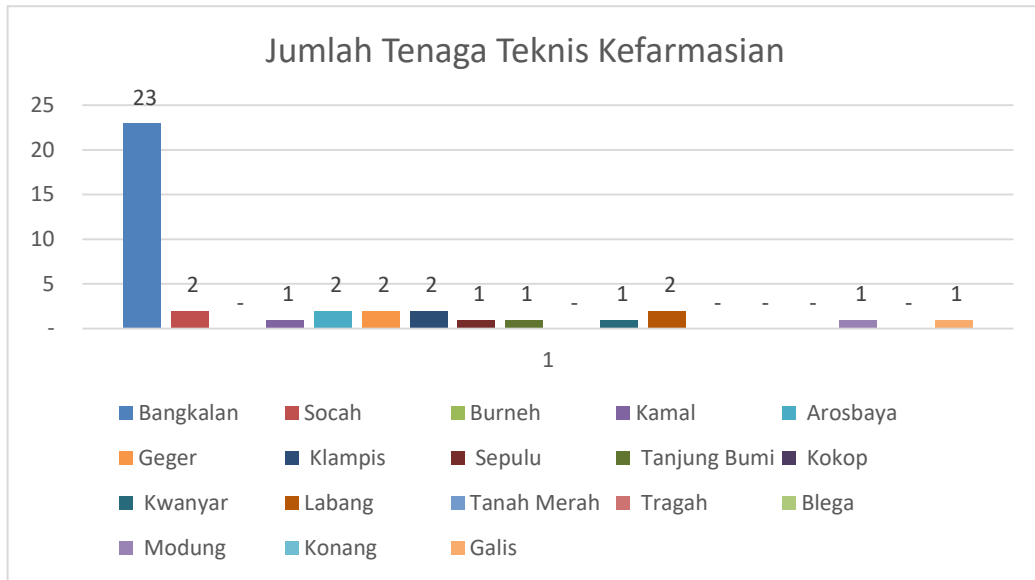
Jumlah Perawat Tertinggi di Kecamatan Bangkalan 359 Orang, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Tragah Hanya 13 Orang.

#### 4.1.38 Jumlah Apoteker



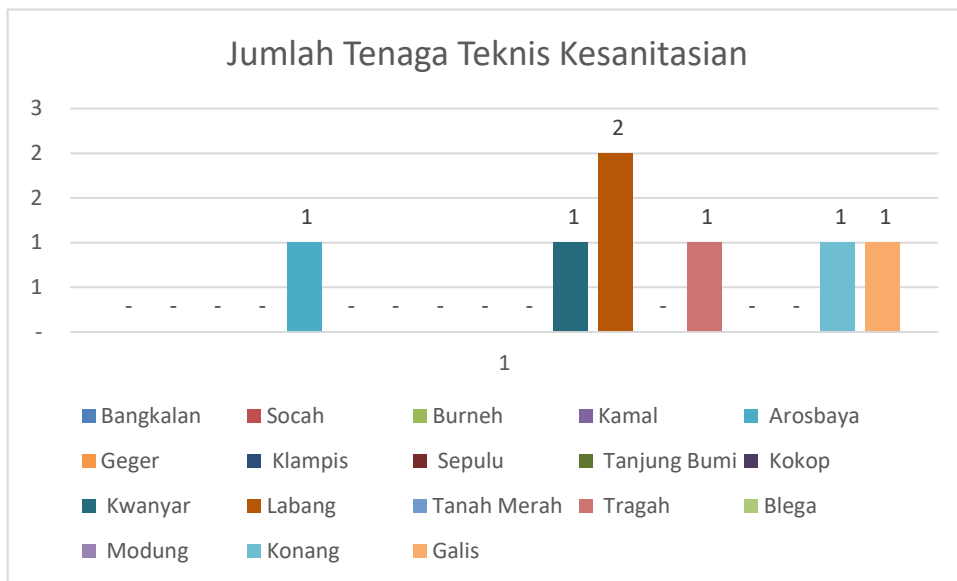
Jumlah Apoteker Tertinggi di Kecamatan Bangkalan 20 Orang, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Kamal 2 Orang, Bahkan Di 16 Kecamatan Lainnya ada Sama sekali.

**4.1.39 Jumlah Teknisi Kefarmasian**



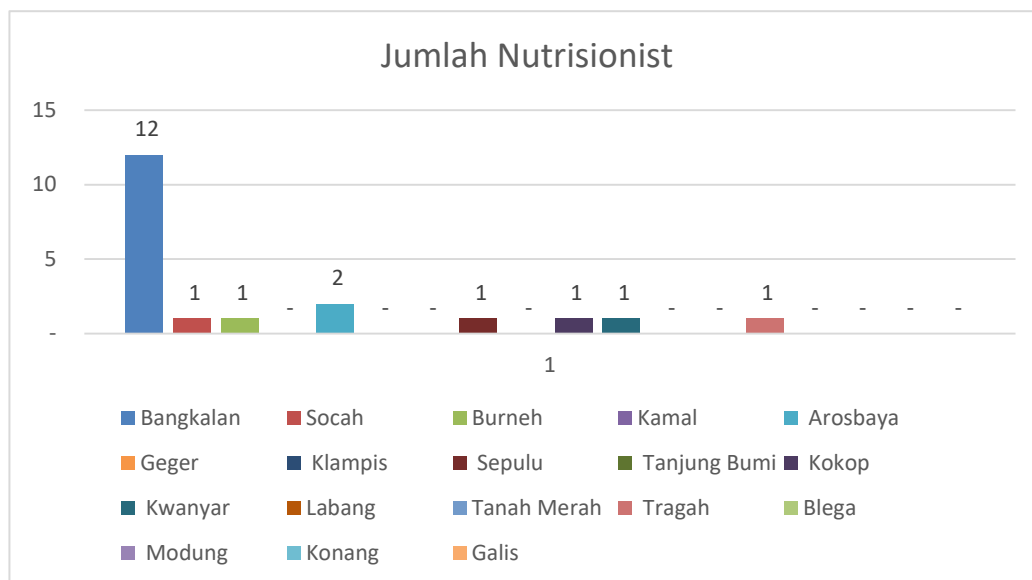
Jumlah Tenaga Kefarmasian Tertinggi di Kecamatan Bangkalan 23 Orang, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Kamal, Sepuluh, Tanjung Bumi, TWannyar, Modung dan galis 1 Orang.

**4.1.40 Jumlah Tenaga Teknis Kesanitiasan**



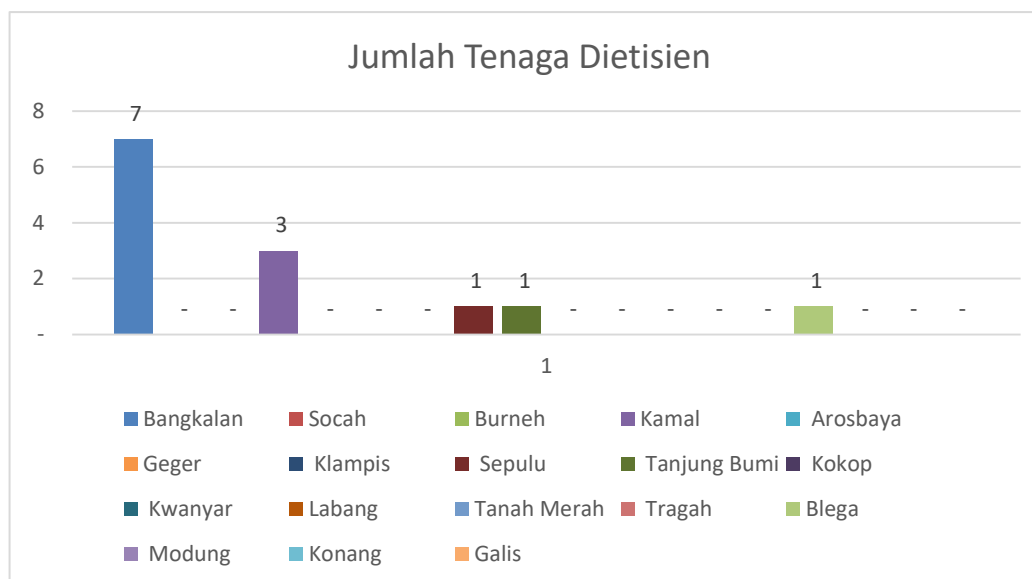
Jumlah Tenaga KeSanitasian Tertinggi di Kecamatan Labang 2 Orang, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Arosbaya, TWannyar, Tragah, Konang dan Galis 1 Orang, Sementara di 12 Kecamatan yang lain tidak ada.

#### 4.1.41 Jumlah Nutrisionist



Jumlah Tenaga Nutrisionist Tertinggi di Kecamatan Bangkalan 2 Orang, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Socah, Burneh, Arosbaya, Sepuluh, Kokop, TWannyar dan Trageh 1 Orang, Sementara di 8 Kecamatan yang lain tidak ada.

#### 4.1.42 Jumlah Tenaga Dietisien





Jumlah Tenaga Dietisien Tertinggi di Kecamatan Bangkalan 7 Orang, Sedangkan terendah Jumlah berada di Kecamatan Kamal 3 orang Sementara di Kecamatan lain seperti Sepuluh 1, Tanjung Bumi, dan Blega 1 orang Sedangkan di 13 Kecamatan yang lain tidak ada.

#### 4.2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 BAB II pasal 3 menjelaskan bahwa adanya penanaman modal di Jawa Timur bertujuan untuk a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No. 44 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2014-2025 terdapat tujuh arahan kegiatan penanaman modal di Indonesia, yaitu: 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal, 2) Persebaran Penanaman Modal, 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi, 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment), 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan atau Insentif Penanaman Modal, dan 7) Promosi Penanaman Modal. Ketujuh arah penanaman modal tersebut menjadi dasar kemana arah/tujuan penanaman modal baik penanaman modal di Kabupaten Bangkalan.

Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan investasi di Kabupaten Bangkalan dilihat dari kinerja investasi, jumlah investasi, penyerapan tenaga kerja dari investasi, dan pelayanan perizinan usaha di Kabupaten Bangkalan.

4.2.1. Kinerja Investasi

a. Kontribusi Investasi terhadap PDRB Kabupaten Bangkalan

Tabel 4.2 Nilai Investasi Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2019

Periode		Nilai Investasi
Tahun 2017	Januari	Rp. 2.390.000.000,-
	Februari	Rp. 13.539.362.324,-
	Maret	Rp. 11.904.610.000,-
	April	Rp. 8.629.416.000,-
	Mei	Rp. 27.126.508.000,-
	Juni	Rp. 5.675.390.000,-
	Juli	Rp. 9.782.830.000,-
	Agustus	Rp. 9.775.210.000,-
	September	Rp. 7.110.240.000,-
	Oktober	Rp. 3.545.090.000,-
	November	Rp. 9.060.450.000,-
	Desember	Rp. 9.035.360.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp 117.574.466.324,-</b>
Tahun 2018	Januari	Rp. 8.060.180.000,-
	Februari	Rp. 29.855.150.000,-
	Maret	Rp. 30.225.090.000,-
	April	Rp. 48.670.090.000,-
	Mei	Rp. 13.725.270.000,-
	Juni	Rp. 13.965.000.000,-
	Juli	Rp. 15.214.877.000,-
	Agustus	Rp. 17.335.150.000,-
	September	Rp. 21.387.000.000,-
	Oktober	Rp. 18.543.381.000,-
	November	Rp. 19.640.000.000,-
	Desember	Rp. 72.769.000.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 309.390.188.000,-</b>
Tahun 2019	Januari	Rp. 19.065.000.000,-
	Februari	Rp. 26.681.000.000,-
	Maret	Rp. 218.108.080.986,-
	April	Rp. 55.715.464.376,-
	Mei	Rp. 35.818.084.080,-
	Juni	Rp. 12.245.000.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 367.632.629.442,-</b>

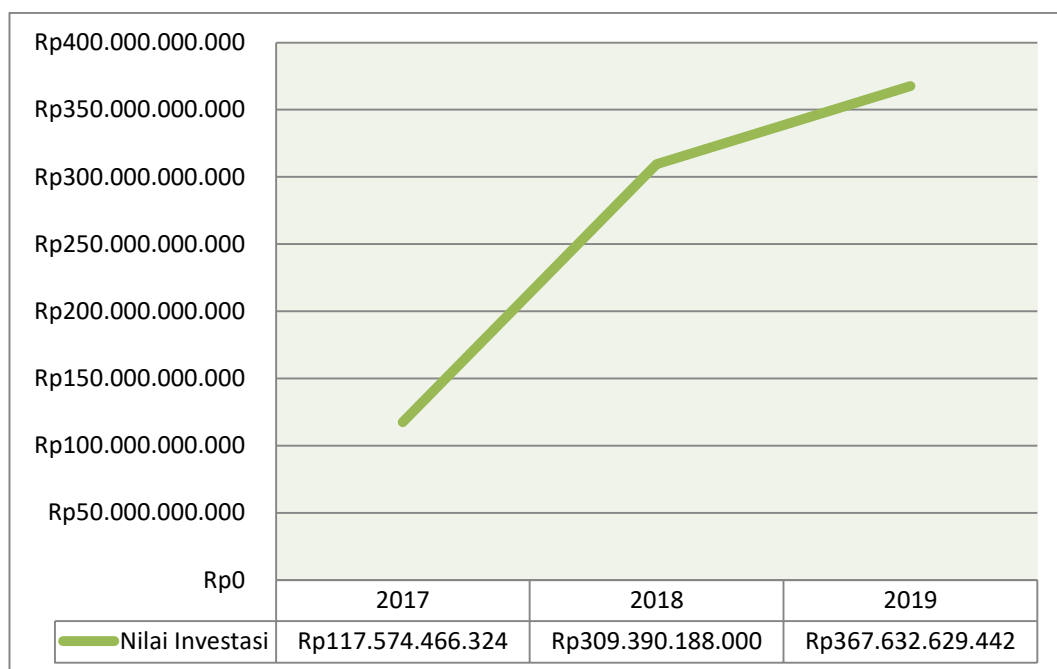
Sumber: DPM PTSP Kabupaten Bangkalan 2019



Pembentukan modal tetap bruto atau nilai investasi di Kabupaten Bangkalan adalah komponen tertinggi penyumbang pertumbuhan ekonomi dimana selama tiga tahun terakhir tumbuh  $\pm 9$  persen tahun 2017,  $\pm 6$  persen di tahun 2018, dan  $\pm 6$  persen di tahun 2019. Berdasarkan komposisinya, investasi berada di tingkat ke 2 yang menyumbang 31 persen PDRB setelah konsumsi rumah tangga.

**b. Jumlah Investasi**

**Gambar 4.10 Nilai Investasi di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2019**

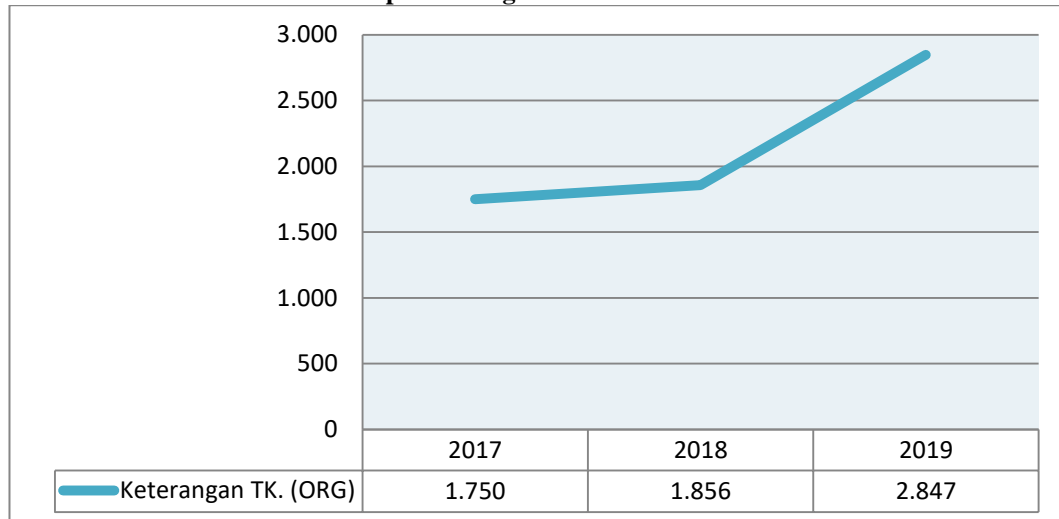


Sumber: DPM PTSP Kabupaten Bangkalan 2019

Jumlah investasi terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir mulai tahun 2017 samapai tahun 2019, di tahun 2017 nilai investasi mencapai Rp. 117.574.466.324 di tahun 2018 investasi meningkat hampir 300% yaitu menjadi Rp. 309.390.188.000 dan di tahun 2019 di triwulan kedua kembali meningkat menjadi Rp. 467.632.629.442. Peningkatan investasi tersebut merupakan adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk mempermudah proses perijinan di bidang investasi dan sarana prasarana invesatsi yang cukup mewadai investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bangkalan setelah adanya jempatan Suramadu.

**c. Penyerapan Tenaga Kerja dari Investasi**

**Gambar 4.11 Tenaga Kerja dalam Investasi di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2019**



Sumber: DPM PTSP Kabupaten Bangkalan 2019

Penyerapan tenaga kerja dari investasi sangat signifikan dan terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di tahun 2017 jumlah tenaga kerja sebanyak 1.750 orang meningkat di tahun 2018 menjadi 1.856 orang dan di tahun 2019 triwulan kedua penyerapan tenaga kerja dari investasi meningkat ±53% hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Bangkalan yang terus meningkat.

**4.2.2. Perizinan Usaha di Kabupaten Bangkalan**

**Tabel 4.3 Perizinan Usaha Kabupaten Bangkalan Tahun 2017**

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	446
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	73
3	Izin Rekalme (IR)	122
4	Perizinan Sarana Pelayanan Medis (PSPM)	174
5	Izin Gangguan (HO)	21
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	584
7	Tanda Daftar Gudang (TDG)	17
8	TDI	10

Sumber: DPM PTSP Kabupaten Bangkalan 2019

Perizinan usaha di Kabupaten bangkalan di Tahun 2017 terdapat beberapa izin usaha, seperti SIUP, IMB, IR, PSPM, HO, TDP, TDG dan TDI. Dari jenis izin usaha tersebut yang paling banyak adalah jenis izin usaha TDP yaitu sebanyak 584 usaha dan terbanyak kedua adalah izin usaha SIUP sebanyak 446 usaha dan yang paling kecil adalah TDI hanya 10 usaha.

### 4.3. Badan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Tupoksinya Bapenda Bangkalan berfokus pada kegiatan antara lain

- Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah;
- Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
- Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
- Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan daerah;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
  4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
  5. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah target dan capaian pada Triwulan ke 3 kegiatan yang dilaksanakan Bapenda Kabupaten Bangkalan tahun 2019.

No	Nama Indikator dan Capaian Kerja	Tahun		
		2018	2019	TW 3 (%)
1	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	239.513.792.916,41	158.810.451.377,71	66%
2	Nilai Realisasi Pajak dan Restribusi Daerah Sektor Bumi dan Bangunan	15.804.238.354,38	10.746.122.553,00	68%
3	Jumlah Obyek Pajak dan Restribusi Sektor Bumi dan Bangunan yang di Data	2394,00	2394,00	100%
4	Jumlah Obyek Pajak dan Restribusi Sektor Usaha yang didata	33.662.203.561,00	25.841.569.277,50	77%
5	Jumlah Pendapatan	2.074.689.457.083,28	1.249.548.242.164,71	60%
6	PAD	239.513.792.916,41	158.810.451.377,71	66%
7	Pajak Daerah	49.473.211.878,38	36.560.619.830,50	74%
8	Restribusi Daerah	14.682.564.847,41	10.014.940.810,82	68%
9	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	2.067.212.391,25	1.776.663.664,99	86%
10	Lain-Lain PAD yang Sah	173.290.803.799,37	110.458.227.071,40	64%
11	Dana Perimbangan	1.344.825.042.010,00	948.378.473.978,00	71%
12	Dana Bagi Hasil	115.358.054.088,00	83.093.345.422,00	72%

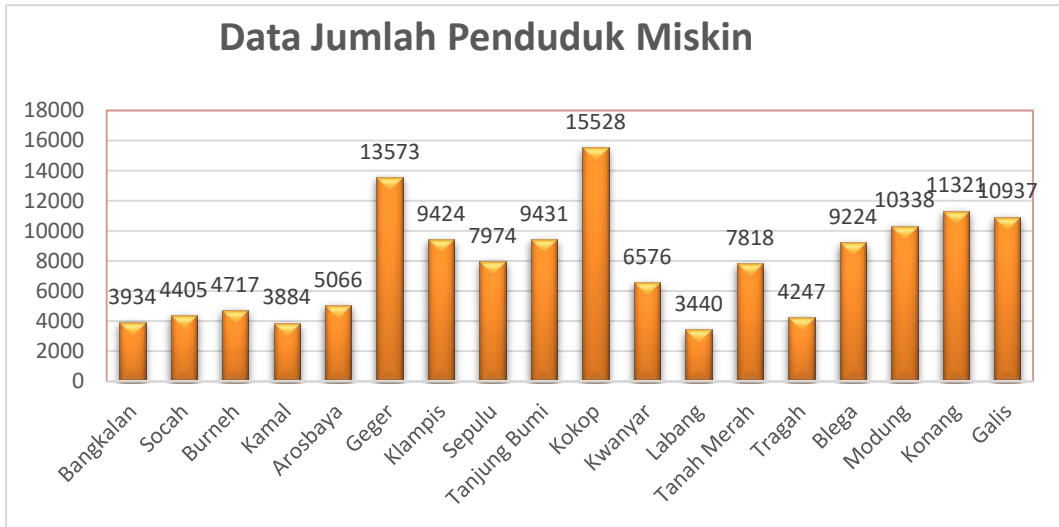
Peningkatan Jumlah Realisasi PAD pada TW 3 menunjukkan Jumlah peningkatan 66 % hal ini disebabkan peningkatan kinerja dan kerjasama antara sektoral yang masuk dalam integrasi peran kelembagaan sangat tinggi, prediksi

setiap bulan 7,3% angka yang cukup signifikan menjadi gambaran aktifitas perekonomian yang cukup baik, jumlah angka perimbangan penerimaan serapan pajak daerah 74% dan restribusi daerah 68%, hal ini mengindikasikan tumbuhnya sektor usaha artinya roda perekonomian pada sektor riil semakin tumbuh dengan optimal. Trend kenaikan hal ini juga ditunjang oleh peningkatan pengelolaan keuangan daerah pada TW3 sudah mencapai 86%.

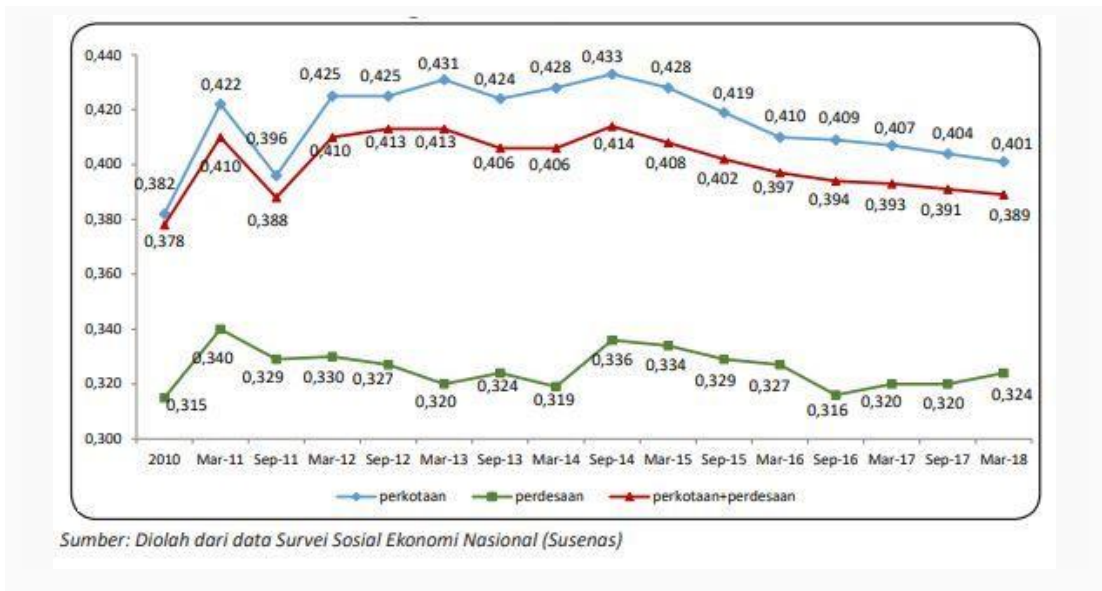
## 4.4 Dinas Sosial

### 4.4.1 Pengukuran Indeks Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup seara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan. Pengukuran indeks kemiskina di suatu daerah dengan menggunakan koefisien gini rasio diaman di bangkalan , Sebagai dinas yang berfokus pada penanganan masalah sosial sepertinya dinas sosial menjadi dinas memiliki tupoksi pada perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial; pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial; penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; pelaksanaan koordinasi teknis jaminal sosial. Berikut adalah grafik kategori penduduk yang masuk dalam golongan miskin yang tersaji dalam tiap kecamatan di Bangkalan. Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya mengalami peningkatan garis kemiskinan, tahun 2017 Kabupaten Bangkalan memiliki garis kemiskinan sebesar 349.073 rupiah, Sedangkan tahun 2018 ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 369.455 rupiah. Adapun nilai garis kemiskinan Kabupaten Bangkalan sebagai berikut.



Angka kemiskinan tertinggi muncul di Kecamatan Kokop dengan jumlah 15528, sedangkan angka kemiskinan terendah ada di kecamatan Labang. Hal ini sejalan dengan munculnya nilai penurunan Maret 2015 hingga Maret 2018,. Bahkan rasio gini bulan Maret 2018 menjadi yang terendah sejak 7 tahun terakhir, atau sejak September 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015-Maret 2018, di era pemerintahan Jokowi-JK, terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia.



Sumber: Indikator Makro Ekonomi Sosial Jawa Timur, 2018 (diolah)



Penurunan rasio gini secara berkelanjutan di masa pemerintahan Jokowi-JK tidak lepas dari keberhasilan pemerintahan mereka untuk menurunkan rasio gini di tingkat perkotaan secara konsisten, hingga mencapai 0,401 di Maret 2018. Sebelumnya, rasio gini di perkotaan cukup bergejolak, dan sempat menyentuh angka 0,433 pada September 2014. Hanya saja, pemerintahan Jokowi-JK masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar. Pasalnya, sejak September 2016, rasio gini di perdesaan terus merangkak naik hingga menyentuh angka 0,324 pada Maret 2018. Berikut adalah Tabel Indeks Gini Kabupaten Bangkalan,

Tahun	Indek Gini
2008	0.34
2009	0.29
2010	0.29
2011	0.3
2012	0.28
2013	0.28
2014	0.33
2015	0.32

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018

Keterangan:	G = 0	= Merata Sempurna
	G < 0,3	= Ketimpangan Rendah
	0,3 ≤ G ≤ 0,5	= Ketimpangan Sedang
	G > 0,5	= Ketimpangan Tinggi
	G = 1	= Tidak Merata Sempurna

Bila mengacu pada tabel diatas maka pada tahun 2008 Kabupaten Bangkalan yang memiliki indeks gini 0.34 memiliki tingkat ketimpangan sedang, sedangkan ditahun 2009 sampai 2013 bangkalan memiliki indeks gini dibawah 0.3 yang artinya memiliki ketimpangan rendah pada tahun itu. Akan tetapi ditahun 2014 sampai dengan 2015 indeks gininya naik hingga mencapai 0.32 yang mengindikasikan Kabupaten Bangkalan ditahun tersebut kembali memiliki tingkat ketimpangan sedang. Indeks gini Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 lebih rendah apabila dibandingkan dengan indeks gini dari Jawa Timur yaitu 0.42 persen. Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan adalah *head-count ratio* (Po). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini

mudah dihitung dan mudah dipahami, namun demikian tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seseorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh Karena itu dikenal juga indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index P1*) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index atau P2*).

Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index P1*) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan dengan suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan diantara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indicator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index atau P2*). Penurunan pada *P1* mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antar standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Di Kabupaten Bangkalan jumlah penduduk miskin meningkat dari tahun 2014 sebesar 212.160 menjadi 216.230 di tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 menurun drastis menjadi 205.701 dari tahun 2015. Ditahun 2017 angka kemiskinan 206.630, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 141.837. Penurunan jumlah kemiskinan penduduk di Kabupaten Bangkalan adalah prestasi kota Bangkalan hal ini disebabkan adanya pemerataan pembanguna ekonomi real ( industri makanan dan oleh-oleh, industr batik rakyat kota Bangkalan yang sudah mulai dikenal di luar kota Madura Bahkan sampai mancanegara, begitu juga kehadiran industri kreatif yang merupakan industri ikutan sektor pariwisata mulai banyak diminati oleh penduduk lokal dan luar kota Bangkalan. Salah Satu Pengukuran indeks ketimpangan antar wilayah dengan metode Williamson berikut adalah Indeks Disparitas Kabupaten Bangkalan 2010-2016

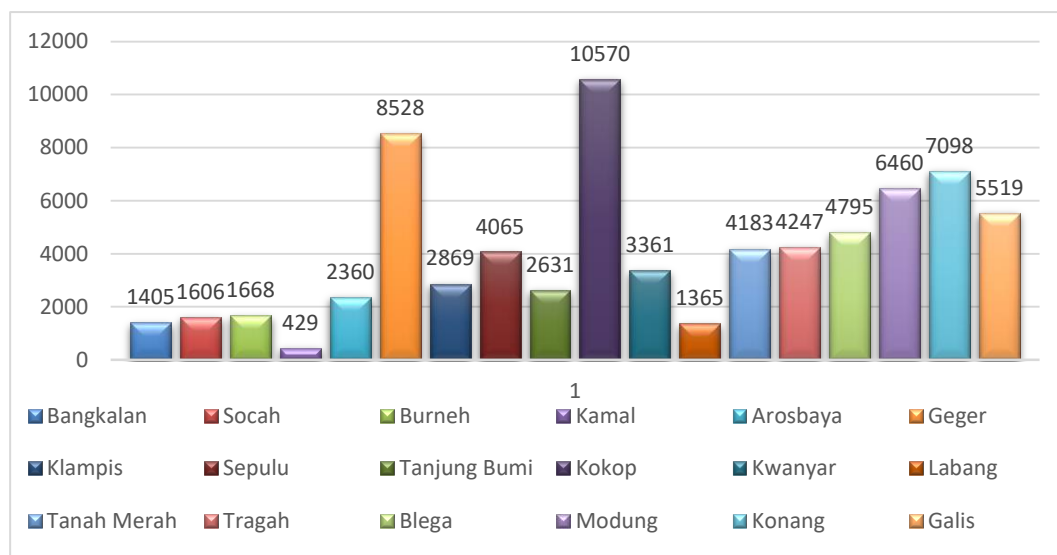
Tahun	Nilai Indeks Williamson
2010	0.244601204
2011	0.246209918
2012	0.228805476
2013	0.25870738
2014	0.273775939
2015	0.228721219
2016	0.217629934
2017	0.209879934
2018	0.196579934

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Salah satu ukuran ketimpangan lainnya selain Indeks Gini adalah Indeks Williamson. Jika Indeks Gini bisa digunakan untuk melihat ketimpangan antar kelompok pendapatan dalam suatu wilayah maka Indeks Williamson menggambarkan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Williamson mengamati tingkat kesenjangan di berbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda. Williamson menilai tingkat kesenjangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Jadi, indeks williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standar deviasi. Dengan demikian makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Williamson maka akan semakin rendah kesenjangan di wilayah tersebut. Beberapa peneliti menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah ketimpangan dalam masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang, atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut; ketimpangan taraf rendah bila indeks Williamson  $< 0,35$ , ketimpangan taraf sedang bila indeks Williamson antara  $0,35-0,50$  dan ketimpangan taraf tinggi bila indeks Williamson  $>0,5$ . Empat Kabupaten di Pulau Madura memiliki tingkat ketimpangan yang relative rendah yaitu di bawah  $0.35$  selama tujuh tahun terakhir dan mengalami penurunan sampai tahun 2016 yang hanya sebesar  $0.21$ . Pada

tahun 2017 terjadi penurunan Indeks Williamson yang hanya sebesar 0,20, sedangkan tahun 2018 mengalami penurun kembali sebesar 0,19. Penurunan indeks Williamson ini sepertinya signifikan dengan penuruan indeks gini ratio artinya indeks kemiskinan pada gini ratio berbanding lurus dengan indeks Williamson. Salah satu penyebab penurunan indeks dan indeks Gini Ratio dan Williamson adaah pemerataan kesempatan kerja terutama ditopang oleh munculnya sektor pariwisata dan sektor kuliner yang mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak.

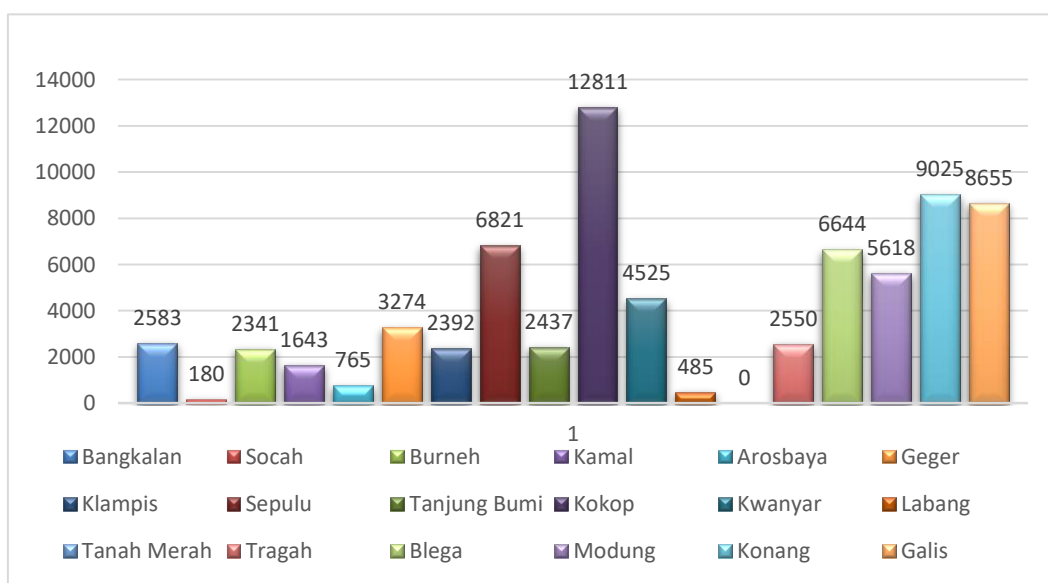
#### 4.4.2 Jumlah Rumah Tangga Miskin



Jumlah angka kemiskinan tertinggi di daerah Kokop sejumlah 10570 jiwa, sedangkan terendah ada di kecamatan kamal sejumlah 429 jiwa hal ini menguatkan angka yang di temukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara makro angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Pada Maret 2019 garis kemiskinan Indonesia menjadi sebesar Rp 425.250 per kapita per bulan. Posisi itu mengalami peningkatan 3,55 persen dari garis kemiskinan September 2018 yang sebesar Rp 410.670, juga naik sebesar 5,99 persen dibanding Maret 2018 yang sebesar Rp 401.220. Jadi orang akan dikategorikan miskin kalau pendapatannya di bawah Rp1,99 juta. Untuk mencari uang sebesar hampir Rp 2 juta bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi garis kemiskinan di tiap daerah berbeda," ujarnya dalam

konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Yakni dari 10,14 juta orang pada September, menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019. Sedangkan penduduk miskin di perdesaan, BPS mencatat turun sebesar 393,4 ribu orang dsri 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta di Maret 2019. Presentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Sementara di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen. Sebagai bentuk pencapaian pelaporan dalam bentuk laporan data statistik sektoral yang nampak pada grafik diatas sepertinya di Kabupaten Bangkalan menggambarkan

#### 4.4.3 Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin



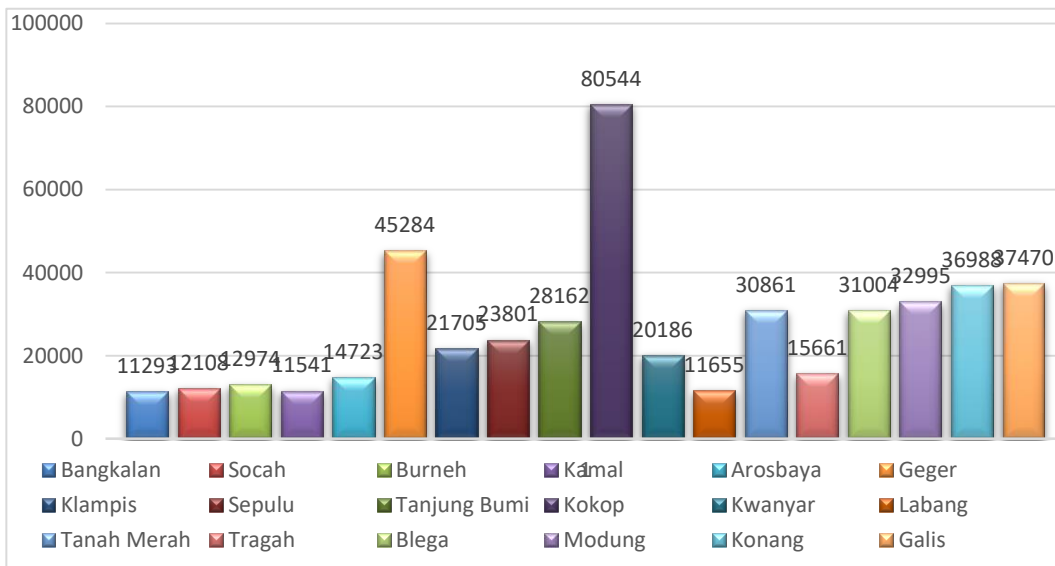
Persentase Kepala Rumah Tangga miskin pada Maret 2019 sebesar 12811 jiwa di Kecamatan Kokop, Sedangkan terendah terdapat di kecamatan Labang sejumlah 485 jiwa.

Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Bangkalan, Jawa Timur menyatakan, lebih dari separuh rumah tempat tinggal warga di Kabupaten Bangkalan, tidak layak huni.

Sesuai data, jumlah rumah warga yang tidak layak huni sebanyak 118.834 unit, sedangkan yang layak huni hanya sebanyak 111.520 unit," kata Humas Bappeda Pemkab Bangkalan Feilgie Surya Pranata di Bangkalan, Minggu. Ini berarti, sambung dia, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangkalan lebih banyak 7.314 unit dibanding jumlah rumah warga yang layak huni, dan oleh karenanya, kini Pemkab Bangkalan terus berupaya menggiatkan program pemberdayaan guna membantu warga yang kurang mampu. Dalam hal ini perlu tindakan yang lebih serius dan terintegrasi terkait dengan semua stake holder terkait. Koordinasi antar Dinas terkait dalam hal ini dinas sosial perlu dalam pengambilan kebijakan yang lebih strategis.

#### 4.4.4 Jumlah Kepala Rumah Tangga Penerima Jamkesmas



Jumlah Rumah Tangga penerima Jamkesmas dan Jamkesda tertinggi berada di Kecamatan Kokop sejumlah 80544 sedangkan terendah Kecamatan Labang sejumlah 11655, Jamkesmas atau Jamkesda merupakan salah satu program jaminan kesehatan dari pemerintah untuk membantu warga kurang mampu agar tak kesulitan mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan yang memadai. Program

ini telah ada sejak lama sebelum munculnya BPJS. Namun, saat ini kedua jaminan kesehatan tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah digantikan dengan program baru oleh BPJS Kesehatan. Digantikannya program Jamkesmas atau Jamkesda dengan program baru bukan berarti pemegang kartu Jamkesmas atau Jamkesda dinonaktifkan atau dikeluarkan dari kepesertaan jaminan kesehatan. Pemilik kartu lama masih menjadi peserta jaminan kesehatan selama masih terdaftar di Kementerian Sosial. Pemegang kartu Jamkesmas atau Jamkesda akan secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan kategori PBI (penerima bantuan iuran dari pemerintah) dan kartu Jamkesmas dan Jamkesda akan diganti menjadi kartu KIS BPJS. Untuk mengganti kartu Jamkesmas atau Jamkesda ada 2 cara yang bisa dilakukan sebagai berikut ini. 1. Mengganti Kartu Jamkesmas atau Jamkesda dengan Kartu KIS BPJS Masyarakat pemegang kartu Jamkesmas atau Jamkesda sebenarnya tak perlu khawatir untuk terburu-buru mengubah kartunya menjadi kartu KIS BPJS, karena masyarakat tetap masih bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis dengan kartu Jamkesmas atau Jamkesda selama masih diikutsertakan dalam data rekonsiliasi penerima bantuan kesehatan oleh Kementerian Sosial. Pemegang kartu Jamkesmas atau Jamkesda hanya perlu menunggu sampai kartu tersebut mendapat penggantian dari pemerintah, sebab kartu KIS BPJS pengganti kartu Jamkesmas atau Jamkesda secara bertahap akan didistribusikan secara langsung oleh petugas BPJS melalui POS ke desa atau kelurahan tempat pemegang kartu tinggal. Apabila tetangga atau pemegang kartu lama yang tinggal di desa atau kelurahan yang sama telah menerima kartu pengganti, ada baiknya sebagai pemegang kartu lama melakukan pengecekan di kantor BPJS setempat untuk mendapatkan informasi mengenai aktif atau tidaknya kepesertaan Jamkesmas atau Jamkesda. Jika kepesertaan masih aktif, pemilik kartu Jamkesmas, Jamkesda, atau Jamsostek dapat secara pribadi maupun kolektif dapat melakukan pengecekan dengan membawa surat pengantar dari desa, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kartu Jamkesmas, Jamkesda, atau Jamsostek asli. BPJS tak memungut biaya apapun dalam proses penggantian kartu. Untuk pengurusan perorangan, pemilik kartu cukup datang ke kantor BPJS menunjukkan KTP, KK, dan kartu Jamkesmas asli dan fotokopi untuk mendapatkan kartu pengganti. Apabila terdapat anggota

keluarga yang telah meninggal dunia, sertakan pula surat keterangan atau akta kematiannya. Namun apabila kepesertaan Jamkesmas atau Jamkesda sudah non aktif atau dikeluarkan dari kepesertaan jaminan kesehatan, kemungkinan besar data kepesertaan sudah tidak diikutsertakan dalam data rekonsiliasi terbaru yang diterbitkan setiap 6 bulan sekali oleh Kementerian Sosial, serta sudah dianggap tidak lagi dikategorikan sebagai warga miskin atau kurang mampu oleh pemerintah. Pemegang kartu lama masih dapat berganti menjadi peserta BPJS mandiri dan menanggung sendiri beban biaya iuran. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dibawa untuk mengganti kartu lama yang sudah non aktif menjadi BPJS mandiri. Fotokopi dan Kartu Tanda Penduduk asli dan masing-masing anggota keluarga. Fotokopi dan dokumen asli Kartu Keluarga. Fotokopi buku rekening bank BNI, BRI, atau Mandiri khusus bagi yang akan mendaftar kelas 1 dan 2. Jika akan mendaftar kelas 3, tidak diwajibkan memiliki rekening bank. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar untuk masing-masing anggota keluarga kecuali anak usia balita.

2. Mengganti kartu Jamkesmas, Jamkesda, atau Jamsostek dengan cara mengganti jenis kepesertaan

Jika pemegang kartu ingin mengganti kartu Jamkesmas, Jamkesda, atau Jamsostek dengan KIS BPJS karena ingin beralih kepesertaan dari jamkesmas menjadi BPJS mandiri, maka pemilik kartu harus mencabut kepesertaan Jamkesmas, Jamkesda, atau Jamsostek dari Dinas Sosial. Pencabutan kepesertaan Jamkesmas, Jamkesda, atau Jamsostek dari Dinas Sosial akan memakan waktu cukup lama, karena harus menunggu rekonsiliasi dari Kementerian Sosial. Data pencabut juga tidak akan disertakan dalam data rekonsiliasi serta kepesertaan Jamkesmas, Jamkesda, atau Jamsostek akan dinonaktifkan. Setelah kepesertaan dinyatakan non aktif, maka pemohon dapat mengurus pergantian kepesertaan dengan cara datang langsung ke kantor BPJS, jika ingin beralih menjadi peserta BPJS mandiri, atau dapat melalui HRD perusahaan jika ingin beralih menjadi peserta BPJS PPU perusahaan.

Dari grafik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya di Kabupaten Bangkalan. Tingginya penerima Jamkesmas dberada di kecamatan Kokop dengan jumlah cukup besar yaitu 80.544 jumlah yang cukup ekstrem jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain, kecamatan Bangkalan rata-rata berada yang terendah pada angka 11.293 dan rata-rata berada di jumlah 28.174.



#### 4.4.5 Jumlah Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam proses pertolongannya, pekerjaan sosial berpijak pada nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip keberfungsian sosial (social functioning) (Siporin, 1975; Zastrow, 1982; 1989; Morales, 1989; Suharto, 1997). Konsep keberfungsian sosial pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (capabilities) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa klien adalah subyek pembangunan; bahwa klien memiliki kapabilitas dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan, bahwa klien memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya. Sebagaimana halnya profesi kedokteran berkaitan dengan konsepsi “kesehatan”, psikolog dengan konsepsi “perilaku adekwat”, guru dengan konsepsi “pendidikan”, dan pengacara dengan konsepsi “keadilan”, keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan sosial karena merupakan pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Morales dan Sheafor (1989:18) menyatakan:

*Social functioning is a helpful concept because it takes into consideration both the environment characteristics of the person and the forces from the environment. It suggests that a person brings to the situation a set of behaviors, needs, and beliefs that are the result of his or her unique experiences from birth. Yet it also recognizes that whatever is brought to the situation must be related to the world as that person confronts it. It is in the transactions between the person and the parts of that person's world that the quality of life can be enhanced or damaged. Herein lies the uniqueness of social work.*

Dengan demikian, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Soeharto, 2017), jika keseluruhan konsepsi tersebut dipandang sebagai kontribusi setiap profesi terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial dalam domain pembangunan nasional, Secara tegas, memang sulit mengkategorikan bahwa sasaran garapan pekerjaan sosial (Depsos) adalah salah satu kelompok dari ketiga kelompok di atas. Pekerjaan sosial melihat bahwa kelompok sasaran dalam menangani kemiskinan harus mencakup tiga kelompok miskin secara simultan.

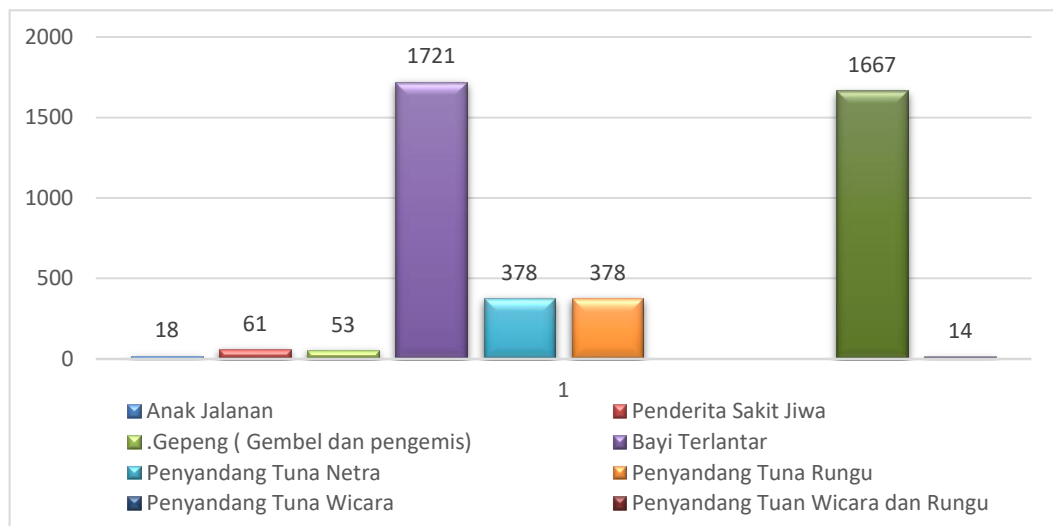
Dalam kaitan ini, maka seringkali orang mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan “status” atau “profil” yang melekat padanya yang kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gelandangan, pengemis, anak jalanan, suku terasing, jompo terlantar, penyandang cacat (tubuh, mental, sosial) dll adalah beberapa contoh PMKS yang sering diidentikan dengan sasaran pekerjaan sosial di Indonesia. Belum ada hasil penelitian yang komprehensif apakah mereka ini tergolong pada kelompok destitute, poor atau vulnerable. Namun dapat diasumsikan bahwa PMKS bisa berada diantara ketiga kategori kemiskinan di atas. Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya (Soeharto, 2017). Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan “person-in-environment dan person-in-situation” (Soeharto, 2017). Pada pendekatan pertama, pekerja sosial melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana si miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (peer group), maupun masyarakat (Soeharto, 2017). Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan (institutional) biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Beberapa bentuk PROKESOS yang telah dan sedang dikembangkan oleh Depsos dapat disederhanakan menjadi:

1. Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial.
2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.

Pendekatan kedua, yang melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip individualisation dan self-determinism yang melihat si miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Program anti kemiskinan dalam kaca mata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian dan/atau masalah-masalah yang dihadapinya. PROKESOS penanganan kemiskinan-yang pada prinsipnya memadukan

pendekatan neoliberal dan sosial demokrat ini-dapat dikategorikan kedalam beberapa strategi:

1. Strategi kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.
2. Strategi kesementaraan atau residual. Misalnya, bantuan stimulan untuk usaha-usaha ekonomis produktif.
3. Strategi pemberdayaan. Misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
4. Strategi “penanganan bagian yang hilang”. Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai “the missing piece strategy” ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau “disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Berikut Adalah Grafik jumlah kelompok penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Bangkalan



Sumber : Data Hasil Olahan, 2018

Dari Tabel diatas tingginya angka bayi terlantar sebesar 1721 dan penderita tuna daksa sebesar 1667. Fokus penanganan bayi terlantar keterlanataran balita diungkapkan dengan beberapa kriteria oleh staf ahli Kementerian PPA Titi Eko Rahayu tahun 2017. Pertama, tidak pernah diberi air

susu ibu (ASI). Kedua, tidak mempunyai bapak/ibu kandung lagi. Ketiga, frekuensi mengkonsumsi makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu. Keempat adalah frekuensi mengonsumsi makanan protein nabati tinggi kurang dari 14 kali, atau makanan protein hewani tinggi kurang dari dua kali, atau kombinasi keduanya dalam seminggu. "Artinya, balita telantar mengonsumsi makanan protein nabati tinggi atau protein hewani tinggi atau kombinasi keduanya dalam seminggu sangat minim. Padahal, pada usia balita, maka anak membutuhkan sangat banyak protein untuk tumbuh kembang," kelima, dikemukakannya, ibu balita yang bertanggungjawab pada balita tersebut bekerja selama seminggu terakhir. Keenam, keterlantaran balita bila dirinya sakit tidak diobati, dan ketujuh adalah balita dititipkan/diasuh oleh orang lain, seperti tetangga atau pihak selain orang tuanya. Atau malah ditinggal sendiri selama seminggu terakhir. Jika seorang balita memenuhi tiga kriteria di atas atau lebih, maka dia masuk kategori balita telantar.

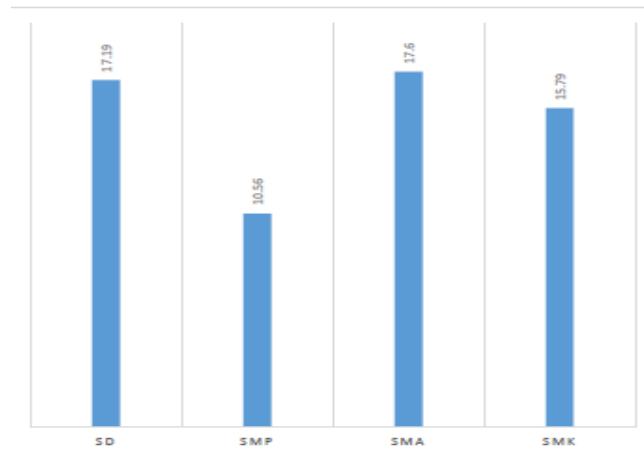
Ketunadaksaan menurut Dr. Luh Karunia Wahyuni, SpKFR-K dari Kepala Klinik Ibu dan anak RS.Cipto Mangun Kusumo Jakarta, bahwa tuna daksa muncul diakibatkan oleh 3 faktor, yakni Prenatal (sebelum kelahiran), faktor Neonatal (saat lahir) dan Postnatal (setelah kelahiran). Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat.

#### 4.5 Masalah Pendidikan

Semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah, khususnya untuk jenjang pendidikan PAUD,SD,SLTP dan SMA harus di ikuti dengan meningkatnya fasilitas pendidikan, terutama mengenai daya tampung sekolah, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang di canangkan oleh pemerintah dapat berhasil. Guna mengatasi kekurangan daya tampung pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan seperti menambah pembangunan unit gedung baru dengan prioritas pada daerah yang angka partisipasi sekolahnya masih rendah dan daerah terpencil dan merehabilitasi gedung-gedung SD dan SLTP dengan prioritas gedung yang rusak berat serta mengangkat guru baru untuk di tempatkan pada sekolah yang kekurangan guru. Tingkat kecukupan sarana dan

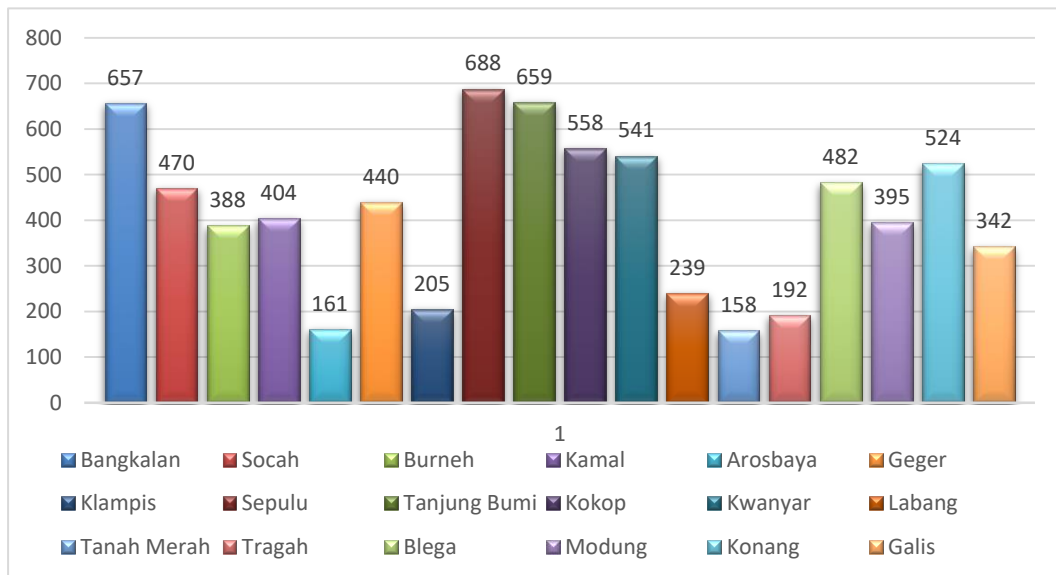
prasarana pendidikan dapat dilihat melalui rasio siswa terhadap jumlah sekolah dan rasio murid terhadap Guru. Gambar 14 menunjukkan rasio siswa terhadap guru menunjukkan setiap 1 orang guru dapat mengajar 17 murid SD, 17 murid SMA juga 10 murid di SMP.

. Rasio Murid-Guru di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, 2018 (diolah)

Berikut dibawah ini adalah grafik jumlah peserta pendidikan PAUD di Bangkalan tahun 2019.



#### 4.5.1 Jumlah Peserta PAUD

Grafik diatas seperti nya dapat memberikan gambaran jumlah peserta pendidikan PAUD di Bangkalan, peserta Pendidikan PAUD berjumlah 7503

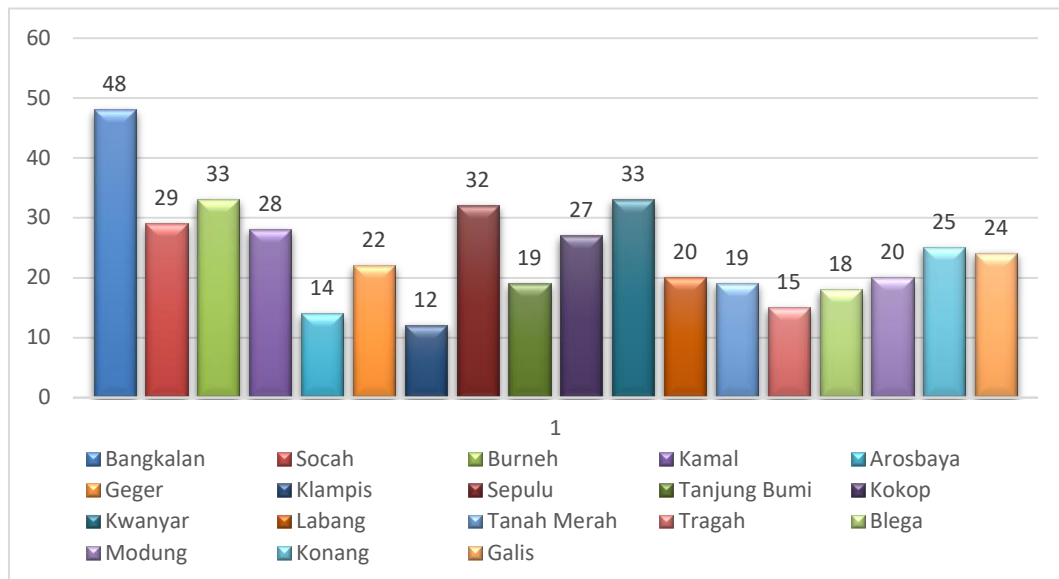
Jumlah yang cukup Besar dan semua Pendidikan PAUD belum tersertifikasi di Diknas Kabupaten. Jumlah anak-anak yang disekolahkan di PAUD oleh orang tua tertinggi berada di Kecamatan sepulu berjumlah 688 dan terendah di kecamatan tanah merah berjumlah 158. Perbedaan jumlah peserta anak didik pada level PAUD adalah tidak lepas dari kesadaran partipatif orang tua yang menempatkan anaknya sedini mungkin membekali mereka dengan Pendidikan karakter seperti kepercayaan diri nilai-nilai kemandirian, berbagi dengan semuan golongan sejak dini, untuk Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan pola Pendidikan dan kurikulum serta metode pembelajaran yang diberika. Termasuk jumlah pengajar di Pendidikan PAUD harus terus diberikan bantuan insentif kesejahteraan oleh diknas setempat Rendahnya kesadaran Orang Tua untuk memasukkan anaknya ke dalam jenjang sekolah PAUD di Daerah dan di Daerah Arosbaya 161, dan di daerah Tanah Merah sebanyak 158, hal ini disebabkan Hal-hal yang membuat masyarakat kurang mementingkan pendidikan diantaranya :

1. Ketidaktahuan akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidup
2. Banyak dari mereka (masyarakat pedesaan) yang berpikir “untuk apa sekolah? Asalkan sudah bisa mencari uang tidak perlu sekolah” padahal pendidikan di sekolah juga perlu untuk menunjang karier mereka di masa depan nanti siapa tahu menjadi orang sukses.
3. Tidak memadainya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pendidikan
4. Kurangnya bahkan rusaknya sarana dan prasarana yang telah ada, membuat masyarakat semakin malas untuk sekolah, untuk mengenyam pendidikan. Sudah sepatutnya pemerintah dan kita bersama-sama membantu memfasilitasi mereka ^-^
5. Letak geografis yang menyulitkan untuk mengakses masyarakat di desa terpencil. Letak geografis kerap kali menjadi kendala untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat pedesaan, mulai dari naik turun bukit, tidak ada alat transportasi, sampai tidak adanya aliran listrik
6. Mahalnya biaya Pendidikan, “Biaya pendidikan di Indonesia mahal, sedangkan penghasilan cuma cukup buat makan saja. Belum beli seragam, sepatu, tas, peralatan sekolah, buku, belum lagi kalo ada tugas-tugas, terus

tiap hari perlu ongkos ke sekolah” mungkin kalimat-kalimat ini yang sering terlintas di benak masyarakat pedesaan jika memikirkan tentang pendidikan.

Pada zaman sekarang banyak masyarakat yang tingkat kesadarannya sangat rendah terhadap pemberian layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun). Hal itu disebabkan karena kurangnya rasa sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Jika saja masyarakat lebih mengerti bahwasannya pendidikan anak usia dini menempati posisi yang sangat strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia di masa yang akan datang karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang selalu berkembang secara terus menerus dan bersifat alami. Banyak anggapan sebelumnya yang mengatakan bahwasannya pendidikan yang tepat atau matang adalah diberikan pada anak yang berumur 5-7 tahun, dimana anak mulai masuk usia kematangan yang siap untuk bersekolah. Sedangkan, yang sebenarnya adalah pendidikan yang baik adalah pada masa-masa 0-6 tahun yang merupakan masa emas (golden age) dimana perkembangan fisik, motorik intelektual, emosional, bahasa dan sosial berlangsung dengan cepat dan mudah tangkap. Begitu juga terdapat beberapa faktor yang menjadi masyarakat tidak percaya bahwasannya pendidikan anak usia dini itu sangat penting, diantaranya adalah masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan untuk mereka. Hal itu diperburuk oleh relatif rendahnya kualitas tenaga yang sudah ada. Kemudian faktor lain adalah letak geografis yang membuat mereka sulit menemukan tempat belajar sehingga cara yang paling aman adalah mereka bersekolah ketika berumur 5-7 tahun dengan jenjang sekolah dasar tanpa pendidikan dini dan yang lebih parah lagi atau bisa di sebut pada umumnya adalah tingkat ekonomi masyarakat yang menyebabkan orang tua tidak segera menyiapkan pendidikan sejak dini. Dengan demikian, urgensi pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan semua aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan fisik, motorik intelektual, emosional, bahasa dan sosial. Pendidikan anak usia dini itu penting pada kedua orang tua. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kesuksesan hidup erat kaitannya dengan pendidikan anak pada usia dini. Dari grafik peserta PAUD di Bangkalan sepertinya menunjukkan

### 4.5.2 Jumlah Bangunan PAUD



Jumlah Gedung diperuntukkan untuk kegiatan Pendidikan PAUD di Bangkalan berjumlah 438 gedung.. Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- b. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
  2. data mengenai perkiraan jarak TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat;
  3. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;



4. ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- c. Berdasarkan hasil telaahan tersebut, kepala dinas:
1. memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau
  2. memberi rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian satuan PAUD.
- d. Kepala dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 sejak permohonan diterima kepala dinas. Sebuah PAUD Jalur Pendidikan Nonformal persyaratan standar sarana dan prasarannya meliputi:
1. Kebutuhan jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani, dengan luas minimal 3 m<sup>2</sup> per peserta didik.
  2. Minimal memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, dan kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan diri dan BAK/BAB (toileting) dengan air bersih yang cukup.
  3. **Memiliki sarana yang disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani.**
  4. Memiliki fasilitas permainan baik di dalam dan di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep.
  5. Khusus untuk TPA, harus tersedia fasilitas untuk tidur, mandi, makan, dan istirahat siang.

**Satuan PAUD** adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis. Berikut uraian kelimanya:

1. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

2. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
3. Kelompok Bermain (“KB”) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
4. Taman Penitipan Anak (“TPA”) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
5. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis (“SPS”) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

Pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

1. pemerintah kabupaten/kota;
2. pemerintah desa;
3. orang perseorangan;
4. kelompok orang; atau
5. badan hukum.

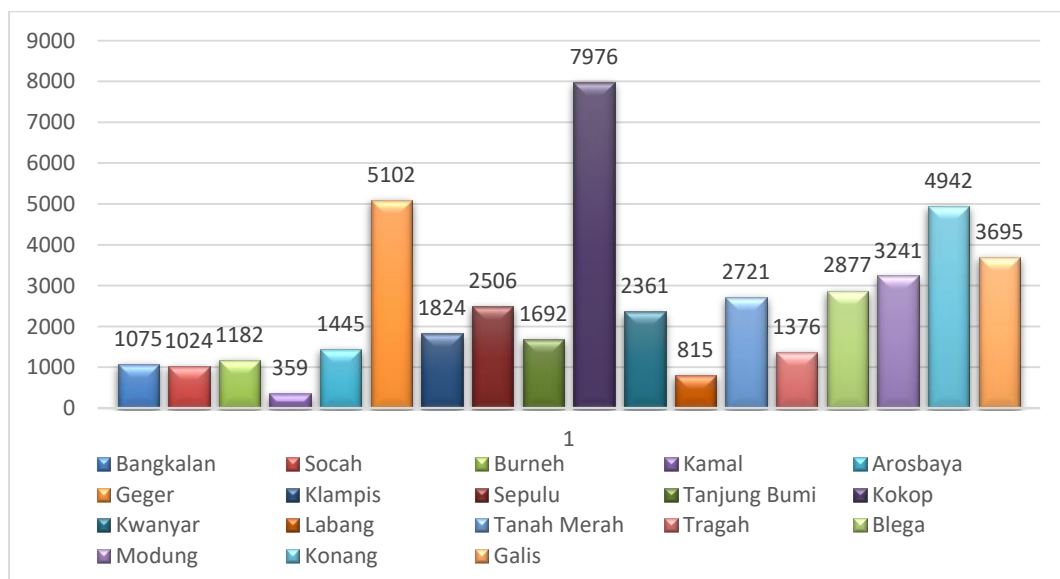
Kurangnya informasi yang lengkap pada siapakah pihak yang akan mendirikan PAUD tersebut dan Satuan PAUD jenis apakah yang akan didirikan. Untuk mempermudah jawaban, kami asumsikan bahwa PAUD didirikan oleh kelompok orang dan jenis Satuan PAUD yang akan didirikan adalah PAUD non formal seperti, KB/TPA/SPS. Pendirian Satuan PAUD oleh kelompok orang

wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. Persyaratan pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:

- a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis
- b) Persyaratan administratif pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:
- a. fotokopi identitas pendiri;
  - b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
  - c. susunan pengurus dan rincian tugas
- c) Persyaratan teknis pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:
- a. hasil penilaian kelayakan;
  - b. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.

Begitu banyaknya syarat yang harus dipenuhi Dalam pembangunan standarisai Bangunan kelas PAUD menyebabkan Gedung PAUD yang ada masih dimiliki perorangan atau biasanya banyak di tempatkan di Balai Desa. Terutama di Kabupaten Bangkalan. Sehingga fasilitas Gedung pembangunan PAUD di Bangkalan membutuhkan perhatian serius

### 4.5.3 Jumlah SD MI/Sederajat



Sumber : Data Bangkalan dalam Angka 2018 (diolah)

Jumlah Siswa 46.213 siswa SD sederajat di Kabupaten Bangkalan jumlah siswa yang terbanyak di Kecamatan Kamal sejumlah 7976 Jiwa dan terendah 815 di Kecamatan Galis. Jumlah ini akan mempengaruhi jumlah yang mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Soal-soal USBN yang didistribusikan ke kantor polsek itu adalah soal ujian Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan soal ujian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sedangkan jumlah sekolah yang mengikuti USBN pada tahun 2017/2018 diantaranya SDN 649 sekolah, SD swasta 43 lembaga, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 sekolah dan MI (Swasta) 142 lembaga. Total sebanyak 836 sekolah dengan peserta SDN 46.213 siswa ditambah siswa SD swasta dan MIN serta MIS. Jadi total peserta USBN keseluruhannya.

Dalam (Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) dijelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang tertuang ke dalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan di sekolah dasar yaitu, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', dari devinisi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pendidikan mempunyai arti sebuah cara mendidik siswa atau memotivasi siswa untuk berperilaku baik dan membanggakan. bila dijelaskan secara spesifik, maka devinisi pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pembelajaran. atau dapat disimpulkan usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

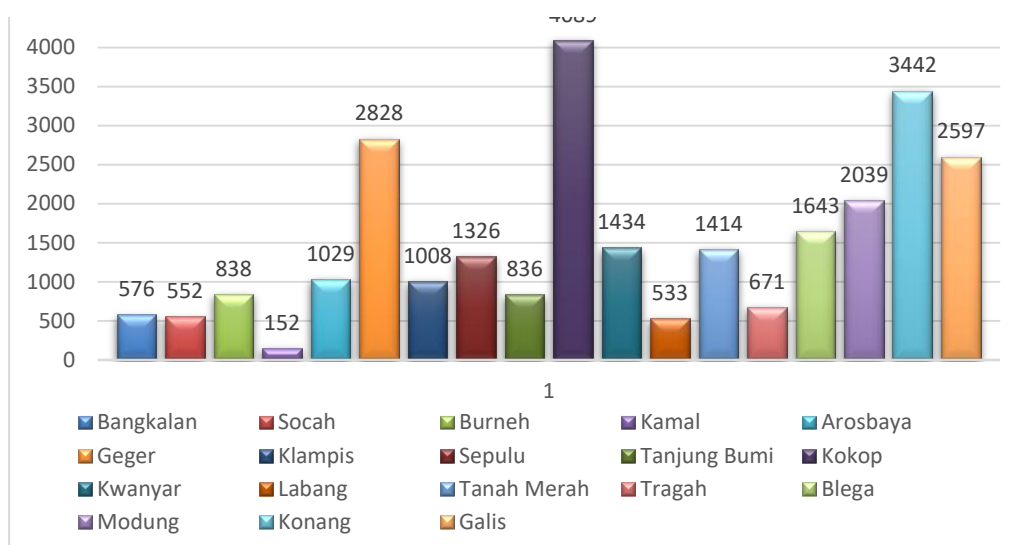
Pengertian pendidikan di sekolah dasar mempunyai makna yang sama dengan devinisi yang terurai di atas, namun saja letak audience atau siswanya saja yang membedakannya. Artinya, bahwa pendidikan di sekolah dasar titik tekannya terpusat pada siswa kelas dasar antara kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang

ketentuan materi dan pokok bahasannya diatur tersendiri dalam GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran). Sehingga pendidikan di sekolah dasar dengan ruang lingkungannya mencakup materi ke SD-an yang diselenggarakan sepanjang hayat sebagai pendidikan lanjutan dengan tujuan yang sama seperti uraian pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan.

Pemberian pendidikan secara non formal atau formal pada anak bukan hanya dilakukan dalam pendidikan keluarga saja, akan tetapi pemberian dan pemahaman pendidikan kepada anak yang lainnya juga bertumpu di tingkat Sekolah Dasar. Pendidikan di sekolah dasar merupakan faktor yang sangat penting. Mengapa demikian? Pada tingkat sekolah dasar inilah, pondasi perkembangan kemampuan berpikir dan belajar anak berpengaruh dan mempengaruhi pada jenjang yang selanjutnya. Artinya, perkembangan mental, fisik, serta inteligensi anak terpusat pada usia antara 0 tahun sampai dengan 12 tahun. masa-masa tersebut merupakan masa keemasan bagi pertumbuhan anak, baik fisik maupun psikisnya. Oleh karenanya, dimasa sekolah dasar, perlu diupayakan kepada anak agar dapat leluasa untuk menerima pengetahuannya dengan sebaik-sebaiknya dan sebenar-benarnya. lingkungan sekolah adalah tempat yang sangat berpengaruh terhadap potensi perkembangan belajar anak sekolah dasar ke ranah yang lebih baik seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap tujuan pendidikan di sekolah dasar maupun di sekolah lanjutan dapat terwujud. Setiap orang tua pasti menginginkan dan mendambakan anak yang dapat membanggakan orang tua. Bagaimana dengan anak kita? Anak merupakan generasi penerus bangsa. Sebagai orang tua tentunya mengharap kelak anak dapat menjadi penopang hidup yang dapat berguna bagi bangsa, agama, negara dan keluarga. Disini peran penting sekolah dasar sebagai ujung tombak pencetak keberhasilan tunas-tunas bangsa yang mampu menghadapi persoalan bangsanya di masa yang akan datang. Oleh karenanya, di setiap satuan sekolah masing-masing di seluruh Indonesia, sedikit demi sedikit sudah banyak mengalami perkembangan dan peningkatan baik dibidang sarana maupun prasarana. Mari dukung program pemerintah dengan iktikad baik dengan penuh harapan, semoga pendidikan di negeri yang kita cintai lebih baik hari demi hari.

Pada anak usia sekolah dasar antara 7 tahun sampai dengan 12 tahun, nalar berpikir mereka cenderung ingin tahu dan mencoba-coba. Hal ini yang mendasari, bahwa di sekolah dasar merupakan pusat dinamika pendidikan anak yang utama. Anak sekolah dasar akan lebih peka dan tajam dalam menyerap segala pengetahuannya. Oleh karena itu, agar tahap perkembangan belajar anak sekolah dasar dapat berjalan dengan optimal, diperlukan kedisiplinan pembelajaran yang berkesinambungan. Sehingga pada nantinya perkembangan belajar anak di sekolah dasar berkembang secara optimal. siapa yang tidak ingin memiliki anak yang pintar, cakap, kreatif dan juga berakhlak mulia. Pendidikan dasar sebagaimana level yang sangat penting dalam proses pembelajaran, berdasarkan grafik sebaran jumlah peserta didik di Bangkalan yang ada diatas di harapkan di Kecamatan Kokop adalah jumlah peserta sekolah tingkat sekolah dasar tertinggi sebanyak 7976 siswa, sedangkan paling rendah di kecamatan labang 815, sehingga rata-rata jumlah siswa di setiap kecamatan sekitar 288,1. Dari jumlah sebaran peserta didik pada tingkat SD ini sepertinya tersebar secara normal, sebaran normal ini tentu saaj mengindikasikan tinggi partisipasi kesadaran mengentan Pendidikan dasar di Kabupaten Bangkalan.

#### 4.5.4 Jumlah SMP Tsanawiyah/Sederajat



Jumlah Siswa SMP /yang sederajat tertinggi berada di Kecamatan Kamal sejumlah 4089 jiwa sedangkan terendah berada di Kecamatan Galis 533 jiwa

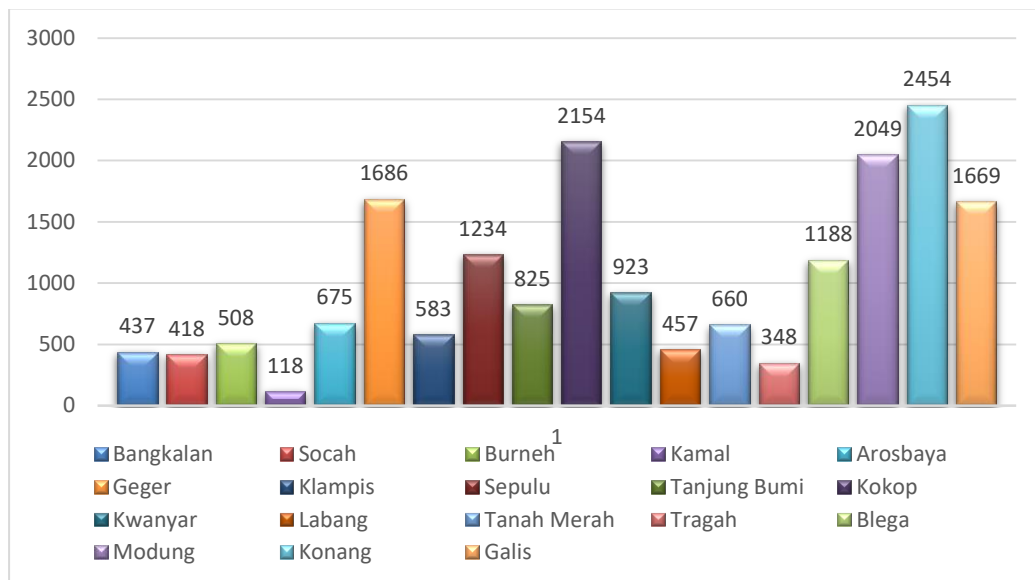
Pengertian Pendidikan Dasar SMP *Sekolah Menengah Pertama* (disingkat SMP) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari *Sekolah Dasar* (SD atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun (kelas 7 sampai kelas 9). Dulunya sekolah menengah pertama ini pernah disebut sebagai *Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama* (SLTP), hingga pada tahun ajaran 2003-2004 SLTP diganti dengan sebutan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sekolah menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah menengah pertama di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan, kini menjadi tanggung jawab daerah pemerintah kabupaten / kota. Sedangkan Departemen Pendidikan hanya bertindak sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah pertama adalah unit teknis pelayanan pendidikan kabupaten / kota. Di Indonesia mulai diberlakukan program wajib belajar 9 tahun yaitu antara usia 7-15 tahun, ini artinya setiap warga negara Indonesia wajib mendapatkan pendidikan mulai dari *Sekolah Dasar* (SD atau sederajat) sampai *Sekolah Menengah Pertama* (SMP atau sederajat).

Demikian catatan tentang sekolah menengah pertama ini saya tulis, dan saya rangkum dari beberapa sumber seperti wikipedia dan lain-lain. Semoga bermanfaat kawan, Pada tahun ajaran 1994/1995 hingga 2003/2004, sebutan SMP berubah menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Setelah tahun ajaran 2003/2004, SLTP berubah lagi menjadi SMP. Madrasah tsanawiyah (disingkat MTs) adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Murid kelas 9 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang memengaruhi kelulusan siswa. Lulusan MTs dapat melanjutkan pendidikan ke madrasah aliyah atau sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan. Kurikulum madrasah tsanawiyah sama dengan kurikulum sekolah menengah pertama, hanya saja pada MTS terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Pendidikan

lanjutan dari Pendidikan dasar adalah sekolam menengah pertama (SMP/Tsanawiyah), sebagaimana level yang sangat penting dalam proses pembelajaran, berdasarkan grafik sebaran jumlah peserta didik di Bangkalan yang ada diatas di harapkan jumlah yang tertinggi di Kec Kokop 4089 , sedangkan terendah di Kec.Burneh 838, jadi rata-rata pasrtispasi pada tingkat SMP berjumlah 1588 peserta siswa didik. Jumlah yang cukup normal sebarannya hal ini dikarenakan tingginya partisipasi sebaran pada sekolah menengah pertama.

#### 4.5.5 Jumlah SMA Aliyah Sederajat



Jumlah siswa SMA yang sederajat yang tertinggi di Kecamatan Kamal paling tinggi 2454 jiwa, sedangkan yang terendah berada di kecamatan Tragah sejumlah 348 jiwa. Hal ini dikarenakan tahap selanjutnya anak melanjutkan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah selama tiga tahun lagi. Pendidikan di sini bersifat pematangan dengan adanya pembagian sesuai dengan bakat si anak. Selesai di sekolah tingkat ini berarti sudah mulai masuk ke periode adoliscensi (masa dewasa). Bagi anak yang masih besar minatnya untuk melanjutkan pendidikan, kuat fikirnya serta mampu biayanya, masih bisa melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi. Pada masa ini, anak telah dapat menyelesaikan pembentukan pribadi sendiri, karena telah memasuki dunia kemahasiswaan dan telah berada atau menginjak masa *adoliscens*.



Pengertian Sekolah Menengah Atas – SMA adalah kepanjangan dari Sekolah Menengah Atas yang merupakan tingkat pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan SMA di luar negeri. Jenjang pendidikan yang ditempuh setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setaranya. SMA ditempuh dalam kisaran waktu tiga tahun, dari kelas X (kelas 1), kelas XI (kelas 2) hingga kelas XII (kelas 3). Untuk siswa yang cerdas, ada program akselerasi yang biasanya hanya ditempuh hanya dalam waktu dua tahun. Pada kelas XI, siswa SMA memiliki pilihan untuk masuk ke salah satu dari tiga departemen, yaitu Sains, Sosial dan Bahasa (sebelumnya, tidak pernah ada pilihan jurusan atas nama ilmu pengetahuan, ilmu sosial, dan bahasa. Kemudian, Fisika, Biologi, Sosial, dan Bahasa). Pada akhir kelas XII (tahun ketiga), siswa-siswi diwajibkan untuk menjalani Ujian Nasional (Ebtanas). Setelah itu, ketika sudah lulus tingkat SMA, siswa-siswi bisa melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, tetapi ada juga yang langsung dapat bekerja. Secara umum, **Pengertian Sekolah Menengah Atas** adalah sekolah anak-anak yang berusia 16 sampai 18 tahun. Namun, di luar itu banyak siswa yang berusia 14 atau 15 sudah di SMA. Sebaliknya, ada juga siswa yang berusia 20 atau 21 tahun masih seragam SMA. Pada dahulu kala, saat kolonialisme Belanda, SMA disebut dengan nama *Algemeene Middelbare School* (AMS). Di era penjajahan Jepang, SMA disebut dengan Sekolah Menengah Tinggi (SMT). Pasca kemerdekaan, SMT berganti nama lagi menjadi Sekolah Menengah Oemoem Atas (SMOA). Dan tak lama kemudian, SMOA berubah menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tahun akademik 1994/1995, SMA berubah menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU). Tapi hanya sepuluh tahun, setelah tahun 2003/2004 sekolah, sebutan SMA digunakan lagi sampai sekarang. SMA diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Sebelum daerah otonom diberlakukan pada tahun 2001, pengelolaan SMA negeri di Indonesia di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Sekarang, manajemen merupakan tanggung jawab kabupaten/kota. Departemen Pendidikan telah menjadi peran yang terbatas regulator dalam standar nasional pendidikan. Dengan demikian, secara struktural, negara kini telah menjadi sekolah tinggi unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten / kota.

Pendidikan menengah merupakan tahap krusial dalam sistem pendidikan untuk perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak-anak muda yang didapat lewat pendidikan menengah penting untuk masa depan sebagai warga negara yang produktif dan sehat di negara mereka. Dewasa ini, banyak negara yang menginginkan tenaga kerja yang memuaskan yang dilengkapi dengan kompetensi dan keahlian yang tidak bisa didapat lewat pendidikan dasar. Peningkatan ke pendidikan menengah pun harus mulai diperkuat sebagai bekal minimal hidup anak-anak muda bangsa di era globalisasi ini. Pendidikan menengah mulai jadi perhatian utama pengambil kebijakan pendidikan dan peneliti di dunia karena berperan penting meningkatkan kesehatan dan ikatan masyarakat serta memacu pertumbuhan ekonomi. Pendidikan menengah penting dalam sistem pendidikan karena tidak hanya untuk menjembatani untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi juga menghubungkan sistem sekolah dengan dunia kerja. Pendidikan vokasional semacam SMK pun banyak dikembangkan, termasuk di Indonesia. Pendidikan SMK dinilai berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemungkinan menemukan pekerjaan yang layak atau meningkatkan pendapatan melalui wirausaha. Dalam penguatan SMK, perlu dikumpulkan data dan dianalisis untuk permintaan keterampilan, penciptaan kerja, iklim investasi, dan layanan pekerjaan yang berhubungan dengan persediaan keahlian yang diminta pasar. "Tidak bisa suatu negara melepaskan diri dari belitan kemiskinan tanpa ekspansi yang cepat pada jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah inilah bekal minimum untuk melengkapi anak-anak muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membuat mereka siap hidup dalam persaingan global," kata Irina Bokova, Direktur Jenderal UNESCO tahun 2019.

## BAB V. Penutup

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### 1. Kesehatan

Jumlah Ibu bersalin yang mengalami kematian mengalami penurunan dari 10 orang di tahun 2017 menjadi 3 orang di tahun 2018, kematian ibu hamil juga mengalami penurunan dari 3 orang di tahun 2017 menjadi 2 orang di tahun 2018. Sementara itu, ibu nifas yang meninggal meningkat dari 4 orang di tahun 2017 menjadi 6 orang di tahun 2018. Jumlah kematian bayi mengalami peningkatan pada tahun 2017 jumlah bayi meninggal sebesar 129 dan tahun 2018 jumlah kematian bayi sebesar 132. penyebab meningkatnya kematian bayi tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan kesehatan, kesadaran dan pemeriksaan kesehatan bayi pada tenaga kesehatan, pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam penatalaksanaan bayi. Jumlah kematian balita mengalami peningkatan pada tahun 2017 jumlah balita meninggal sebesar 138 dan tahun 2018 jumlah kematian balita sebesar 140. penyebab meningkatnya kematian balita tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan kesehatan, kesadaran dan pemeriksaan kesehatan bayi pada tenaga kesehatan, pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam penatalaksanaan bayi. Jumlah penyakit paling tinggi yaitu Tuberkulosis (TB) sebesar 1.256 orang, sementara itu penyakit yang paling sedikit diderita masyarakat adalah Suspek malaria yaitu hanya 2 orang yang terkena Suspek Malaria. Jumlah penyakit menular yang dapat diobati dengan imunisasi (PD3I) yang paling besar adalah penyakit Campak yaitu sebesar 54 yang kedua adalah penyakit difteri, sementara penyakit menular yang tidak dapat diobati dengan imunisasi (PD3I) adalah penyakit hepatitis B dan polio. Jumlah berat badan lahir rendah (BBLR) terbesar terdapat di puskesmas tanah Merah dan puskesmas geger terdapat 46 bayi, dan bayi lahir dengan berat rendah (BBLR) terdapat di Puskesmas modung hanya sebesar 2 bayi. Secara total jumlah bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 376 bayi. Jumlah BGM baduta di

Kabupaten Bangkalan sebanyak 54 baduta, puskesmas yang paling banyak jumlah BGM-nya yaitu puskesmas Kecamatan Bangkalan sebesar 13 baduta yang kedua puskesmas Arosbaya sebanyak 11 baduta. Sementara terdapat 5 puskesmas yang tidak ada BGM baduta yaitu puskesmas Blega, Galis, Tragah, Tongguh dan tanjung Bumi. Jumlah Gizi buruk di tahun 2018 sebanyak 113 balita hal jumlah tersebut lebih rendah dibanding tahun 2017 sebesar 242, artinya jumlah balita gizi buruk mengalami penurunan sebesar 129 balita. Jumlah gizi buruk di kabupaten bangkalan masih tinggi hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menyadari pentingnya zat gizi yang ada dalam makanan. Masyarakat menganggap bahwa makanan yang dimakan hanya cukup untuk mengenyangkan saja tidak memperhatikan zat gizi yang dikandung.

## 2. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jumlah investasi terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir mulai tahun 2017 samapai tahun 2019, di tahun 2017 nilai investasi mencapai Rp. 117.574.466.324 di tahun 2018 investasi meningkat hampir 300% yaitu menjadi Rp. 309.390.188.000 dan di tahun 2019 di triwulan kedua kembali meningkat menjadi Rp. 467.632.629.442. Peningkatan investasi tersebut merupakan adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk mempermudah proses perijinan di bidang investasi dan sarana prasarana invesatsi yang cukup mewadai investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bangkalan setelah adanya jempatan Suramadu. Pembentukan modal tetap bruto atau nilai investasi di Kabupaten Bangkalan adalah komponen tertinggi penyumbang pertumbuhan ekonomi dimana selama tiga tahun terakhir tumbuh  $\pm 9$  persen tahun 2016,  $\pm 6$  persen di tahun 2017, dan  $\pm 6$  persen di tahun 2018. Penyerapan tenaga kerja dari investasi sangat signifikan dan terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di tahun 2017 jumlah tenaga kerja sebanyak 1.750 orang meningkat di tahun 2018 menjadi 1.856 orang dan di tahun 2019 triwulan kedua penyerapan tenaga kerja dari investasi meningkat  $\pm 53\%$  hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Bangkalan yang terus meningkat. Berdasarkan komposisinya, investasi berada di tingkat ke 2 yang menyumbang 31 persen PDRB setelah konsumsi rumah tangga. Perizinan usaha di Kabupaten bangkalan

di Tahun 2017 terdapat beberapa izin usaha, seperti SIUP, IMB, IR, PSPM, HO, TDP, TDG dan TDI. Dari jenis izin usaha tersebut yang paling banyak adalah jenis izin usaha TDP yaitu sebanyak 584 usaha dan terbanyak kedua adalah izin usaha SIUP sebanyak 446 usaha dan yang paling kecil adalah TDI hanya 10 usaha.

### 3. Pendapatan Daerah

Pemkab Bangkalan kembali mendapat kucuran dana puluhan miliar rupiah. Kali ini dari bagi hasil pajak provinsi. Nilainya mencapai Rp 239.513.792.916,41. Capaian pada Kwartal tahun 2018, sedangkan capaian serapan PAD tahun 2019 pada kuartal ke-3, nilai PAD mencapai Rp 136.308.321.528, baru terserap 66%, sedangkan sisanya akan muncul pada akhir tahun anggaran bulan November-Desember. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bangkalan terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kini Bapenda Bangkalan tengah mematangkan layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (E-BPHTB) melalui aplikasi android atau play store.

Bapenda Bangkalan membuka sistem pelayanan Elektronik BPHTB yang mulai diterapkan beberapa bulan yang lalu akan diperkuat dengan layanan aplikasi playstore di smartphone. Penguatan e-BPHTB melalui aplikasi Play Store merupakan wujud feedback atas peran serta masyarakat dalam meningkatkan pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat melalui pengenaan pajak. BPHTB merupakan pungutan dari perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan objek pajak dengan besaran tarif sebesar 5 persen dari nilai perolehan objek pajak. Nilai objek pajak berbeda-beda, tergantung pada NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) plus nilai pasaran. Sistem pengelolaan secara online atau e-BPHTB akan mempermudah Prosedur Wajib Pajak dan meingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangkalan. Sebagai catatan, hingga akhir triwulan II atau Juni di tahun ini sektor penerimaan dari BPHTB Bapenda Bangkalan telah menembus angka 135 persen atau senilai Rp 6 miliar lebih dari target Rp 4,5 miliar. Sedangkan pada triwulana IV ini, diharapkan pencapaian sektor penerimaan dari BPHTB telah menembuh angka 200,2 persen atau sekitar Rp 9 miliar lebih. juga tengah fokus meng-online-kan sistem pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB),



reklame, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Sebelumnya, pelayanan PBB, reklame, NPWPD, termasuk E-BPHTB ditempatkan di ruang terpisah. Kini kami satukan di tempat khusus, Ruang Pelayanan, Peningkatan pelayanan PBB dengan sistem online bertujuan untuk merangkul dan mempermudah akses bagi wajib pajak yang ada di pelosok. Siswa mengatakan, masyarakat kota maupun desa yang mempunyai nomor wajib pajak nantinya tinggal klik dan langsung tersambung melalui barcode. Saat ini, lanjutnya, Bapenda Bangkalan tinggal menyiapkan perangkat-perangkatnya untuk dioptimalkan di setiap kecamatan.

#### 4. Sosial

Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya mengalami peningkatan garis kemiskinan, tahun 2017 Kabupaten Bangkalan memiliki garis kemiskinan sebesar 349.073 rupiah, Sedangkan tahun 2018 ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 369.455 rupiah. Penurunan rasio gini secara berkelanjutan di masa pemerintahan Jokowi-JK tidak lepas dari keberhasilan pemerintahan mereka untuk menurunkan rasio gini di tingkat perkotaan secara konsisten, hingga mencapai 0,401 di Maret 2018. Sebelumnya, rasio gini di perkotaan cukup bergejolak, dan sempat menyentuh angka 0,433 pada September 2014. Hanya saja, pemerintahan Jokowi-JK masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar. Kabupaten Bangkalan yang memiliki indeks gini 0.34 memiliki tingkat ketimpangan sedang, sedangkan ditahun 2009 sampai 2013 bangkalan memiliki indeks gini dibawah 0.3 yang artinya memiliki ketimpangan rendah pada tahun itu. Akan tetapi ditahun 2014 sampai dengan 2015 indeks gininya naik hingga mencapai 0.32 yang mengindikasikan Kabupaten Bangkalan ditahun tersebut kembali memiliki tingkat ketimpangan sedang. Indeks gini Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 lebih rendah apabila dibandingkan dengan indeks gini dari Jawa Timur yaitu 0.42 persen. Sesuai data, jumlah rumah warga yang tidak layak huni huni sebanyak 118.834 unit, sedangkan yang layak huni hanya sebanyak 111.520 unit," Ini berarti, sambung dia, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangkalan lebih banyak 7.314 unit dibanding jumlah rumah warga yang layak huni. Kabupaten Bangkalan. Tingginya penerima Jamkesmas dberada di kecamatan

Kokop dengan jumlah cukup besar yaitu 80.544 jumlah yang cukup ekstrem jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain, kecamatan Bangkalan rata-rata berada yang terendah pada angka 11.293 dan rata-rata berada di jumlah 28.174.

## 5. Pendidikan

Jumlah Siswa 46.213 siswa SD sederajat di Kabupaten Bangkalan akan mengikut Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Sedangkan jumlah sekolah yang mengikuti USBN pada tahun 2017/2018 diantaranya SDN 649 sekolah, SD swasta 43 lembaga, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 sekolah dan MI (Swasta) 142 lembaga. Total sebanyak 836 sekolah dengan peserta SDN 46.213 siswa ditambah siswa SD swasta dan MIN serta MIS. di Bangkalan yang ada diatas di harapkan di Kecamatan Kokop adalah jumlah peserta sekolah tingkat sekolah dasar tertinggi sebanyak 7976 siswa, sedangkan paling rendah di kecamatan labang 815, sehingga rata-rata jumlah siswa di setiap kecamatan sekitar 288,1. Sekolah menengah pertama (SMP/Tsanawiyah), sebagaimana level yang sangat penting dalam proses pembelajaran, berdasarkan grafik sebaran jumlah peserta didik di Bangkalan yang ada diatas di harapkan jumlah yang tertinggi di Kec Kokop 4089 , sedangkan terendah di Kec.Burneh 838, jadi rata-rata pasrtispasi pada tingkat SMP berjumlah 1588 peserta siswa didik. Jumlah yang cukup normal sebarannya hal ini dikarenakan tingginya partisipasi sebaran pada sekolah menengah pertama. Jumlah peserta didik di Bangkalan yang ada diatas di harapkan jumlah yang terbanyak di kecamatan Konang sebanyak 2454 sedangkn paling rendah di Kecamatan Trageh berjumlah 437 dan rata-rata siswa sebanyak 1081 jumlah yang cukup normal dalam sebaran siswa yang samapi mengenyam Pendidikan pada level setingkat menengah atas.

### 5.2. Implikasi Kebijakan

Kabupaten Bangkalan tahun Anggaran 2020 merumusan kebijakan pembangunan secara jelas telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2020. Prioritas pembangunan dalam segi kualitas sumberdaya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan potensi ekonomi masyarakat, peningkatan



produktivitas pertanian, dan perbaikan pelayanan publik serta pelayanan ketertiban dan keamanan masyarakat. Kekuatan sumber daya merupakan peluang yang harus tetap diupayakan, tantangan dan hambatan tetap diselesaikan sebagai momentum untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan perekonomian daerah yang produktif.

PAD saat ini mengalami peningkatan satu digit dari tahun sebelumnya. Tahun lalu 2,2 sementara tahun ini 2,3. Prioritas pemerintah kabupaten Bangkalan yaitu Sumber Daya sebagaimana yang menjadi tema pembangunan kabupaten Bangkalan. Produktivitas pertanian dalam arti luas akan ditingkatkan. Seperti pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup. Pelayanan publik juga akan ditingkatkan. Sementara pemenuhan sumber daya keuangan daerah tetap memiliki keterbatasan. Sumber daya memang menjadi tema kami. Anggaran kami prioritaskan pada kesehatan dan pendidikan. Ada beasiswa pelajar tidak mampu yang berprestasi.

Delapan masalah itu antara lain, keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur dasar yang belum merata, serta penanganan permasalahan lingkungan hidup dan mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan. Kemudian, menekan tingkat kemiskinan dan masih terbatasnya penyediaan lapangan kerja, rendahnya investor skala besar, serta belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam. Selain itu, kurang optimalnya pelayanan publik dan reformasi birokrasi serta belum mandirinya pemerintah daerah dalam pendanaan pembangunan di daerah. Keterbatasan SDM bisa ditingkatkan melalui pendidikan dan kesehatan. Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja. Rendahnya investor bisa diatasi dengan memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelayanan perizinan. Karena itu, orang pertama di Pemkab Bangkalan ini optimis bisa mendatangkan investor skala besar.

Demi mencapai target kinerja tahun 2020, maka tema pembangunan yang ditetapkan adalah Percepatan pembangunan kualitas SDM dan penyelenggaraan pelayanan publik dasar yang merata. Dari tema itu selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020, sebagai berikut.



1. Pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan publik dasar dan ke terjangkau anak wilayah
3. Serta mitigasi bencana.
4. Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan perluasan kerja.
5. Peningkatan investasi melalui kemudahan dan kepastian dalam pelayan perijinan.
6. Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Perwujudan pemerintah yang bermartabat, pelayanan masyarakat dan stabilitas ketertiban dan keamanan melalui perbaikan .
8. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar.

Pembangunan infrastruktur dasar yang belum ada pemerataan, penanganan permasalahan lingkungan hidup serta penanganan bencana yang harus ditingkatkan, angka kemiskinan masih tinggi dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Belum ada pemerataan terkait infrastruktur dari mulai kota sampai ke pelosok desa. Dan juga angka kemiskinan masih tergolong sangat tinggi serta keterbatasan lapangan pekerjaan,” urainya. Selain itu, rendahnya investor skala besar yang menanam modalnya, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, khususnya pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Kurang optimalnya pelayanan publik dalam sistem birokrasi, dan belum ada kemandirian pemerintah daerah dalam sistem pendanaan. Tantangan pemerintah nanti. Semoga semuanya bisa teratasi dan masyarakat bisa hidup sejahtera, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan Kabupaten Bangkalan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 bersama Malang dan Surabaya.

Di Kabupaten Bangkalan, Kementerian PUPR tengah menyiapkan sejumlah rencana pengembangan, dengan nilai potensi investasi mencapai Rp 53 triliun di atas lahan seluas 600 hektare di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura

(KKJSM) dan 600 hektare Kawasan Khusus Madura (KKM). KKJSM meliputi kawasan industri dan pergudangan seluas 320 hektare, pariwisata seluas 21 hektare, Central Business District (CBD) seluas 52,6 hektare, dan pemukiman seluas 115,4 hektare, dan fasilitas umum (rest area) seluas 67,7 hektare.

Sedangkan KKM meliputi kawasan industri dan pergudangan seluas 201 hektare, pergudangan seluas 161 hektare, perdagangan dan jasa seluas 78 hektare, dan kawasan permukiman seluas 159 hektare. KKJSM dibangun sebagai pintu gerbang dan kawasan pusat pertumbuhan Pulau Madura. Sementara KKM sebagai kawasan industri dan pergudangan untuk mendukung pelabuhan peti kemas berskala internasional Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka diperlukan strategi pembangunan daerah yang mampu memberikan arahan sektoral bagi kebijakan pembangunan wilayah kecamatan dan desa seperti: (a) Pengembangan ekonomi perdesaan dalam mengentaskan kemiskinan; (b) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; (c) Peningkatan keterbukaan dan iklim investasi; (d) Optimalisasi tatakelola aset daerah; (e) Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; dan (f) Kebijakan pengembangan SDM. Adapun strategi khusus yaitu:

1. Peningkatan Kesempatan (*creating opportunities*), melalui pengembangan bisnis dan kesempatan kerja
2. Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*) melalui pemberdayaan sehingga mampu mengakses terhadap sumberdaya ekonomi, sosial dan hak-hak politik.
3. Peningkatan Kapasitas & pembangunan sumberdaya manusia (*Capacity Building and Human Resource Development*), melalui peningkatan kemampuan yang berkaitan dengan sasaran peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan investasi dan aparatur pendapatan daerah agar makin produktif.
4. Perlindungan Sosial (*Social Protection*): Perlindungan sosial yang berkaitan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat

yang mengalami kecacatan, fakir miskin, keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin.

Badan Pendapatan Daerah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 107 persen pada 2017/9 tak lantas membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bangkalan puas diri. Mengingat masih ada sejumlah titik wajib retribusi yang belum ditertibkan secara maksimal. Wajib retribusi yang belum tergarap maksimal itu adalah parkir dan pasar. Kedua sektor wajib retribusi itu paling dominan menjadi pembahasan dalam Workshop Potensi Pajak dan Retribusi. Pada Kwartal Ke 4 Ini di akhir tahun 2019 Bapenda meningkatkan aktifitas dan jumlah serapan Anggaran sisanya sebesar 35 %. Berikut adalah grafik capaian serapan anggaran Bapenda Bangkalan.



TAHUN 2019  
Statistik Sektoral Kabupaten Bangkalan